



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS PENENTUAN SEKTOR/SUBSEKTOR UNGGULAN  
DAN KAITANNYA DENGAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA**

**TESIS**

**ZULFI HARIS  
NPM 1006791902**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
JAKARTA  
JANUARI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS PENENTUAN SEKTOR/SUBSEKTOR UNGGULAN  
DAN KAITANNYA DENGAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Ekonomi ( M.E )**

**ZULFI HARIS**

**NPM 1006791902**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
KEKHUSUSAN EKONOMI PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH  
JAKARTA  
JANUARI 2012**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika dikemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggungjawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, Januari 2012



ZULFI HARIS

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : ZULFI HARIS

NPM : 1006791902

Tanda Tangan : 

Tanggal : Januari 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Zulfi Haris  
NPM : 1006 791 902  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul Tesis : Analisis Penentuan Sektor/Sub Sektor Unggulan dan Kaitannya Dengan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Lampung utara

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Master Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Sartika Djamaluddin. (  )

Penguji : Iman Rozani, M.Soc.Sc. (  )

Penguji : Paksi C. Walandaouw, SE, MA (  )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmad-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Sartika Djamaluddin, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Bapak Iman Rozani, M.Soc.Sc, selaku dosen penguji dalam sidang tesis dan komprehensif yang telah memberikan saran dan kritik membangun untuk terus belajar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan;
3. Bapak Paksi C. Walandouw, SE, MA, selaku dosen penguji dalam sidang tesis dan komprehensif yang telah memberikan saran dan kritik yang membuat penulis termotivasi untuk menjadi yang lebih baik;
4. Bapak Arindra A. Zainal, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia beserta karyawan bagian akademik yang selalu memotivasi dan memberikan pendampingan;
5. Kepala Pusbindiklatren Bappenas sebagai pemberi beasiswa dan Bupati Lampung Utara serta Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara sebagai pimpinan yang memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di MPKP;
6. Keluarga Besar MPKP XXIII Bappenas, temen temen kos ( arga dan ahmad maulana, Deky virandola, C.karyadinata, Bang Budi siregar, Rosihan ahmad, novin, bang badar, bang beny), dan temen-temen lainnya atas kebersamaan dan keceriaan selama menempuh pendidikan ;
7. Semua pihak yang turut serta membantu penelitian ini yang tidak tersebut.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, Januari 2012

Zulfi Haris



**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulfi Haris

NPM : 1006791902

Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik

Departemen : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi

Jenis Karya : Tesis

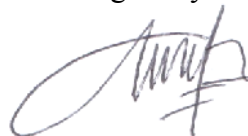
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“ANALISIS PENENTUAN SEKTOR/SUB SEKTOR UNGGULAN DAN KAITANNYA DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Januari 2012

Yang menyatakan



Zulfi Haris



## ABSTRAK

Nama : Zulfi Haris  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul Tesis : Analisis Penentuan Sektor/Subsektor Unggulan Dan Kaitannya Dengan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Lampung Utara

Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah, akan tetapi daerah memiliki kemampuan keuangan dan sumber daya yang terbatas sehingga konsukuensinya pembangunan harus di fokuskan pada sektor sektor yang memiliki keunggulan dan memberikan dampak pengganda (*Multiplier effect*) yang besar terhadap sektor-sektor lainnya. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sektor dan subsector yang mempunyai keunggulan kemudian bagaimana sektor /subsector unggulan tersebut dijadikan sebagai sektor/subsector prioritas dalam perencanaan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Metode yang digunakan menggunakan gabungan antara metode LQ yang bertujuan untuk mengetahui sektor/subsector basis dan metode shift share yang bertujuan untuk melihat pola pertumbuhan serta mengetahui sektor sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 7 subsektor unggulan yang *tradeable* adalah sub sektor subsektor kehutanan, subsektor listrik, perdagangan besar dan eceran, angkutan jalan raya, subsektor industri makanan dan minuman, perkebunan subsektor perbankan. Dari 7 subsektor unggulan terdapat 6 subsektor yang masuk dalam program prioritas pada RPJMD Lampung Utara tahun 2010-2014 sedangkan 1 subsektor unggulan lainnya tidak masuk RPJMD, Sedangkan yang mendapat dukungan alokasi anggaran terbesar yaitu sub sektor yaitu subsektor jasa pemerintahan lainnya, sub sektor administrasi pemerintahan dan sektor kontruksi sedangkan subsektor unggulan mendapatkan porsi anggaran kurang dari 3 % , sehingga perlu distribusi anggaran yang lebih merata terutama terhadap subsektor unggulan.

Kata Kunci : Subsektor unggulan, Lampung Utara kaitanya dengan RPJMD, anggaran,

## ABSTRACT

Name : Zulfi Haris  
Study Program : Master of Planning and Public Policy  
Title : Determination Analysis Sector / Subsector Competitive Relation With Planning And Economic Development District of North Lampung

Local economic development aims for the welfare of society that existed in the area, but the area has the financial capacity and resources are limited so konsukuensinya development should be focused on those sectors which have advantages and multiplier impacts (multiplier effect) a large effect on other sectors . So the purpose of this study was to identify the sector and subsector that has the advantage then bagaimana sector / subsector is used as a leading sector / subsector priority in the planning of local economic development planning. The method used to use a combination of the LQ method that aims to determine the sector / subsector base and shift share method that aims to look at patterns of growth and to know the sectors that have a competitive advantage. The results showed there were seven sub-sector is leading the tradeable sector sub sub forestry, electricity sub-sector, wholesale and retail trade, road transport, food and beverage industry sub-sectors, the banking sub-sector plantations. Of the seven sub-sectors are seeded into six sub-sectors in the priority programs in North Lampung RPJMD year 2010-2014 while the other leading a sub-sectors not included RPJMD, while receiving the support of the largest budget allocation of sub-sectors, namely other government services sub-sectors, sub sectors of public administration and construction sub-sector while leading a portion of the budget is less than 3%, so it needs a more equitable distribution of the budget, especially to sub-eminent.

*Keywords: Sub-sector seed, North Lampung RPJMD regard, the budget,*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pembangunan Ekonomi Daerah.....	8
2.2. Perencanaan Pembangunan Ekonomi.....	13
2.3. Teori Basis Ekonomi .....	18
2.4. Analisis <i>Shift Share</i> .....	23
2.5. Sektor Unggulan .....	25
2.6. Teori Perubahan Struktural .....	27
2.7. Pendapatan Daerah Regional Bruto .....	27
2.8. Pengembangan Sektor Unggulan Sebagai Strategi Pembangunan ..	33
2.9. Penelitian Terdahulu .....	29
2.10. Kerangka Pemikiran.....	36
<b>3. METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis dan Sumber Data .....	40
3.2. Metode Analisis Data .....	40
3.2.1 Metode Analisis <i>Location Quotient</i> .....	40
3.2.2 Analisis <i>Shift Share</i> .....	42
3.3. Definisi Variabel Penelitian .....	46
<b>4. Gambaran Umum Obyek Penelitian</b>	
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	47
4.1.1 Letak Geografis.....	47
4.1.2 Wilayah Administrasi .....	47
4.1.3 Topografis .....	48
4.1.4 Demografi .....	48

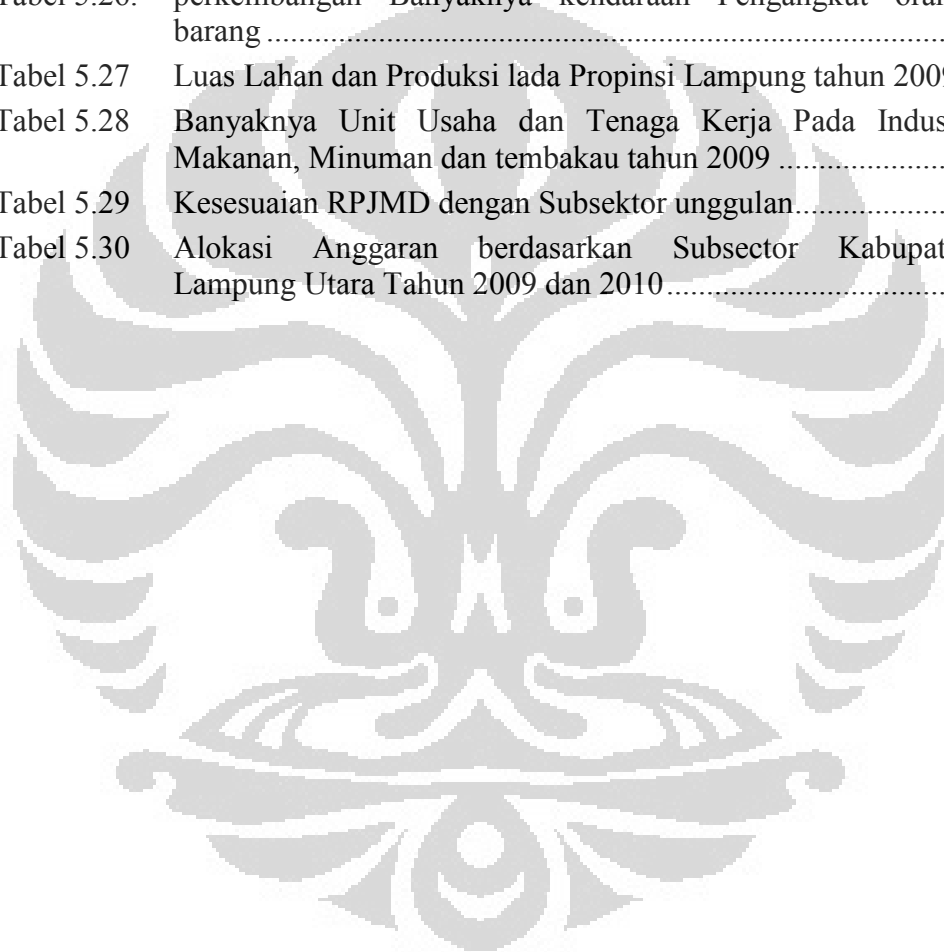
4.2.	Struktur Ekonomi Kabupaten Lampung Utara .....	48
4.3.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Utara .....	50
4.4.	Pendapatan Perkapita .....	52
4.5.	Profil Sektor-Sektor .....	53
<b>5.</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1.	Analisis Basis Ekonomi .....	69
5.1.1.	Sektor Pertanian .....	70
5.1.2.	Sektor Pertambangan dan Penggalian .....	71
5.1.3.	Sektor Industri Pengolahan .....	72
5.1.4.	Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih.....	73
5.1.5.	Sektor Bangunan.....	73
5.1.6.	Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.....	74
5.1.7.	Sektor Pengangkutan dan Komunikasi .....	74
5.1.8.	Sektor Keuangan, real estat dan Jasa Perusahaan .....	75
5.1.9.	Sektor Jasa Jasa.....	76
5.2.	Analisis Efek Pengganda Basis ( <i>Basis Multiplier</i> ) .....	77
5.3.	Analisis Shift Share.....	79
5.3.1.	Pertanian .....	80
5.3.2.	Sektor Pertambangan dan Penggalian .....	81
5.3.3.	Sektor Industri Pengolahan .....	82
5.3.4.	Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih.....	83
5.3.5.	Sektor Bangunan.....	84
5.3.6.	Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.....	84
5.3.7.	Sektor Pengangkutan dan Komunikasi .....	85
5.3.8.	Sektor Keuangan, real estat dan Jasa Perusahaan .....	86
5.3.9.	Sektor Jasa Jasa.....	87
5.4.	Analisis Penentuan Subsektor Unggulan .....	88
5.5.	Dukungan Pemerintah Terhadap Sektor/Sub sektor Unggulan .....	101
5.5.1.	Kebijakan terhadap Subsektor kehutanan .....	103
5.5.2.	Kebijakan terhadap subsector Listrik.....	103
5.5.3.	Kebijakan terhadap Subsektor perdagangan besar dan eceran .....	103
5.5.4.	Kebijakan Subsektor Angkutan Jalan Raya .....	104
5.5.5.	Kebijakan Subsektor Industri Pengolahan .....	104
5.5.6.	Kebijakan Subsektor Perkebunan .....	104
5.6.	Alokasi Anggaran Sektoral .....	105
5.7.	Relevansi Kebijakan .....	108
<b>6.</b>	<b>PENUTUP</b>	
6.1.	Kesimpulan .....	110
6.2.	Rekomendasi dan Saran .....	111
6.3.	Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi Penelitian berikutnya ....	112
	DAFTAR PUSTAKA .....	113

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Distribusi Persentase PDRB berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kab. Lampung Utara .....	3
Tabel 1.2. Sumber Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2010-21011 .....	5
Tabel 1.3. Anggaran Belanja berdasarkan Jenis Belanja .....	6
Tabel 2.1. Penelitian Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 4.1. Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Kab. Lampung Utara Tahun 2000-2010 .....	52
Tabel 4.2. Luas dan Produksi Tanaman Bahan Makanan dan Holtikultura di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 .....	53
Tabel 4.3. Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan besar Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Lampung Utara tahun 2004-2009 .....	55
Tabel 4.4. Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman Perkecamatan di Kabupaten Lampung Utara tahun 2010 .....	55
Tabel 4.5. Jumlah Produksi Ternak Besar dan Kecil di Kabupaten Lampung Utara tahun 2008-2009.....	57
Tabel 4.6. Jumlah Populasi ternak Unggas perkecamatan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009.....	57
Tabel 4.7. Luas Area Pemeliharaan/Penangkapan Produksi Ikan menurut sumbernya di Kabupaten Lampung Utara tahun 2009 .....	58
Tabel 4.8. Pruduksi Hasil Hutan Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara tahun 2009.....	59
Tabel 4.9. Banyaknya Unit Usaha dan tenaga kerja Perusahaan Industri dan Nilai Produksi serta Investasi di Kab. Lampung utara .....	60
Tabel 4.10. Banyaknya tenaga kerja , asset dan omzet PKM Kabupaten Lampung Utara tahun 2008 .....	62
Tabel 4.11. Jumlah Produksi Listrik Menurut penggunaan di Kabupaten Lampung Utara tahun 2003-2009.....	63
Tabel 4.12. Banyaknya Pelanggan, KVA terpasang, dan KWH terpasang di Kabupaten Lampung Utara tahun 2003-2009 .....	63
Tabel 4.13. Banyaknya perusahaan / usaha yang terdaftar menurut jenis usaha tahun 2005-2008.....	64
Tabel 4.14. Jumlah Hotel, Losmen dirinci Menurut Banyaknya Kamar, Tenaga Kerja dan Rata-rata Tamu perhari tahun 2009 .....	65
Tabel 4.15. Panjang Jalan Menurut Permukaan Jalan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009.....	66
Tabel 4.16. Banyaknya Kendaraan Roda 4 menurut Jenis di kabupaten Lampung Utara tahun 2005-2009.....	66
Tabel 4.17. Banyaknya Stasiun kereta Api di Kabupaten Lampung Utara ..	67
Tabel 4.18. Jumlah Pendapatan Penjualan Benda Pos tahun 2003-2009 .....	67

Tabel 4.19	Jumlah Saluran Telepon tetap menurut kapasitas sentral wilayah Kotabumi tahun 2000-2007 .....	68
Tabel 5.1.	Hasil Perhitungan LQ Sektor Pertanian Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010.....	70
Tabel 5.2.	Hasil Perhitungan LQ Sektor Pertambangan dan penggalian Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010 .....	72
Tabel 5.3.	Hasil Perhitungan LQ Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010 .....	72
Tabel 5.4.	Hasil Perhitungan LQ Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010 .....	73
Tabel 5.5.	Hasil Perhitungan LQ Sektor Bangunan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010.....	74
Tabel 5.6.	Hasil Perhitungan LQ Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010.....	74
Tabel 5.7.	Hasil Perhitungan LQ Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010.....	75
Tabel 5.8.	Hasil Perhitungan LQ Sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010.....	76
Tabel 5.9	Hasil Perhitungan LQ Sektor Jasa-Jasa Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010.....	76
Tabel 5.10	Sektor/subsektor Basis Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010.....	77
Tabel 5.11	Potensi Ekspor untuksubsektor Basis Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010.....	78
Tabel 5.12.	Hasil Perhitungan Shift Share Sektor Pertanian Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010 .....	80
Tabel 5.13.	Hasil Perhitungan Shift Share Sektor Pertambangan dan penggalian Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010 .....	82
Tabel 5.14.	Hasil Perhitungan Shift Share Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010 .....	82
Tabel 5.15	Hasil Perhitungan Shift Share Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010.....	83
Tabel 5.16	Hasil Perhitungan Shift Share Sektor Bangunan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010 .....	84
Tabel 5.17.	Hasil Perhitungan Shift Share Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010.....	85
Tabel 5.18	Hasil Perhitungan Shift Share Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010 .....	86
Tabel 5.19	Hasil Perhitungan Shift Share Sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010 .....	87
Tabel 5.20.	Hasil Perhitungan Shift Share Sektor Jasa-Jasa Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010 .....	88

Tabel 5.21.	Perubahan Sektoral dan Komponen yang mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010.....	89
Tabel 5.22.	Hasil Analisis Shift Share /subsector Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010.....	90
Tabel 5.23.	Subsector Unggulan Berdasarkan Kontribusi, rata-rata pertumbuhan, LQ dan shift Share.....	92
Tabel 5.24.	Jumlah Produksi Listrik Menurut penggunaan tahun 2003 - 2009 .....	96
Tabel 5.25.	Banyaknya pelanggan, KVA dan KWH terpasang .....	96
Tabel 5.26.	perkembangan Banyaknya kendaraan Pengangkut orang, barang .....	98
Tabel 5.27	Luas Lahan dan Produksi lada Propinsi Lampung tahun 2009 .	99
Tabel 5.28	Banyaknya Unit Usaha dan Tenaga Kerja Pada Industri Makanan, Minuman dan tembakau tahun 2009 .....	100
Tabel 5.29	Kesesuaian RPJMD dengan Subsector unggulan.....	102
Tabel 5.30	Alokasi Anggaran berdasarkan Subsector Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 dan 2010.....	106



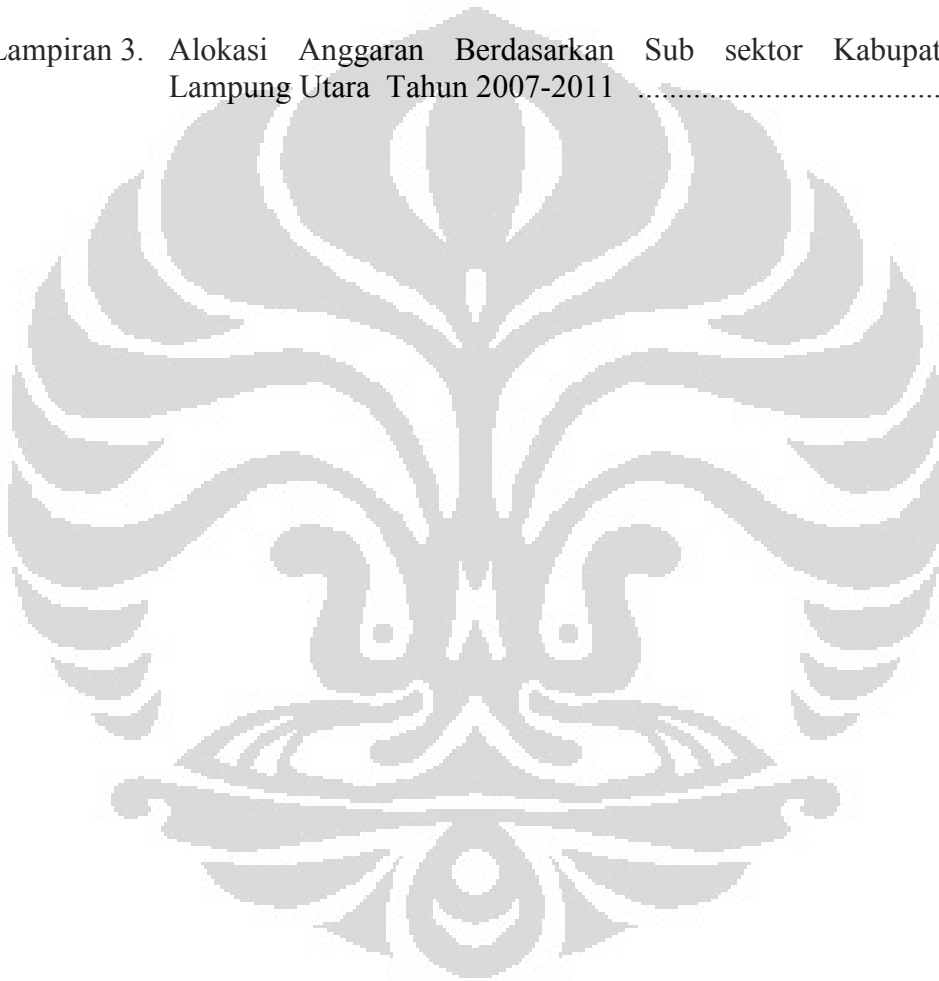
## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Rata-rata Perkembangan PDRB Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010 .....	4
Gambar 1.2. Perkembangan Pertumbuhan Sektor Pertanian Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010 .....	4
Gambar 2.1. Skema Alur Pemikiran .....	33
Gambar 4.1. Rata-rata Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi dalam PDRB Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010.....	49
Gambar 4.2. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Utara dan propinsi Lampung Tahun 2000-2010 .....	51
Gambar 4.3. Rata-rata Perkembangan PDRB Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010.....	51
Gambar 4.4. Grafik produksi Lada di Propinsi Lampung Tahun 2009 .....	56
Gambar 5.8. Grafik Perkembangan Sektor Primer, Sekunder dan Tertier Kabupaten Lampung Utara tahun 2000-2010 .....	109



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. PDRB Propinsi Lampung Tahun 2000-2010 Berdasarkan Harga Konstan tahun 2000 .....	115
Lampiran 2. PDRB Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010 Berdasarkan Harga Konstan tahun 2000 .....	117
Lampiran 3. Alokasi Anggaran Berdasarkan Sub sektor Kabupaten Lampung Utara Tahun 2007-2011 .....	117



# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan struktur sosial, kelembagaan nasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Todaro:2000). Pembangunan pada negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia lebih ditekankan pada pembangunan ekonomi, karena dengan pembangunan ekonomi dapat mendukung pencapaian tujuan atau dapat mendorong perubahan-perubahan bidang kehidupan lainnya.

Perekonomian daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad : 2010:374). Jadi tujuan utama dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada di daerah.

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan perwujudan dari kebijakan pemerintah pusat untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat di daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Kedua undang-undang tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi daerah karena adanya pemberian kewenangan dan pembiayaan (*Desentralisasi fiskal*).

Untuk mencapai tujuan dari pembangunan daerah maka daerah harus mengenal dengan baik potensi yang dimiliki serta memberdayakan berbagai sumber daya tersebut sebagai dasar dalam membangun daerah terutama pembangunan perekonomian daerah yang harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta infrastruktur.

Pembangunan yang di dasarkan pada pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya fisik potensial untuk menciptakan peluang pekerjaan dan menstimulasi aktivitas ekonomi baru berbasis lokal (Blakely:1994) sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali setiap potensi yang ada di wilayahnya.

Pembangunan ekonomi daerah pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakatnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah. Pada umumnya pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang antara lain diukur dengan besaran yang disebut *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB).

Desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah dan masyarakat daerah untuk berkembang secara mandiri sehingga Pemerintah Daerah dituntut kreatif dalam mengembangkan perekonomian. Peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Investasi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat menimbulkan *multiplier effect* terhadap sektor-sektor lainnya terutama yang ditimbulkan oleh sektor sektor yang menjadi basis dan unggulan daerah tersebut. Selain investasi pihak swasta anggaran Pemerintah Daerah merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pembangunan suatu perekonomian daerah. Setiap daerah mempunyai keterbatasan sumberdaya dan sumber pendapatan dalam melaksanakan pembangunan. Dengan demikian perlu pengalokasian anggaran yang tepat untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan.

Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu kabupaten otonomon yang mempunyai keleluasaan (*descretion*) dalam mengembangkan potensi ekonomi dan sumber-sumber keuangan daerah yang dimilikinya. Data potensi perekonomian Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat dari berbagai sektor produksi yang menghasilkan barang dan jasa yang oleh BPS dikelompokkan ke

dalam sembilan lapangan usaha yang merupakan variabel perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selama 10 tahun (2000-2010). potensi perekonomian Kabupaten Lampung Utara masih didominasi oleh sektor pertanian yaitu rata-rata kontribusi sekitar 43 %.

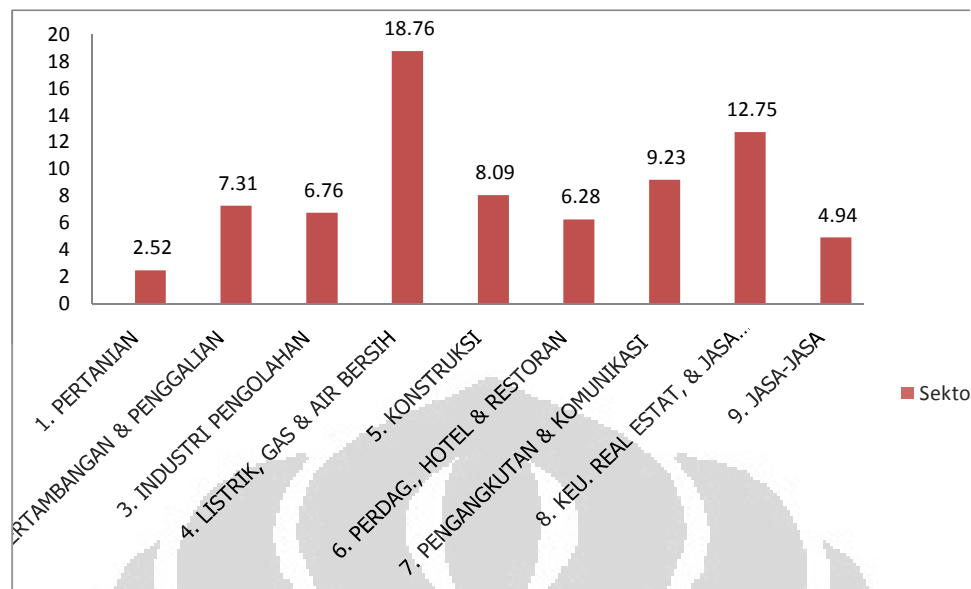
Tabel 1.1 : Distribusi PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010 ( % )

No	Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pertanian	48.41	47.39	45.27	43.33	42.28	40.65	39.88	38.43	37.95	37.83	37.31
2	Pertambangan dan Penggalian	0.69	0.70	0.71	0.73	0.73	0.73	0.87	0.85	0.84	0.84	0.83
3	Industri Pengolahan	12.73	12.81	12.90	12.58	13.11	13.38	14.14	15.06	14.96	14.78	14.67
4	Listrik, gas dan Air bersih	0.26	0.40	0.76	0.81	0.78	0.77	0.72	0.69	0.69	0.68	0.67
5	Konstruksi	3.70	4.07	4.16	4.21	4.30	4.52	4.71	4.69	4.76	4.78	4.83
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	15.70	15.77	16.77	17.04	17.84	17.95	18.21	17.64	17.62	17.41	17.34
7	Pengangkutan dan Komunikasi	4.63	4.80	5.11	5.18	5.21	5.30	5.23	6.15	6.38	6.56	6.66
8	Keuangan, real estat dan Jasa Perusahaan	4.49	4.70	5.06	7.08	6.90	7.52	7.29	7.53	7.52	7.95	8.53
9	Jasa Jasa	9.40	9.35	9.26	9.04	8.85	9.18	8.96	8.95	9.28	9.17	9.15
	Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber; BPS Kabupaten Lampung Utara

Melihat perkembangan kontribusi PDRB Kabupaten Lampung Utara pada tabel 1.1 di atas terlihat potensi utama daerah ini adalah sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan yang mencerminkan kekuatan dan sebagai daya dukung peningkatan ekonomi. perluasan lapangan pekerjaan serta peningkatan produktifitas masyarakat.

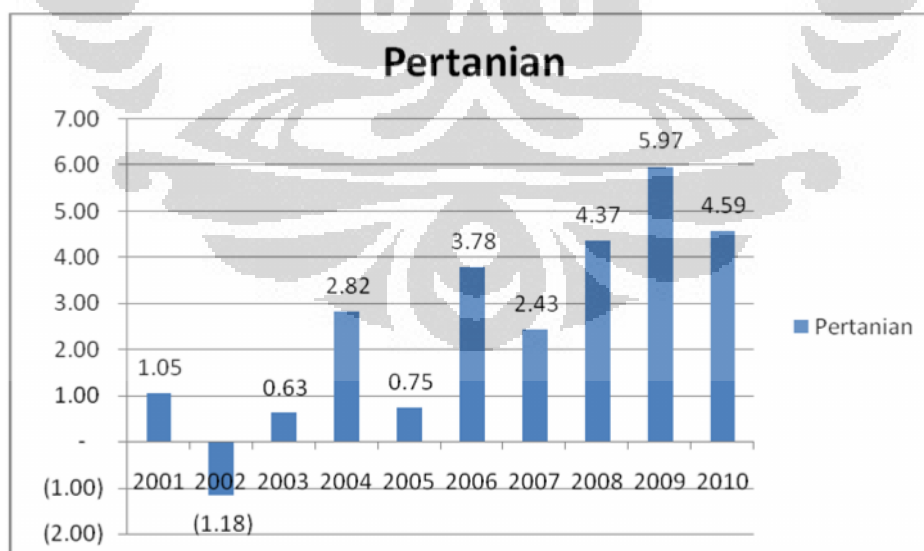
Sedangkan jika dilihat perkembangan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Utara selama periode tahun 2000-2010 terlihat sektor listrik, gas dan air bersih yang paling tinggi yaitu 18,76 % seperti terlihat pada gambar 1.1



Gambar 1.1 : Rata-rata Perkembangan PDRB Kabupaten Lampung Utara Priode Tahun 2000-2010

Sumber : BPS Lampung Utara. ( data di olah )

Untuk sektor pertanian yang memberikan kontribusi yang tinggi akan tetapi rata-rata laju pertumbuhannya paling lambat yaitu hanya 2.52 %. Terlihat pada grafik 1.2 perkembangan pertumbuhan sektor pertanian Kabupaten Lampung Utara selama tahun 2000-2010



Gambar 1.2: Perkembangan Pertumbuhan Sektor Pertanian Kabupaten Lampung Utara Priode Tahun 2000-2010

Berdasarkan data perkembangan pertumbuhan sektor pertanian pada grafik 1.2 di atas mengalami kenaikan dari 1.05 % pada tahun 2001 menjadi 4,59 pada tahun 2010 walaupun mengalami kenaikan tapi secara rata-rata hanya tumbuh 2,52 % yang tentunya di bawah sektor sektor lainnya. Pertumbuhan yang lambat mengidentifikasikan bahwa kinerja sektor tersebut kurang baik.

Tabel 1.2 : Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010-2011 ( jutaan rupiah )

No	Obyek Pendapatan	2010		2011	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	PAD	14.747	2.12	12.065	1.42
	- Pajak daerah	5.778	0.83	6.225	0.73
	- Retribusi Daerah	3.708	0.53	2.445	0.29
	- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.066	0.15	2.032	0.24
	- lain-lain PAD yang sah	4.195	0.60	2.032	0.24
2	Dana Perimbangan	600.617	86.16	672.736	79.01
3	Lain-lain Pendapatan daerah Yang sah	81.691	11.72	166.665	19.57
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>697.055</b>		<b>851.466</b>	

Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan

Sedangkan kondisi keuangan Kabupaten Lampung Utara tahun 2010 sebesar 697 miliar dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 851 miliar yang terdiri dari 3 komponen utama yaitu PAD, dana perimbangan, dan lain lain pendapatan yang sah, kemampuan Pendapatan Asli Daerah hanya sekitar 2.12 persen dari pendapatan daerah tahun 2010 dan turun menjadi 1,42 % pada tahun 2011 sedangkan sumber pendapatan yang paling besar berasal dari dana perimbangan sebesar 86 % pada tahun 2010 dan 79,01 % pada tahun 2011. Keadaan demikian itulah yang mengharuskan pemerintah daerah otonom berupaya menggali potensi perekonomian untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah sendiri, dari sisi keuangan Pemda Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat dari sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tabel 1.3 : Anggaran Belanja Berdasarkan Jenis Belanja Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009-2010 ( jutaan rupiah )

No	Jenis Belanja	2009		2010	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Belanja Pegawai	426.728	64.80	446.760	64.85
2	Belanja Bunga	-	-	1.851	0.27
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	9.145	1.39	64.429	9.35
5	Belanja Bantuan Sosial	2.008	0.30	1.733	0.25
6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	120	0.02	120	0.02
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	11.732	1.78	9.071	1.32
8	Belanja Tidak Terduga	1.500	0.23	2.956	0.43
9	Belanja Barang dan Jasa	66.557	10.11	64.582	9.37
10	Belanja Modal	140.733	21.37	97.436	14.14
	Jumlah	658.523	100.00	688.937	100.00

Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas terlihat bahwa anggaran belanja pegawai masih sangat mendominasi anggaran pengeluaran yaitu mencapai 64,80 % pada tahun 2009 dan meningkat sedikit pada tahun 2010 yaitu sebesar 64,85 % sedangkan untuk belanja barang dan Jasa hanya mencapai 10,11 % pada tahun 2009 dan turun menjadi 9,37 % pada tahun 2010. dan biaya pembangunan berupa belanja modal hanya sebesar 21,37 % pada tahun 2010 kemudian turun menjadi 14,14 % pada tahun 2010. Dari data tersebut terlihat bahwa sebagian besar pendapatan daerah berasal dari dana pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum dan sebagian besar digunakan untuk membayar gaji pegawai daerah.

Dengan melihat seluruh kondisi di atas. maka timbul pertanyaan apakah perubahan kontribusi sektoral yang terjadi didasarkan pada strategi kebijakan pembangunan yang tepat, yaitu strategi yang memberikan dampak optimal bagi pertumbuhan ekonomi karena melakukan pembangunan dengan sumber daya yang terbatas konsumensinya harus difokuskan pada pembangunan sektor-sektor yang memiliki keunggulan dan memberikan dampak pengganda (*Multiplier effect*) yang besar terhadap sektor-sektor lainnya.

Penelitian ini mencoba mendeskripsikan pola perubahan dan pertumbuhan sektoral dalam perekonomian Kabupaten Lampung Utara selama 10 tahun, serta menentukan sektor-sektor unggulan sehingga dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Lampung Utara.

## **1.2 Permasalahan**

Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara mengembangkan potensi ekonomi dengan belanja modal yang terbatas dan secara rinci yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Sektor /sub sektor apa yang menjadi unggulan/prioritas dalam perekonomian Kabupaten Lampung Utara
2. Bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap sektor/sub sektor unggulan

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Kebijakan otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah dan masyarakat daerah untuk berkembang secara mandiri. Potensi ekonomi dan keuangan perlu digali dan diolah sehingga menghasilkan real output yang memiliki nilai tambah. Secara rinci tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengidentifikasi sektor/sub sektor unggulan dalam perekonomian Kabupaten Lampung Utara
2. Untuk mengetahui bagaimana dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara terhadap sektor/sub sektor unggulan melalui program prioritas dalam RPJMD dan alokasi anggaran

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Lampung Utara
2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian terkait dengan perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah



## **BAB 2**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pembangunan Ekonomi Daerah**

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad : 2010), bisa juga pembangunan ekonomi daerah diartikan sebagai suatu proses pembentukan institusi institusi baru, pembangunan industri industri alternative, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, tujuan dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat yang di daerah tersebut sehingga untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama sama mengambil inisiatif untuk melakukan pembangunan daerah dengan mengelola setiap sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Perbedaan kondisi setiap daerah membawa implikasi bahwa pola pembangunan yang akan diterapkan setiap daerah berbeda beda sesuai dengan karakteristik dan ke khasan daerah, karena peniruan pola kebijaksanaan yang diterapkan pada suatu daerah yang berhasil belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainnya. Sehingga kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi, permasalahan, serta potensi yang di miliki daerah yang bersangkutan (Arsyad :2010),

Rahardjo Adisasmita (2005), menyatakan bahwa pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari sumberdaya alam, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, tehnologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

Pertumbuhan regional dapat terjadi akibat penentuan *endogen* atau *eksogen*, yaitu faktor faktor yang terdapat di dalam daerah yang bersangkutan ataupun faktor faktor yang terdapat di luar daerah atau kombinasi keduanya. Penentuan faktor *endogen* meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal sedangkan faktor-faktor *eksogen* adalah tingkat permintaan dari daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut (Glasson :1990). Pertumbuhan ekonomi juga dapat dinilai sebagai dampak kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan (Sirojuzilam: 2008 ).

Teori pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian penting dalam analisis ekonomi regional, karena pertumbuhan merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi regional/daerah yang mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas, dimana sasaran utama analisis pertumbuhan ekonomi regional adalah untuk menjelaskan mengapa suatu daerah dapat tumbuh cepat dan adapula daerah yang tumbuh lambat. Pada teori pertumbuhan ekonomi regional memasukkan unsur lokasi dan wilayah secara eksplisit (Sjafrizal : 2008).

Pada hakekatnya teori teori pembangunan ekonomi daerah membahas tentang metode analisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu. Pengembangan dari metode metode yang menganalisis perekonomian suatu daerah penting sekali kegunaanya untuk mengumpulkan data tentang perekonomian daerah yang bersangkutan serta proses pertumbuhannya yang kemudian dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang ada.

Teori atau model pertumbuhan ekonomi regional bertujuan untuk membahas secara rinci faktor faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, hal ini penting karena pada kenyataannya laju pertumbuhan ekonomi wilayah sangat bervariasi.

Secara garis besar ada beberapa model yang membahas pertumbuhan ekonomi wilayah yaitu :

### 2.1.1 Model Basis Ekspor

Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Douglas C. North pada tahun 1956 yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah ditentukan oleh keuntungan kompetitif (*Competitive advantage*) yang dimiliki oleh daerah atau wilayah yang bersangkutan. Bila daerah yang bersangkutan dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang mempunyai keuntungan kompetitif sebagai basis untuk ekspor, maka pertumbuhan daerah yang bersangkutan akan dapat ditingkatkan, hal ini terjadi karena peningkatan ekspor dapat memberikan dampak berganda (*multiplier Effect*) pada daerah yang bersangkutan (Sjafrizal 2008), pada model ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah yang bersangkutan, pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk kemudian diekspor, sehingga akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja baru (Arsyad 2010)

Sebagaimana dikemukakan oleh Jhon Blaier (1991) dalam Sjafrizal 2008 model basis ekspor ini diformulasikan dengan menggunakan apa yang disebut sebagai formula *income model*, PDRB suatu daerah dapat diungkapkan sebagai berikut :

$$Y = C + MI - MO$$

Dimana Y adalah Pendapatan Regional (PDRB), C adalah konsumsi, MI menunjukkan uang masuk karena adanya ekspor dan MO adalah arus uang keluar karena adanya impor. Model formula ekspor dapat pula diformulasikan dengan model basis ekonomi, dalam hal ini perekonomian suatu daerah (Y) dibagi menjadi 2 kelompok yaitu sektor basis (B) dan sektor non basis (S). Sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan kompetitif (*Competitive Advantage*) yang cukup tinggi, sedangkan sektor non basis adalah sektor yang kurang potensial untuk dikembangkan akan tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis.

### 2.1.2 Model *Interregional Income*

Perluasan dari model ekonomi basis dapat dilakukan dengan memasukkan unsur hubungan ekonomi antar wilayah yang di kenal *dengan interregional Income* yang pertama kali diperkenalkan oleh Harry W Richardson ( 1991) dalam model ini ekspor diasumsikan sebagai faktor yang berada dalam sistem (*Endogeneous variable*) yang ditentukan oleh perkembangan kegiatan perdagangan antar wilayah yang terdiri atas barang konsumsi dan barang modal. Sehingga modelnya seperti teori ekonomi Keynes yang dirumuskan sebagai berikut :

$$Y_i = C_i + I_i + G_i + (X_i - M_i)$$

### 2.1.3 Model Neo Klasik

Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya, sedangkan kegiatan produksi pada suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah (Sjafrizal 2008:95), karena kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah adalah peningkatan kegiatan produksi maka pada model neo klasik ini fungsi produksi di formulasikan sebagai bentuk Cobb-Douglass yaitu :

$$Y = AK^\alpha L^\beta, \quad \alpha + \beta = 1$$

Dimana Y melambangkan PDRB, K dan L masing masing adalah modal dan tenaga kerja. Penganut model neo klasik beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja pada permulaan pembangunan adalah kurang lancar, akibatnya modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga ketimpangan pembangunan regional cenderung melebar (*Divergence*), dengan semakin baiknya prasarana dan fasilitas komunikasi, maka mobilitas modal dan tenaga kerja tersebut akan terus lancar dengan demikian, nantinya setelah negara tersebut maju, maka ketimpangan pembangunan regional akan berkurang (*Convergence*), sesuai dengan hipotesa Neo-klasik maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemajuan teknologi, peningkatan investasi dan peningkatan jumlah tenaga kerja suatu wilayah

berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan, dan pada permulaan proses pembangunan, ketimpangan regional cenderung meningkat, tetapi setelah titik maksimum bila pembangunan terus dilanjutkan, maka ketimpangan daerah akan berkurang dengan sendirinya (Sjafizal 2008 )

#### 2.1.4 Model Penyebab Kumulatif

Gunnar Myrdal dalam sebuah tulisanya, *Economic theory and underdeveloped regions* ( 1975 ), mengungkapkan sebuah konsep yang kemudian dikenal sebagai proses kausasi kumulatif. Menurut Myrdal bahwa dalam proses pembangunan terdapat faktor-faktor yang akan memperburuk perbedaan tingkat pembangunan di berbagai daerah, keadaan tersebut muncul sebagai akibat dari berlangsungnya kausasi kumulatif, sehingga pembangunan di daerah-daerah yang lebih maju akan menyebabkan suatu keadaan yang akan menimbulkan hambatan yang lebih besar pada daerah-daerah yang lebih terbelakang untuk dapat maju dan berkembang. Suatu keadaan yang menghambat pembangunan ini digolongkan sebagai *backwash effect*. Disisi lain perkembangan di daerah-daerah yang lebih maju ternyata juga dapat menimbulkan suatu keadaan yang akan mendorong perkembangan bagi daerah-daerah yang lebih miskin. Suatu keadaan yang akan dapat mendorong pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang lebih miskin dinamakan *spread Effect* (Arsyad 2010)

Richardson (1991) mencoba memformulasikan argumentasi model penyebab kumulatif ini secara sederhana dengan menggunakan persamaan linear, formulasi model dimulai dengan hubungan positif antara peningkatan produktivitas,  $r$ , dengan peningkatan produksi regional ( PDRB ),  $y$ , dengan formula sebagai berikut :

$$r = \alpha + \beta y, \quad \alpha, \beta \text{ adalah konstanta,}$$

hipotesa yang dapat ditarik dari model penyebab kumulatif adalah bahwa terdapat proses pertumbuhan yang berkumulatif sehingga pengurangan ketimpangan regional tidak dapat diserahkan pada pasar, tetapi melalui kebijakan pemerintah yang insentif yang melihat tendensi dari ketimpangan pembangunan antar daerah, kecenderungan ini selanjutnya akan dijadikan dasar untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah serta penanggulangan ketimpangan regional, bila terjadi

tendensi untuk *divergence*, maka kebijakan untuk mendorong pemerataan pembangunan menjadi sangat penting, tapi bila tendensinya bersifat *convergence*, maka kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih penting.

#### 2.1.5 Model daya Tarik

Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan, teori ekonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap para industrialis melalui pemberian subsidi dan insentif.

#### 2.2 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggungjawab. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dapat dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi (*economic entity*) yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain. Pentingnya campur tangan pemerintah terutama pada pembangunan daerah dimaksudkan untuk mencegah akibat-akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil hasilnya dapat dinikmati berbagai daerah yang ada. Keadaan sosial ekonomi yang berbeda dari setiap daerah akan membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula, perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan. (Arsyad 2005)

Berkenaan dengan campur tangan pemerintah untuk mendorong perkembangan daerah-daerah miskin masih ada perbedaan pendapat ada yang setuju dan ada yang menolak, pendapat yang setuju dengan adanya campur tangan pemerintah dalam pembangunan daerah mengemukakan pendapatnya yaitu :

1. Jika perekonomian dikendalikan oleh mekanisme pasar, akan timbul keadaan yang menghambat perkembangan ekonomi di daerah terbelakang

2. Dalam mekanisme pasar, keputusan tentang lokasi kegiatan ekonomi lebih banyak didasarkan pada metode coba-coba, dengan kata lain mekanisme pasar belum tentu dapat menciptakan efisiensi yang optimal dalam menentukan kegiatan ekonomi
3. Campur tangan pemerintah dibutuhkan oleh negara-negara yang baru berkembang, mengingat efisiensi ekonomi masih rendah, sehingga kurang mampu bersaing dengan negara maju.
4. Menghemat pengeluaran pemerintah untuk pembangunan di masa mendatang. Proses pembangunan yang sedang berjalan disuatu daerah sebagai akibat campur tangan pemerintah akan mendorong pembangunan daerah sekitarnya
5. Tujuan pembangunan bukan hanya semata mata bersifat ekonomi, tetapi bersifat social politik. Oleh karena itu jika kegiatan ekonomi hanya berpusat pada satu daerah maka hal tersebut akan membawa masalah yang cukup rumit.

Adapun implikasi dari perencanaan pembangunan daerah antara lain ;

1. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistis memerlukan pemahaman mengenai hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional.
2. Suatu yang baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya
3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan biasanya sangat berbeda antara tingkat daerah dan tingkat pusat. Perencanaan daerah yang efektif harus dapat membedakan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan.

Menurut Blakey (1994), ada enam tahap perencanaan pembangunan ekonomi daerah adalah sebagai berikut :

1. Tahap pengumpulan dan analisis data yang terdiri dari : penentuan basis ekonomi, analisis struktur tenaga kerja, evaluasi kebutuhan tenaga kerja, analisis peluang dan kendala pembangunan, analisis kapasitas kelembagaan
2. Tahap pemilihan strategi yang terdiri dari : penentuan tujuan dan kriteria, penentuan kemungkinan kemungkinan tindakan dan penyusunan strategi
3. Pemilihan proyek proyek pembangunan yang terdiri dari : Identifikasi proyek dan penilaian viabilitas proyek
4. Pembuatan rencana tindakan yang terdiri dari : pra penilaian hasil proyek,

pengembangan input proyek, penentuan alternative sumber pembiayaan dan identifikasi struktur proyek

5. Penentuan rincian proyek meliputi pelaksanaan studi kelayakan bisnis, *bussiness plan*, dan pengembangan, monitoring, serta evaluasi program
6. Persiapan perencanaan secara keseluruhan dan implementasi meliputi penyiapan skedul, penyusunan program pembangunan secara keseluruhan, targetting dan marketing aset-aset masyarakat, serta pemasaran kebutuhan keuangan.

Adapun peran pemerintah dalam proses pembangunan daerah yaitu sebagai *entrepreneur*, koordinator, fasilitator, dan stimulator bagi lahirnya inisiatif inisiatif pembangunan daerah

#### 1. Entrepreneur

Dengan adanya sebagai peran entrepreneur, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menjalankan usaha suatu bisnis usaha, pemerintah daerah dapat mengembangkan suatu usaha sendiri misalnya melalui pembentukan BUMD

#### 2. Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator dalam menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Dalam peranya sebagai coordinator, pemerintah daerah dapat juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-sasaran ekonomi, rencana-rencana, dan strategi strategi. Pendekatan ini sangat potensial dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah dengan nasional dan menjamin bahwa perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat yang maksimum

#### 3. Sebagai fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan di daerahnya melalui adanya perbaikan lingkungan attitudinal di daerahnya. Hal ini akan memepercepat pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah ( zoning ) yang baik

#### 4. Sebagai stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang dapat mempengaruhi perusahaan-



perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut. Stimulasi ini dapat dilakukan dengan pembuatan brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan outlet untuk produk-produk industri kecil, serta membantu industri-industri kecil melakukan pameran

Proses pembangunan bukan hanya ditentukan oleh faktor ekonomi saja, akan tetapi pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses pembangunan. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000). Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada *Gross Domestic Product (GNP)* atau Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu propinsi, kabupaten atau kota. Definisi pembangunan tradisional ini sering dikaitkan dengan sebuah strategi mengubah struktur suatu negara menjadi negara industrialisasi. Kontribusi sektor pertanian mulai digantikan dengan kontribusi industri.

Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan pembangunan ekonomi tradisional. Beberapa ekonom modern mulai mengedepankan *dethronement of GNP* (penurunan tahta pertumbuhan ekonomi), pengentasan garis kemiskinan, pengurangan distribusi pendapatan yang semakin timpang, dan penurunan tingkat pengangguran yang ada. Jelasnya bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang *multidimensional* (Mudrajat, 2003).

Salah satu aspek pembangunan wilayah (regional) adalah pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur. Perubahan struktur ekonomi dapat berupa peralihan dari kegiatan perekonomian ke non pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produksi, serta perubahan status kerja buruh. Karena itu konsep

pembangunan wilayah (regional) sangat tepat bila didukung dengan teori pertumbuhan ekonomi, teori basis ekonomi, pusat pertumbuhan dan teori spesialisasi.

Selanjutnya Todaro (2000) menyatakan bahwa, terdapat beberapa sumber strategis dan dominan yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Salah satu klasifikasinya adalah faktor fisik dan manajemen. Secara spesifik disebutkan terdapat 3 faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi yaitu, akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak angkatan kerja berarti semakin produktif, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Namun ini tergantung pada kemampuan sistem perekonomian untuk menyerap dan mempekerjakan tambahan pekerja itu secara produktif. Faktor utama lainnya adalah kemajuan teknologi.

Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Disini, proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis. Beberapa ahli ekonomi pembangunan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan, dengan rasa aman dan tenteram yang dirasakan masyarakat luas (Lincoln, 2010).

Teori kutub pertumbuhan menyatakan bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang bersamaan. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang merupakan pusat (kutub) pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda (Perroux, 1988 dalam Mudrajat, 2003).

Di sisi lain Hoover (1977), menerangkan bahwa teori pertumbuhan regional berbasis ekspor merupakan beberapa aktivitas disuatu daerah adalah *basic*, dengan kata lain pertumbuhannya menimbulkan serta menentukan pembangunan menyeluruh daerah tersebut. Sedangkan aktivitas-aktivitas lain (*non-basic*) merupakan konsekuensi dari pembangunan menyeluruhnya.

Demikian pula menurut Bendavid-Val (1991), menyatakan bahwa semua pertumbuhan regional ditentukan oleh sektor *basic*, sedangkan

sektor *non-basic* hanyalah yang mencakup aktivitas pendukung, seperti perdagangan, jasa-jasa perseorangan, produksi *input* untuk produk-produk di sektor *basic*, melayani industri-industri di sektor *basic* maupun pekerja-pekerja beserta keluarganya di sektor *basic*.

### 2.3 Teori Basis Ekonomi

Dalam perekonomian regional terdapat kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis. Menurut Glasson (1990) kegiatan-kegiatan Basis (*Basic activities*) adalah kegiatan mengekspor barang-barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau memasarkan barang dan jasa mereka kepada orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis (*Non basic activities*) adalah kegiatan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan ini tidak mengekspor barang jadi, luas lingkup produksi dan daerah pasar yang terutama bersifat lokal. Implisit didalam pembagian kegiatan-kegiatan ini terdapat hubungan sebab akibat yang membentuk teori basis ekonomi.

Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan kedalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa sehingga akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan mengurangi pendapatan suatu daerah dan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa dan akan menurunkan volume kegiatan (Richardson, 2001). Kegiatan basis mempunyai peranan penggerak pertama (*Prime mover role*) dimana setiap perubahan mempunyai *efek multiplier* terhadap perekonomian regional.

Suatu ukuran yang digunakan dalam basis ekonomi adalah tenaga kerja dan nilai tambah bruto (NTB). Namun satuan data tenaga kerja sulit dilakukan karena adanya perbedaan-perbedaan dari definisi tenaga kerja itu sendiri. Sedangkan nilai tambah bruto lebih mudah dari pelaksanaannya karena datanya relatif lebih mudah didapat sampai level wilayah kabupaten.

Formula yang digunakan dalam basis ekonomi pada dasarnya adalah sebagai berikut :

$$T = B + NB$$

$$NB = aT$$

Dimana :

T : kegiatan total

B : sektor basis

NB : sektor non basis

a : % bagian dari non basis

Jika persamaan tersebut disubstitusikan maka akan didapat

$$T = B + aT$$

$$T - aT = B$$

$$T(1-a) = B$$

$$T = \frac{1}{(1-a)} B \quad \text{dan} \quad \frac{1}{(1-a)} = \text{multiplier}$$

Rumus tersebut menyatakan bahwa sektor non basis mendapat bagian dari pendapatan sektor basis yang besarnya tercermin dalam nilai a, nilai ini mengasumsikan tidak adanya kemungkinan dari sektor basis untuk mendapatkan bagian dari sektor non basis, a dalam persamaan di atas menunjukkan peningkatan/ penurunan absolute dalam aktivitas ekonomi lokal (sektor non basis) terhadap aktivitas total. Dari persamaan tersebut dapat diartikan bahwa pembangunan ekonomi dari proses pertumbuhan digerakkan oleh permintaan daerah lain. Menurut Glasson (1990) Pendekatan secara tidak langsung mengenai pemisahan antara kegiatan basis dan kegiatan bukan basis dapat menggunakan salah satu ataupun gabungan dari tiga metode yaitu :

a. Menggunakan asumsi-asumsi atau metode arbeter sederhana

Mengasumsikan bahwa semua industri primer dan manufaktur adalah basis, dan semua industri jasa adalah bukan basis, metode tidak memperhitungkan adanya kenyataan bahwa dalam sesuatu kelompok industri bisa terdapat industri-industri yang menghasilkan barang yang sebagian diekspor atau dijual kepada lokal atau ke duanya.

b. Metode *Location Quotient* (LQ).

Metode *Location Quotient* (LQ) adalah salah satu teknik pengukuran yang paling terkenal dari model basis ekonomi untuk menentukan sektor basis atau non basis (Arsyad, 2010). Metode ini digunakan untuk menghitung kapasitas ekspor suatu perekonomian (wilayah) dan juga untuk mengetahui derajat kemandirian suatu sektor di perekonomian wilayah tersebut. Dalam proses penghitungannya analisis LQ menggunakan perbandingan antara kondisi perekonomian suatu wilayah dengan perekonomian acuan yang meliputi daerah yang lebih besar. Metode ini relatif tidak terlalu sulit, karena prosesnya sederhana dan tidak membutuhkan banyak data, sehingga mudah dilakukan dengan cepat. Satuan dalam penelitian LQ dapat berupa satuan jumlah tenaga kerja, hasil produksi, nilai tambah. Kritik terhadap metode LQ pada umumnya ditujukan pada keakuratan hasil perhitungan yang dihasilkan terutama jika data yang digunakan merupakan data besaran agregat yang cukup besar (Dedi NS setiono: 2011). Dibandingkan dengan metode persyaratan minimum yang menganalisis sektor secara parsial, metode LQ cenderung menggunakan pendekatan yang lebih integral dengan cara membandingkan peran sektor di tingkat sub wilayah dibandingkan dengan peran sektor di tingkat wilayah atau gabungan sub wilayah. Dalam beberapa hal metode ini merupakan pelengkap terhadap metode perhitungan lain yakni metode *shift share*. Pendekatan yang dilakukan melalui analisis LQ pada dasarnya mengacu pada pendekatan basis ekonomi yang melihat ekspor sebagai sumber pendapatan utama sektor basis. Berakaitan dengan itu maka pada tingkat lokal dibutuhkan pengetahuan tentang sektor yang memiliki kemampuan ekspor, sehingga dengan teknik LQ dapat juga digunakan untuk mengetahui jenis-jenis sektor yang memiliki kapasitas ekspor dalam suatu perekonomian lokal tertentu sehingga nilai LQ juga sering digunakan sebagai indikator yang menunjukkan keunggulan komparatif suatu lokasi. Konsep teori basis ekonomi berpandangan bahwa pendapatan dari ekspor merupakan faktor penggerak utama bagi kegiatan suatu perekonomian lokal. Oleh karena itu kinerja perekonomian sangat tergantung pada faktor

eksternal khususnya permintaan dari luar wilayah.

Hubungan antara produk total ekonomi dengan produk sektor ekspor dan sektor non ekspor dinyatakan secara aljabar

$$Y = X + Y_n$$

Dimana :

Y : Total produk Ekonomi Lokal

X : produk sektor ekspor

$Y_n$  : Produk sektor non Ekspor

Jika produk sektor non ekspor dinyatakan sebagai fungsi linear dari produk sektor ekspor maka:

$$Y_n = g X$$

$$Y = X + Y_n = (1+g) \cdot X = mX$$

Dengan demikian, maka  $(1+g)$  merupakan faktor pengganda

*Location Quotient* adalah rasio dari peranan sektor lokal tertentu terhadap sektor yang sama di tingkat ekonomi acuan yang lebih luas. Tingkat acuan ekonomi yang digunakan dalam hal ini adalah berupa perekonomian propinsi sehingga bentuk aljabar hubungan tersebut dinyatakan

$$LQ_i = (E_{ij}/E_l) / (E_{ir}/E_r)$$

Dengan :

$LQ_i$  : *Location Quotient* sektor i perekonomian lokal

$E_{il}$  : Produk / lapangan kerja di sektor i dalam perekonomian lokal

$E_l$  : Total produk atau lapangan kerja dalam perekonomian lokal

$E_{ir}$  : Produk /lapangan kerja di sektor i perekonomian propinsi

$E_r$  : Total Produk /lapangan kerja di perekonomian propinsi

Jika nilai  $LQ$  untuk suatu sektor di perekonomian lokal lebih besar dari satu, maka dapat dianggap bahwa produksi lokal pada sektor yang bersangkutan relatif lebih tinggi dari pada produksi rata-rata wilayah acuan. Oleh sebab itu wilayah tersebut memiliki potensi untuk mengekspor produk sektor yang bersangkutan. Dengan asumsi bahwa wilayah melakukan ekspor pada nilai  $LQ$  lebih dari satu, maka kegiatan pekerjaan yang dilakukan ekspor

dapat dihitung sebagai berikut :

$$EirX = (LQi - 1) \times Eil \text{ atau}$$

$$EirX = \{(1 - 1/LQi)\} \times Eir \text{ dengan syarat } LQi > 1$$

Eir X : Jumlah produk yang dapat di ekspor atau tenaga kerja sektor i yang dapat memproduksi barang ekspor

### **Faktor Pengganda pada metode LQ**

Analisis pengganda dapat diperlukan untuk mengetahui dampak yang di timbulkan oleh adanya input sektor basis. Dalam hal ini sektor basis adalah sektor yang berpotensi melakukan ekspor, atau memiliki nilai LQ lebih besar dari satu. Faktor pengganda ekonomi dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

1. menghitung tenaga kerja sektoral lokal yang memproduksi ekspor untuk seluruh sektor yang nilai LQnya lebih dai 1
2. menjumlahkan seluruh tenaga kerja yang menghasilkan ekspor = A
3. Nilai pengganda di hitung dari jumlah total tenaga kerja di wilayah yang bersangkutan di bagi dengan jumlah total tenaga kerja yang di ekspor

Sehingga nilai pengganda dapat dipereoleh dengan formula

$$EirX = \{Eil/EI - Eir/Er\} \times EI$$

Berdasarkan formula di atas maka nilai komponen pertama di dalam kurung (Eil/Er) dapat dianggap mewakili peranan wilayah lokal dalam produksi sektoral terhadap produksi sektoral wilayah acuan sedangkan komponen kedua (EI/Er) menunjukkan peranan wilayah dalam seluruh konsumsi atau permintaan wilayah acuan. Jika nilai total dalam kurung positif, maka wilayah memproduksi porsi yang lebih besar daripada konsumsinya atau  $Eil/Eir > EI/Er$ . Dan kelebihan produksi tersebut di asumsikan di ekspor ke luar wilayah.

Agar konsep di atas dapat diterima maka dibutuhkan beberapa asumsi dasar sebagai berikut :

1. produktivitas tenaga kerja pada industri yang ditinjau dianggap sama di seluruh di seluruh wilayah acuan

2. Tingkat konsumsi per kapita pekerja di industri yang di tinjau di anggap sama baik di tingkat local maupun di wilayah acuan
3. produk industri yang ditinjau sama dengan produk sejenis yang dihasilkan di tempat lain dalam wilayah acuan
4. tidak ada ekspor bersih dalam artian ekspor dikurangi impor dari industri di wilayah acuan.

c. Metode Kebutuhan Minimum (*minimum requirements*)

Metode ketiga, yakni kebutuhan minimum (*minimum requirements*) adalah modifikasi dari metode LQ dengan menggunakan distribusi minimum dari *employment* yang diperlukan untuk menopang industri regional dan bukannya distribusi rata-rata. Untuk setiap daerah yang pertama dihitung adalah persentase angkatan kerja regional yang dipekerjakan dalam setiap industri. Kemudian persentase itu diperbandingkan dengan perhitungan hal-hal yang bersifat kelainan dan persentase terkecil dipergunakan sebagai ukuran kebutuhan minimum bagi industri tertentu. Persentase minimum ini dipergunakan sebagai batas dan semua *employment* di daerah-daerah lain yang lebih tinggi dari persentase dipandang sebagai *employment* basis. Proses ini dapat diulangi untuk setiap industri di daerah bersangkutan untuk memperoleh *employment* basis total. Dibandingkan dengan metode LQ, metode ini malahan lebih bersifat arbiter karena sangat tergantung pada pemilihan persentase minimum dan tingkat disagregasi- disagregasi yang terlalu terperinci malahan dapat mengakibatkan hampir semua sektor menjadi kegiatan basis atau ekspor.

Teori basis ini mempunyai kebaikan mudah diterapkan, sederhana dan dapat menjelaskan struktur perekonomian suatu daerah dan dampak umum dari perubahan- perubahan jangka pendek. Keterbatasan teori ini tidak terlalu ketat dan dapat menjadi landasan yang sangat bermanfaat bagi peramalan jangka pendek



## 2.4 Analisis Shift Share

Analisis ini merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktural ekonomi daerah dibandingkan dengan struktur ekonomi di atasnya. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja ekonomi daerah dengan membandingkan terhadap daerah yang lebih luas (lincolin Arsyad, 2010)

Ada berbagai cara yang digunakan dalam melakukan teknik tersebut :

1. *Nasional share* / pertumbuhan ekonomi, adalah banyaknya pertambahan nilai tambah regional seandainya pertumbuhannya sama dengan laju pertumbuhan nasional selama priode tertentu. Penyimpangan dari *nasional share* dalam pertumbuhan *employment regional* di sebut shift. Penyimpangan ini adalah positif di daerah daerah yang relatif merosot. Dan bagi setiap daerah daerah, shift netto dapat dibagi menjadi 2 komponen yaitu *proportional shift* dan *differential shift*.
2. *Proportional Shift*/ komponen struktur atau *industrial mix* ( $S_p$ ), mengukur besarnya perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang menjadi acuan. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan acuan
3. *Diffrential shift* / komponen lokasional/ regional ( $S_d$ ), metode ini membantu kita dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah lokal dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh karena itu jika pergeseran diferensial dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya saingnya daripada industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan. Suatu daerah yang mempunyai keuntungan-keuntungan lokasional, seperti sumber daya yang baik, akan mempunyai *differential shift* yang positif sedangkan daerah yang secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai *differential shift* yang negatif

Menurut Glasson (1990) dua komponen shift ( $S_p$ , dan  $S_d$ ) ini memisahkan unsur-unsur pembentukan regional yang bersifat ekstern yang bersifat intern “*proportional shift*” merupakan akibat dari pengaruh unsur-unsur luar yang bekerja secara nasional sedangkan *differential shift* “ adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja di dalam daerah yang bersangkutan.

Terdapat banyak perumusan mengenai *shift share*. Dalam ini yang dipergunakan untuk menganalisis *shift share* adalah :

$$G = R + S$$

Di mana:

G	=	Pertumbuhan Regional
R	=	National share
S	=	shift

Bila nilai  $S_d$  maupun  $S_p$  positif, menunjukkan bahwa keadaan struktur perekonomian di daerah tersebut sudah baik. Jika negatif mungkin keadaan perekonomian di daerah tersebut masih dapat diperbaiki dengan membandingkan dengan struktur perekonomian nasional.

Keunggulan metode *shift share* :

1. sederhana dan mudah diperoleh datanya dan analisis yang diberikan cukup luas.
2. menggambarkan perubahan kontribusi nasional/ propinsi dengan pertumbuhan / kinerja daerah melalui dampak intra daerah
3. analisis *shift share* belum pernah diragukan keakuratannya.

Analisis tersebut dapat digunakan untuk melakukan analisis perkembangan daerah, analisis deskretif daerah, penyusunan proyeksi dan bahkan sebagai alat pembuat kebijakan.

Kelemahan metode *shift share* :

1. Hasil perhitungan sangat sensitive terhadap penggunaan klasifikasi sektoral akibatnya makin banyak sektor yang digunakan, maka cenderung  $S_p$  meningkat dan  $S_d$  turun bahkan mendekati nol
2. *Differential shift* ( $s_d$ ) sering kali tidak stabil, sehingga tidak dapat digunakan untuk tujuan peramalan ke depan

3. *Proportional shift under estimate*, sebagai pengaruh struktur proyeksi terhadap sektor lainnya melalui pengaruh *multiplier sektor non basis*
4. Analisis *shift share* tidak dapat menjelaskan mengapa suatu daerah mempunyai *locational advantage*

## 2.5 Sektor Unggulan

Mengenal lebih mendalam potensi yang dimiliki serta peluang pengembangannya adalah suatu yang sangat mendasar dalam proses perencanaan pembangunan. Khususnya untuk perencanaan dalam konteks lokal. Sebab tanpa pengetahuan tentang hal tersebut, maka perencanaan pembangunan daerah berjalan tanpa ada prioritas. Implikasinya kemudian adalah pembangunan daerah berjalan secara stagnan. Oleh karena itu, maka penting sektor mana yang menjadi prioritas dan berpeluang untuk dikembangkan sebagai basis ekonomi.

Sektor Unggulan merupakan derivasi dari sebuah postulat yang dikembangkan dalam kajian perdagangan internasional, di mana suatu negara harus memiliki sebuah keunggulan. Selanjutnya kata keunggulan tersebut mewarnai wacana perdagangan dalam negeri, dan implikasinya di masing masing negara yang masuk dalam perdagangan internasional mengembangkan ekonominya berdasarkan keunggulan komparatif yang dimiliki.

Postulat dari *comparative advantage* adalah bahwa jika sebuah bangsa ingin mendapatkan keuntungan atau manfaat dalam perdagangan internasional, maka perlu adanya keunggulan *comparative absolute* yang dimiliki suatu bangsa atau negara (Dominick Salvatore, 1996). Implikasinya adalah suatu bangsa diharapkan tidak terlalu berambisi mengembangkan komoditas secara menyeluruh yang justru tidak memberikan keunggulan *comparative* jika diperdagangkan, baik secara nasional maupun secara internasional.

Jika pengertian tersebut ditarik dalam konteks pembangunan regional, maka suatu daerah yang ingin mendapatkan keuntungan atau manfaat dalam interaksinya dengan region atau daerah lain, maka daerah tersebut harus mengembangkan salah satu sektor yang mempunyai keunggulan (*comparative*

advantage). Keunggulan *comparative* tersebut selanjutnya dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai konskuensi dan peningkatan kinerja Perekonomian Daerah

## 2.6 Teori Perubahan Struktural

Teori perubahan struktural menurut Todaro menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh negara sedang berkembang, semula lebih bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern, yang didominasi oleh sektor industri dan jasa (Kuncoro,2003). Pada dasarnya teori tentang perubahan struktural ini menjelaskan fenomena terjadinya perubahan struktur di negara sedang berkembang yang didominasi kegiatan perekonomian pedesaan menuju kepada perekonomian yang berorientasi perkotaan dalam bentuk industri maupun jasa. Perubahan struktur perekonomian yang semula mengandalkan sektor pertanian kemudian beralih ke sektor industri maupun jasa, akan dapat mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat, atau tingkat pendapatan antar sektor perekonomian. Secara umum transformasi struktural ditandai dengan peralihan dan pergeseran kegiatan perekonomian dari sektor primer (pertanian) menuju sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa). Kegiatan produksi barang dan jasa yang sering disebut lapangan usaha dalam penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat regional atau daerah, dikelompokkan ke dalam sembilan sektor yaitu (1) sektor pertanian; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas dan air bersih; (5) bangunan; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, real estat dan jasa perusahaan, serta (9) jasa-jasa.

## 2.7 Pendapatan Daerah Regional Bruto ( PDRB )

PDRB merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat percepatan perekonomian suatu daerah, karena PDRB adalah produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu wilayah dengan dukungan faktor-faktor produksi dalam wilayah tersebut. Menurut SNA (*System of National Accounts*) yang diterbitkan oleh *United Nation*, secara makro perekonomian suatu wilayah,

menurut lapangan usaha terdiri dari tiga sektor utama yaitu sektor primer, sekunder dan tertier. Lebih rinci lagi ketiga sektor tersebut dibagi menjadi Sembilan sektor yaitu terdiri dari :

### 2.7.1 Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

Sektor pertanian mencakup segala perusahaan dan pemanfaatan makhluk biologis untuk memenuhi kebutuhan hidup atau sebagai bahan baku dalam proses produksi. Kegiatan pertanian pada umumnya meliputi usaha cocok tanam, pemeliharaan ternak, penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut, penebangan kayu dan pengambilan hasil hutan serta perburuan binatang liar serta kegiatan jasa pertanian. Sektor pertanian meliputi beberapa subsector yaitu tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil hasilnya, kehutanan dan perikanan.

#### 1. Sub sektor Tanaman Bahan Makanan

Sub sektor ini meliputi kegiatan penanaman, pembibitan, pemeliharaan dan pemungutan hasil hasil pertanian tanaman bahan makanan. Jenis komoditas yang dihasilkan antara lain : Padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, buah-buahan dan sayur sayuran serta tanaman hias

#### 2. Sub sektor Tanaman Perkebunan

Subsektor perkebunan meliputi kegiatan perusahaan tanaman perkebunan komoditas yang dihasilkan meliputi cengkeh, jahe, kakao, karet, kapuk, kayu manis, kelapa, kelapa sawit, kemiri, kopi, lada, pala, panili, tebu, tembakau serta tanaman perkebunan lainnya

#### 3. Sub sektor Kehutanan

Subsektor ini meliputi usaha di areal hutan berupa penebangan kayu, pengambilan getah, daun, akar dan kulit kayu, bambu, rotan, arang dan perburuan binatang hutan. Termasuk juga kayu dan bambu yang berasal dari area non hutan, seperti yang ditanam petani di kebun atau di pekarangan rumah

#### 4. Perikanan

Subsektor ini meliputi segala perusahaan perikanan yang mencakup usaha penangkapan, pengambilan, maupun pemeliharaan segala jenis ikan dan biota

air lain baik yang diusahakan diperairan laut, maupun air tawar. Komoditas hasil perikanan antara lain ikan mas, dan jenis darat lainnya, ikan bandeng, udang, cumi cumi dan binatang lunak lainnya. Termasuk pengolahan sederhana seperti pengasinan atau pengeringan ikan yang dilakukan nelayan atau rumah tangga

#### 2.7.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor ini meliputi usaha penggalian, pengeboran, pencucian, pengambilan dan pemanfaatan segala macam barang tambang, mineral dan barang galian yang tersedia di dalam tanah, baik yang berupa benda padat, benda cair maupun gas. Dan yang ada di Kabupaten Lampung Utara hanya ada sub sektor penggalian saja seperti penggalain batu batuan, pasir, tanah liat, krikil dan lain lain

#### 2.7.3 Industri Pengolahan

Sektor ini meliputi usaha kegiatan pengolahan bahan organik ataupun anorganik menjadi produk baru yang lebih tinggi mutunya. Baik dilakukan dengan tangan, mesin atau proses kimiawi. Pengelompokan industri oleh Badan Pusat Statistik didasarkan dari banyaknya tenaga kerja yang digunakan, sehingga industri dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

- a. Industri besar/średang, yaitu perusahaan industri yang menggunakan tenaga kerja lebih besar atau mencapai 20 orang atau lebih
- b. Industri kecil, yaitu perusahaan industri yang menggunakan tenaga kerja 5 orang sampai 19 orang
- c. Industri kerajinan rumah tangga yaitu perusahaan industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 5 orang

#### 2.7.4 Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Kegiatan Sektor ini hanya terbatas pada kegiatan listrik, air bersih karena sampai saat ini produksi gas belum ada di daerah Kabupaten Lampung Utara

##### 1. Sub sektor Listrik

Sub sektor ini meliputi pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian jaringan distribusi guna penyaluran listrik, untuk dijual kepada konsumen, baik oleh

PLN maupun bukan PLN, termasuk juga listrik yang dibangkitkan oleh sektor lain, seperti industri, jasa jasa yang dijual kepada pihak lain dan datanya dapat dipisahkan

## 2. Sub sektor Air Bersih

Sub sektor air bersih meliputi usaha penampungan dan penjernihan air bersih serta pendistribusianya kepada konsumen, yaitu umumnya dilakukan oleh PDAM

### 2.7.5 Sektor Kontruksi

Sektor ini meliputi usaha pembangunan/pembuatan, perluasan, pemasangan, perbaikan berat dan ringan serta perombakan dari suatu bangunan atau kontruksi lain. Adapun bangunan yang dimaksud dapat berupa: bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, jalan, jembatan, bendungan, jaringan listrik, telekomunikasi dan kontruksi lainnya. Termasuk juga kegiatan sub sektor kontruksi seperti pemasangan instalasi listrik, saluran telepon, alat pendingin, pembuatan saluran air dan sebagainya. Dalam hal ini tercakup juga pembuatan dan perbaikan bangunan tempat tinggal yang dilakukan sendiri oleh rumah tangga, swasta dan badan badan pemerintah

### 2.7.6 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor ini termasuk sektor *tertier* yang terdiri dari 3 sub sektor yaitu :

#### 1. Subsektor Perdagangan

Kegiatan perdagangan terdiri dari perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar meliputi kegiatan pembelian dan penjualan kembali barang baik yang baru maupun yang bekas oleh pedagang dari pihak produsen atau importer kepada pedagang lain, perusahaan, lembaga atau konsumen tanpa merubah bentuk, dalam partai besar. Perdagangan eceran meliputi kegiatan pembelian dan penjualan kembali barang, umumnya melayani konsumen perorangan ataupun rumah tangga tanpa merubah bentuk, baik barang baru ataupun bekas secara eceran

#### 2. Subsektor Hotel

Subsektor ini meliputi usaha penyediaan penginapan dan berbagai akomodasi lainnya seperti hotel, motel, losmen dan sebagainya baik yang tersedia untuk

umum ataupun hanya untuk anggota suatu organisasi tertentu atas dasar suatu pembayaran, termasuk kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta fasilitas lainnya yang berada dalam suatu satuan usaha dengan penginapan tersebut dan datanya sulit untuk dipisahkan

### 3. Subsektor Restoran

Subsektor ini meliputi usaha restoran/rumah makan, *catering*, restoran di kereta api, cafeteria dan kantin. Termasuk usaha penjualan makanan dan minuman jadi yang biasanya dimakan langsung di tempat penjualan seperti warung nasi, warung kopi, warung sate dan sejenisnya

## 2.7.7 Sektor Transportasi dan Komunikasi

### 1. Transportasi

Kegiatan subsektor ini meliputi kegiatan jasa angkutan barang dan penumpang dengan menggunakan alat angkutan baik yang bermotor maupun tidak bermotor atas dasar suatu pembayaran. Termasuk jasa angkutan yang sifatnya menunjang dan membantu memperlancar kegiatan tersebut beserta penyediaan fasilitas fasilitasnya. Kegiatan pengangkutan ini dalam penghitungan PDRB Lampung Utara hanya terbatas pada pengangkutan rel dan pengangkutan jalan raya baik bermotor ataupun tidak bermotor seperti : truck, bus, oplet, taksi, becak, pedati atau ojek

### 2. Komunikasi

Sub sektor ini meliputi kegiatan jasa komunikasi untuk umum yang dilakukan oleh PT Pos dan PT Telkom. Kegiatan PT pos yaitu pemberian jasa kepada pihak lain seperti pengiriman surat, paket dan wesel

## 2.7.8 Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Sektor ini terdiri dari sub sektor bank yang meliputi pemberian jasa pelayanan di bidang keuangan kepada pihak lain, seperti menerima simpanan dalam bentuk giro dan tabungan, memberi pinjaman, sub sektor keuangan tanpa bank yang meliputi kegiatan pelayanan asuransi, koperasi simpan pinjam, pegadaian, dana pensiun, pasar modal, penukaran mata uang asing serta sub sektor sewa bangunan yang meliputi semua jasa yang berhubungan dengan proses



penggunaan rumah / bangunan sebagai tempat tinggal oleh rumah tangga, tanpa memperhatikan apakah rumah tersebut benar benar disewa atau tidak seperti rumah milik sendiri, rumah instansi pemerintah ataupun rumah instansi/perusahaan atau swasta, sub sektor lainnya yaitu sub sektor jasa perusahaan yang meliputi kegiatan pemberian jasa pada pihak lain seperti jasa hukum, jasa akuntan dan pembukuan, jasa pengolahan dan penyajian data, jasa bangunan, arsitek dan teknik, jasa priklanan dan jasa persewaan mesin dan peralatan.

#### 2.7.9 Sektor Jasa Jasa

Terdiri dari :

##### 1. Subsektor Jasa Pemerintahan Umum

Kegiatan kegiatan yang termasuk dalam sub sektor ini adalah penyediaan jasa pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat dinilai secara ekonomi, misalnya mengatur Negara. Kegiatan pemerintahan tersebut meliputi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dan pemerintahan desa serta unit unitnya. Kegiatan pemerintahan sebagian besar hasilnya digunakan oleh pemerintah sendiri sebagai konsumen akhir. Kegiatan Jasa pemerintahan lainnya meliputi kegiatan jasa pelayanan pemerintah di bidang kependidikan, kesehatan, hiburan, dan rekreasi, unit kegiatan pemerintah ini antara lain sekolah, rumah sakit, museum, perpustakaan dan tempat rekreasi yang dimiliki dan dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah tidak memungut biaya atau pembayaran yang sesuai dengan besarnya biaya pengelolaan. Kegiatan pegawai pemerintah yang bekerja di bidang penyuluhan KB dan penyuluhan masyarakat terasing di kategorikan sebagai kegiatan jasa sosial kemasyarakatan lainnya.

##### 2. Sub sektor Jasa Swasta

Sektor ini meliputi tiga sub sektor yaitu sosial kemasyarakatan yang meliputi kegiatan penyelenggaraan jasa sosial dan kemasyarakatan yang diusahakan oleh swasta seperti : jasa pendidikan, jasa kesehatan, serta kemasyarakatan lainnya. Sub sektor kedua adalah sub sektor jasa hiburan dan rekreasi yang meliputi usaha penyediaan berbagai jenis hiburan/rekreasi untuk masyarakat baik perorangan maupun rumah tangga yang berorientasi mencari keuntungan

dan sub sektor yang ketiga adalah sub sektor jasa perorangan dan rumah tangga yang meliputi kegiatan penyelenggaraan jasa yang diberikan untuk perorangan dan rumah tangga seperti reparasi, tukang jahit, tukang cukur, pembantu rumah tangga dan lainnya.

## 2.8 Pengembangan Sektor Unggulan Sebagai strategi pembangunan daerah

Menurut Arsyad (2010) permasalahan pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang di dasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan ekonomi.

Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, ketimpangan ekonomi regional di Indonesia disebabkan karena pemerintah pusat menguasai dan mengendalikan hampir sebagian besar pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai penerimaan negara, termasuk pendapatan dari hasil sumber daya alam dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan/kelautan. Akibatnya daerah-daerah yang kaya sumber daya alam tidak dapat menikmati hasilnya secara layak. Perbedaan tingkat pembangunan yang di dasarkan atas potensi suatu daerah, berdampak terjadinya perbedaan sektoral dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara hipotesis dapat dirumuskan bahwa semakin besar peranan potensi sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDRB di suatu daerah, maka semakin tinggi laju pertumbuhan PDRB daerah tersebut.

Berdasarkan pengalaman negara-negara maju, pertumbuhan yang cepat dalam sejarah pembangunan suatu bangsa biasanya berawal dari pengembangan beberapa sektor primer. Pertumbuhan cepat tersebut menciptakan efek bola salju (*snow ball effect*) terhadap sektor-sektor lainnya, khususnya sektor sekunder.

Pembangunan ekonomi dengan mengacu pada sektor unggulan selain berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh pada perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Pengertian

sektor unggulan pada dasarnya dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, regional maupun nasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik.

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, di mana daerah memiliki kesempatan dan kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat.

Menurut Rachbini (2001) ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yakni (1) sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut; (2) karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas; (3) harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah; (4) sektor tersebut harus berkembang, sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

Data PDRB merupakan informasi yang sangat penting untuk mengetahui *output* pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu (provinsi/kabupaten/kota). Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukannya sektor unggulan (*leading sector*) di suatu daerah/wilayah. Sektor unggulan adalah satu grup sektor/subsektor yang mampu mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan di suatu daerah terutama melalui produksi, ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga identifikasi sektor unggulan sangat penting terutama dalam rangka menentukan prioritas dan perencanaan pembangunan ekonomi di daerah.

Manfaat mengetahui sektor unggulan, yaitu mampu memberikan indikasi bagi perekonomian secara nasional dan regional. Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

## 2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai sektor basis dan sektor unggulan telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Sebagian besar analisis yang digunakan sebagian besar adalah analisis LQ dan shift share. Adapula peneliti di samping menggunakan analisis LQ dan shift share juga menggunakan analisis tipologi kelas. Secara lengkap penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 : Penelitian Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Alat Analisis	Judul dan hasil penelitian
1	Nudiatulhuda	- Analisis LQ - Analisis Shift Share - Analisis Tipology Klassen - Model Rasio pertumbuhan	Judul : analisis potensi ekonomi kabupaten dan kota di propinsi sulawesi tengah  hasil penelitian : Sektor pertanian masih merupakan sektor basis bagi bagi Sulawesi selatan dan tidak satupun kab/kota yang masuk criteria pertama dengan notasi overlay ketiga komponen positif ( +++ ) dan dengan analisis Shift share tidak terdapat sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif disemua kab/kota
1	Fachrulrazy ( 2009 )	- Tipology kelas - Analisis LQ - Analisis Shift share	Judul: Analisis penentuan Sektor Unggulan Perekonomian dengan pendekatan Sektor pembentuk PDRB Hasil : Hasil tipology menunjukkan sektor

Sambungan Tabel. 2.1

			yang maju dan tumbuh dengan pesat yaitu sektor pertanian dan sektor pengangkutan dan komunikasi, hasil LQ menunjukkan sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industry, sektor pengangkutan dan komunikasi yang merupakan sektor basis, dan berdasarkan hasil analisis persektor yang menjadi sektor unggulan kab. Aceh Utara dengan criteria sektor maju dan tumbuh dengan pesat, sektor basis dan mempunyai kompetitif adalah sektor pertanian
3	Anilda Katili ( 2003 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis struktur ekonomi</li> <li>- Analisis pertumbuhan ekonomi</li> <li>- Analisis LQ</li> <li>- Analisis Shift Share</li> <li>- Analisis Multiplier</li> </ul>	<p>Judul : Identifikasi sektor sektor unggulan di kota Gorontalo suatu Analisis Ekonomi Regional</p> <p>Hasil : Struktur ekonomi gorontalo didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran ( 31,12 % ) dan Jasa jasa, pertumbuhan ekonomi Rata-rata 6,02 %, multiplier sektor basis kota gorontalo berkisar antara 1,10 – 1,2 Dan hasil penggabungan analisis Kontribusi, rata-rata pertumbuhan , LQ dan Shift share diperoleh sektor unggulan di kota gorontalo adalah sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor perdagangan hotel dan restoran</p>
4	Perdinan Sukantendel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Input Output</li> <li>- Analisis Kewilayahan</li> <li>- Analisis Kelembagaan Alokasi Anggaran</li> </ul>	<p>Judul : Analisis keterkaitan Alokasi Anggaran dan Sektor Unggulan dalam mengoptimalkan Kinerja pembangunan Daerah di Kab.Bogor</p> <p>Hasil : Sektor Unggulan di kab. Bogor adalah industri Pengolahan dan perdagangan lokasinya memusat di wilayah utara bogor bagian tengah dan bagian timur, sedangkan sektor unggulan tanaman bahan makanan sebagian besar berada di bogor bagan barat, Untuk dukungan anggaran pembangunan untuk sektor unggulan masih sangat kurang kecuali untuk sektor bangunan</p>

### 2.10 Kerangka Pemikiran

Analisis tentang faktor penentu pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan sebagai dasar utama untuk perumusan kebijakan pembangunan

ekonomi daerah di masa mendatang. Dengan diketahuinya faktor-faktor tersebut, maka pembangunan daerah dapat diarahkan ke sektor-sektor yang secara potensial dapat mendorong percepatan pembangunan daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja makro kegiatan ekonomi di suatu wilayah. PDRB suatu wilayah menggambarkan struktur ekonomi daerah, peranan sektor-sektor ekonomi dan pergeserannya, serta menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi, baik secara total maupun per sektor.

Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan merupakan salah satu indikator penting untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu strategi pembangunan diupayakan untuk menggali potensi yang ada, agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Berdasarkan data dan informasi yang terkandung dalam PDRB, maka dapat dilakukan beberapa analisis untuk memperoleh informasi tentang:

#### 1. Sektor Basis dan Non basis

Kegiatan ekonomi wilayah berdasarkan teori ekonomi basis diklasifikasikan ke dalam dua sektor, yaitu sektor basis dan non basis. Analisis ini diperlukan untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi daerah yang bersifat ekspor dan non ekspor dan mengetahui laju pertumbuhan sektor basis dari tahun ke tahun. Pertumbuhan beberapa sektor basis akan menentukan pembangunan daerah secara keseluruhan, sementara sektor non basis hanya merupakan konsekuensi-konsekuensi dari pembangunan daerah. Barang dan jasa dari sektor basis yang di ekspor akan menghasilkan pendapatan bagi daerah, serta meningkatkan konsumsi dan investasi. Peningkatan pendapatan tidak hanya menyebabkan kenaikan permintaan terhadap sektor basis, tetapi juga akan meningkatkan permintaan terhadap sektor non basis yang berarti juga mendorong kenaikan investasi sektor non basis.

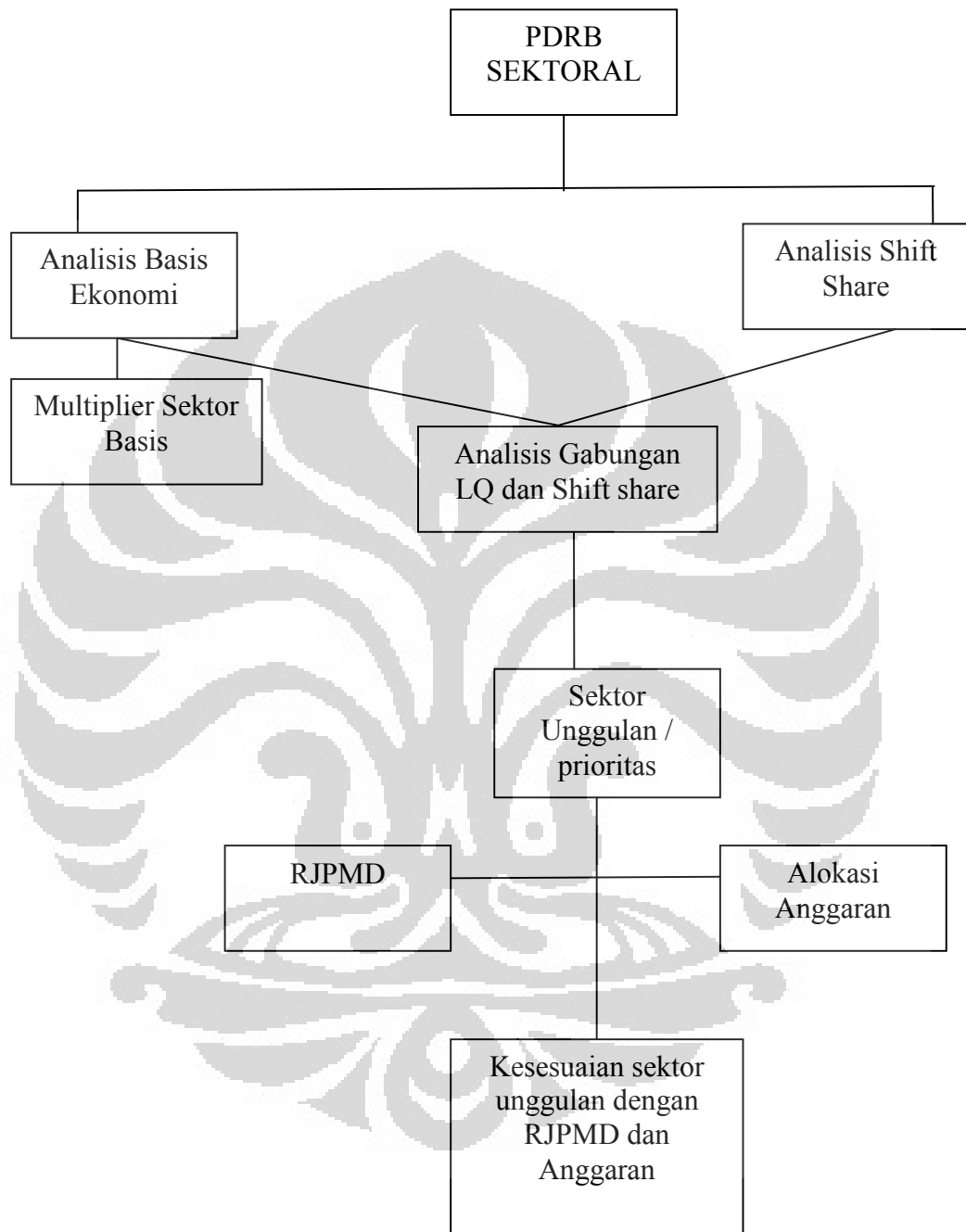
#### 2. Perubahan dan Pergeseran Sektor

Analisis ini dibutuhkan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor pada perekonomian suatu daerah. Hasil analisis akan menggambarkan kinerja

sektor- sektor dalam PDRB suatu daerah dibandingkan wilayah referensi. Apabila penyimpangan positif, maka dikatakan suatu sektor dalam PDRB memiliki keunggulan kompetitif atau sebaliknya.

Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang berorientasi pada pencapaian target sektoral, keberhasilannya dapat dilihat dari kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB dari tahun ke tahun. Pertumbuhan positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dan apabila negatif berarti terjadinya penurunan dalam kegiatan perekonomian. Pertumbuhan perekonomian mengakibatkan terjadinya perubahan perkembangan pembangunan suatu daerah.

Perencanaan pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dapat dicapai dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat meningkat, bila ada satu atau beberapa sektor ekonomi yang berkembang lebih cepat dari pada sektor- sektor lain. Sektor unggulan yang dimiliki suatu daerah akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena akan memberikan keuntungan *kompetitif* atau *komparatif* yang selanjutnya akan mendorong pengembangan ekspor barang maupun jasa. Kebijakan strategi pembangunan harus diarahkan kepada kebijakan yang memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan. Sektor unggulan yang diperoleh melalui analisis dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di masa mendatang.



Gambar 2.1 Skema Alur Analisis



## BAB 3 METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. PDRB Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi Lampung periode 2000-2010, dengan menggunakan harga konstan tahun 2000. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi Lampung.
2. Data Lampung Utara dalam angka tahun 2010
3. RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010- 2014 dan Renstra Kabupaten Lampung Utara tahun 2004-2008
4. Realisasi Anggaran Tahun 2007-2011
5. Dan data sekunder lainnya yang mendukung penelitian ini

### 3.2 Metode Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka digunakan beberapa metode analisis data, yaitu:

1. Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk menentukan sektor basis dan non basis dalam perekonomian wilayah Kabupaten Lampung Utara.
2. Analisis Multiplier Sektor/subsector Basis untuk melihat besaran angka pengganda dan besaran potensi ekspor pada sektor/sub sektor basis
3. Analisis *Shift Share* digunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor perekonomian wilayah Kabupaten Lampung Utara.
4. Analisis gabungan ( overlay ) LQ dengan Shift share untuk menentukan sektor/subsektor unggulan atau prioritas

#### 3.2.1. Metode Analisis *Location Quotient* (LQ)

##### 1. Analisis Penentuan Sektor Basis Non Basis

Untuk menentukan sektor basis dan non basis di Kabupaten Lampung Utara digunakan metode analisis *Location Quotient* (LQ). Metode LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi

basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan dari PDRB Kabupaten Lampung Utara yang menjadi pemacu pertumbuhan. Metode LQ digunakan untuk mengkaji kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian. Sehingga nilai LQ yang sering digunakan untuk penentuan sektor basis dapat dikatakan sebagai sektor yang akan mendorong tumbuhnya atau berkembangnya sektor lain serta berdampak penciptaan lapangan pekerjaan.

*Location Quotient* adalah rasio dari peranan sektor lokal tertentu terhadap sektor yang sama di tingkat ekonomi acuan yang lebih luas. Tingkat acuan ekonomi yang digunakan dalam hal ini adalah berupa perekonomian propinsi sehingga bentuk aljabar hubungan tersebut dinyatakan :

$$LQ_i = (E_{ij}/E_i) / (E_{ir}/E_r)$$

Dengan :

$LQ_i$  : *Location Quotient* sektor i perekonomian lokal

$E_{il}$  : Produk / lapangan kerja di sektor i dalam perekonomian lokal

$E_i$  : Total produk atau lapangan kerja dalam perekonomian lokal

$E_{ir}$  : Produk / lapangan kerja total di sektor i dalam perekonomian lokal

$E_r$  : Total produk atau lapangan kerja dalam perekonomian Propinsi

1. Jika nilai LQ untuk suatu sektor di perekonomian lokal  $> 1$ . maka dapat dianggap bahwa produksi lokal pada sektor yang bersangkutan relatif lebih tinggi dari pada produksi rata-rata wilayah acuan, dan termasuk sektor basis
2. Nilai LQ  $< 1$ . maka dapat dianggap bahwa produksi lokal pada sektor yang bersangkutan relatif lebih rendah dari pada produksi rata-rata wilayah acuan, dan termasuk sektor non basis
3. Nilai LQ = 1. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di daerah Kabupaten Lampung Utara adalah sama dengan sektor yang sama dalam perekonomian Provinsi Lampung.

Data yang digunakan dalam analisis *Location Quotient* (LQ) ini adalah PDRB Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi Lampung tahun 2000-2010 menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2000

## 2. Menentukan Banyaknya Potensi Ekspor Sektor Basis

Untuk menentukan banyaknya potensi Ekspor dari sektor basis. Dengan asumsi bahwa wilayah melakukan ekspor pada nilai LQ lebih dari satu, maka kegiatan pekerjaan yang dilakukan ekspor dapat dihitung sebagai berikut :

$$EirX = (LQ_i - 1) / LQ * Eil \text{ atau}$$

$$EirX = \{(1 - 1/LQ_i)\} * Eil \text{ dengan syarat } LQ_i > 1$$

Eir X : Jumlah produk yang dapat di ekspor atau tenaga kerja sektor i yang dapat memproduksi barang ekspor

## 3. Angka Pengganda Sektor Basis

analisis pengganda dapat diperlukan untuk mengetahui dampak yang di timbulkan oleh adanya input sektor basis. Dalam hal ini sektor basis adalah sektor yang berpotensi melakukan ekspor, atau memiliki nilai LQ lebih besar dari satu. Faktor pengganda ekonomi dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

1. menghitung tenaga kerja sektoral lokal yang memproduksi ekspor untuk seluruh sektor yang nilai LQnya lebih dai 1
2. menjumlahkan seluruh tenaga kerja yang menghasilkan ekspor = A
3. Nilai pengganda di hitung dari jumlah total tenaga kerja di wilayah yang bersangkutan di bagi dengan jumlah total tenaga kerja yang di ekspor

Sehingga nilai pengganda dapat diperoleh dengan formula

$$EirX = \{Eil/EI - Eir/Er\} * EI$$

Dan angka penggandanya : Total PDRB / jumlah potensi ekspor sektor basis

### 3.2.2. Analisis *Shift Share* (*Shift Share Analysis*)

Analisis *shift share* digunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor pada perekonomian wilayah Kabupaten Lampung Utara. Hasil analisis *shift share* akan menggambarkan kinerja sektor-sektor dalam

PDRB Kabupaten Lampung Utara dibandingkan Provinsi Lampung. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyimpangan yang terjadi sebagai hasil perbandingan tersebut. Bila penyimpangan tersebut positif, maka dikatakan suatu sektor dalam PDRB Kabupaten Lampung Utara memiliki keunggulan *kompetitif* atau sebaliknya.

Data yang digunakan dalam analisis *shift share* ini adalah PDRB Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi Lampung tahun 2000-2010 menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2000. Penggunaan data harga konstan dengan tahun dasar yang sama agar bobotnya (nilai riilnya) bisa sama dan perbandingan menjadi *valid* (Tarigan, 2007:86).

Melalui analisis *shift share*, maka pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktural perekonomian wilayah Kabupaten Lampung Utara ditentukan oleh tiga komponen, yaitu:

#### 1. Komponen Share ( *Propintial Share* )

merupakan komponen kontribusi dari pertumbuhan perekonomian wilayah acuan secara keseluruhan terhadap perekonomian daerah, Komponen share merupakan kondisi pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah acuan dalam priode waktu tertentu dinyatakan dalam bentuk pertumbuhan PRDB, lapangan pekerjaan. Nilai Komponen share menunjukkan tingkat pertumbuhan lokal yang terjadi jika diasumsikan ekonomi lokal tumbuh pada tingkat pertumbuhan yang sama dengan propinsi ( asumsi hal hal lain tidak berkontribusi sehingga pertumbuhan ekonomi lokal hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi acuan ). Komponen Share dapat juga di anggap sebagai penggerak awal pertumbuhan ekonomi lokal yang disebabkan oleh pengaruh kontribusi pertumbuhan faktor regional. Tapi pada kenyataanya pertumbuhan ekonomi lokal juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, sehingga terjadi simpangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang disebabkan faktor share tadi. Simpangan simpangan yang terjadi terhadap faktor share akibat faktor faktor spesifik sektoral dan faktor lokal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi lokal ( dikenal dengan komponen Shift atau pergeseran )

## 2. Komponen Shift

Menunjukkan simpangan yang terjadi terhadap nilai komponen share akibat adanya factor-faktor spesifik sektoral dan faktor-faktor lokal yang mempengaruhi ekonomi lokal yang bersangkutan (dengan kata lain komponen shift merupakan koreksi terhadap komponen share). Nilai koreksi akan positif pada daerah ekonomi lokal yang bertambah makmur dalam periode analisis, nilai koreksi negatif pada ekonomi lokal yang mengalami kemunduran. Komponen Shift terdiri dari :

### a. *Proportional Shift* (P)

Komponen ini sering disebut sebagai komponen struktural atau campuran industri, komponen ini mengukur nilai pergeseran komposisi sektoral yang terjadi di struktur ekonomi acuan atau perbedaan antara pertumbuhan sektor-sektor secara individual dengan pertumbuhan ekonomi keseluruhan wilayah acuan : Bernilai Positif Jika sektor-sektor di wilayah acuan mengalami pertumbuhan lebih pesat dari pertumbuhan keseluruhan ekonomi wilayah acuan dan bernilai negatif jika sektor-sektor di wilayah acuan mengalami pertumbuhan lebih rendah di bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan wilayah acuan.

Karena *proportional shift* merupakan koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi acuan akibat pergeseran sektoral di struktur ekonomi acuan, maka komponen ini sering di sebut juga sebagai kontribusi faktor eksternal terhadap ekonomi lokal. Perkembangan sektor industri di tingkat ekonomi acuan sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor yang bersangkutan di tingkat lokal.

### b. *Differential Shift* (D)

Komponen ini sering disebut sebagai komponen kontribusi pertumbuhan lokal (*local share*). Besaran yang diukur oleh komponen ini adalah simpangan atau pergeseran di sektor lokal tertentu akibat terjadinya pertumbuhan yang lebih cepat atau lebih lambat di bandingkan pertumbuhan sektor yang sama di wilayah acuan. Bernilai positif jika untuk sektor-sektor lokal yang berkembang lebih pesat dibandingkan sektor yang sama di propinsi dan bernilai negatif jika sektor lokal yang

tingkat perkembangannya lebih rendah atau di bawah sektor sejenis di perekonomian acuan. Besaran *differential shift* ini di dalam beberapa referensi sering disebut sebagai *Keunggulan Kompetitif sektor ekonomi local dalam* konteks spasial keunggulan tersebut disebut sebagai keunggulan lokasional dan perekonomian lokal yang cenderung memiliki keunggulan lokasi akan memberikan nilai koreksi positif keunggulan lokasi dapat berupa kemudahan akses ke sumber daya, kedekatan lokasi ke pasar dsb.

Secara matematis, komponen *Provincial Share* (PS), *Proportional Shift* (P), dan *Differential Shift* (D) dapat diformulasikan sebagai berikut (Tarigan, 2007:88; Sjafrizal, 2008:91):

1. *Provincial Share* (PS)

$$PS_{i,t} = E_{r,i,t-n} (E_{N,t} / E_{N,t-n}) - E_{r,i,t-n}$$

2. *Proportional Shift* (P)

$$P_{r,i,t} = \{(E_{N,i,t} / E_{N,i,t-n}) - (E_{N,t} / E_{N,t-n})\} \times E_{r,i,t-n}$$

3. *Differential Shift* (D)

$$D_{r,i,t} = \{E_{r,i,t} (E_{N,i,t} / E_{N,i,t-n}) - E_{r,i,t-n}\}$$

4. Total Pertumbuhan

$$\Delta E_{r,i,t} = (PS_i + P_{i,t} + D_{r,i})$$

Di mana:

$$E_{r,i,t-n} = \text{PDRB Kabupaten sektor } i \text{ Tahun } 2000$$

$$E_{r,i,t} = \text{PDRB Kabupaten sektor } i \text{ Tahun } 2010$$

$$E_{N,t} = \text{Jumlah total PDRB Propinsi Tahun } 2010$$

$$E_{N,t-n} = \text{Jumlah Total PDRB Propinsi Tahun } 2000$$

$$E_{N,i,t} = \text{PDRB sektor } i \text{ Propinsi tahun } 2010$$

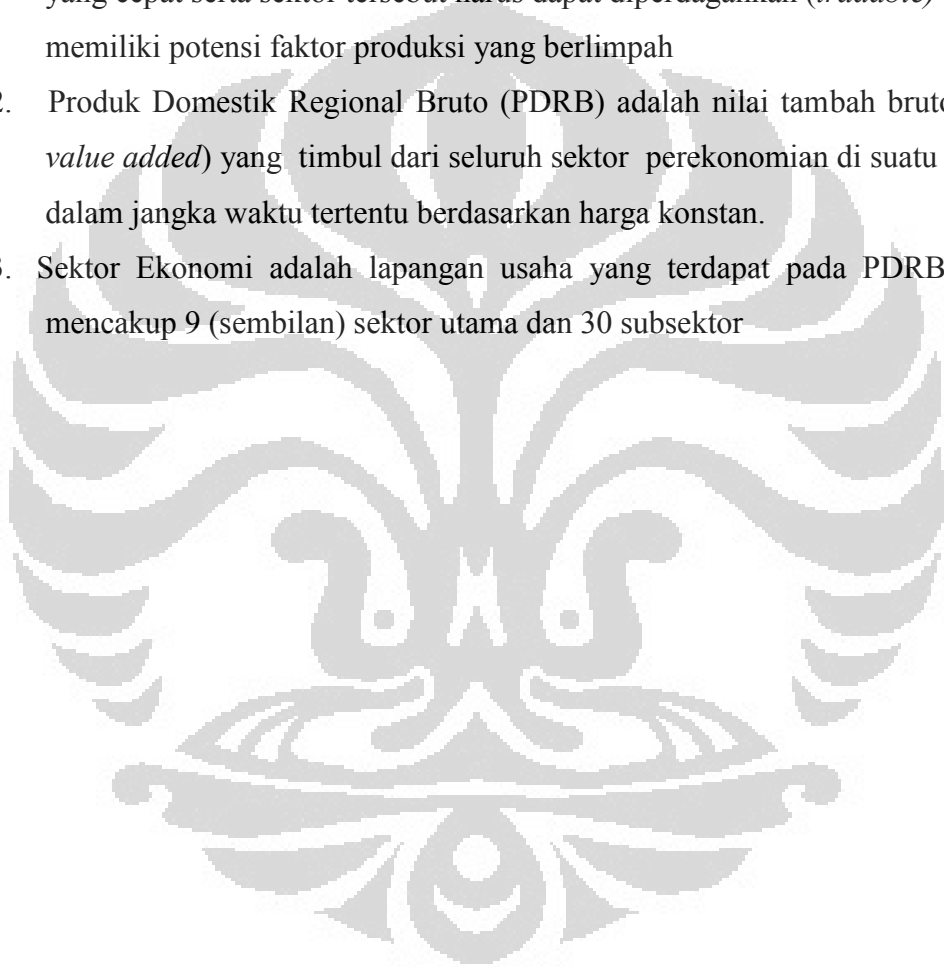
$$E_{N,i,t-n} = \text{PDRB sektor } i \text{ Propinsi tahun } 2000$$

$$E_{r,i,t} = \text{Pertambahan lapangan kerja regional sektor } i \text{ tahun } 2010$$

### 3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Untuk menyamakan persepsi tentang variabel-variabel yang digunakan dan menghindari terjadinya perbedaan penafsiran, maka penulis memberi batasan definisi operasional sebagai berikut:

1. Sektor Unggulan (*leading sector*)/ adalah sektor yang memiliki keunggulan *comparative* atau sektor basis dan memiliki keunggulan kompetitif, memiliki peranan yang besar dalam pembentukan PDRB dan memiliki pertumbuhan yang cepat serta sektor tersebut harus dapat diperdagangkan (*tradable*) dan memiliki potensi faktor produksi yang berlimpah
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga konstan.
3. Sektor Ekonomi adalah lapangan usaha yang terdapat pada PDRB, yang mencakup 9 (sembilan) sektor utama dan 30 subsektor



## BAB 4 GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

### 4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

#### 4.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di propinsi Lampung yang secara geografis terletak pada  $104^{\circ}40'$  sampai  $105^{\circ}80'$  Bujur Timur dan  $4^{\circ}4'$  sampai  $5^{\circ}6'$  Lintang Selatan dengan luas wilayah 2.725,63 KM<sup>2</sup> atau 7,72 persen dari luas propinsi Lampung dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat

#### 4.1.2 Wilayah Administrasi

Berdasarkan Perda N0.08 tahun 2006 Secara administrasi wilayah Kabupaten Lampung Utara terbagi atas 23 kecamatan dan 247 desa/kelurahan. Dengan luas wilayah adalah 272.563 Ha yang terdiri dari kecamatan:

1. Bukit Kemuning
2. Abung Tinggi
3. Tanjung raja
4. Abung Barat
5. Abung Tengah
6. Abung Kunang
7. Abung Pekurun
8. Kotabumi
9. Kotabumi Utara
10. Kotabumi selatan
11. Abung Semuli
12. Blambangan pagar
13. Abung Timur



14. Abung Surakarta
15. Abung selatan
16. Muara Sungkai
17. Bunga mayang
18. Sungkai barat
19. Sungkai Jaya
20. Sungkai Utara
21. Hulu sungkai
22. sungkai tengah

wilayah Kabupaten Lampung Utara merupakan daerah Agraris dengan mata pencaharian pokok penduduknya di sektor pertanian

#### 4.1.3 Topografis

Secara topografi, sebelah barat merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian anantara 450-1500 m dari permukaan laut, dan pada bagian timur merupakan dataran rendah yang tertutup awan vulkanis, dengan kondisi iklim tropis, musim hujan dan musim kemarau berganti sepanjang tahun. Temperatur rata-rata 30<sup>0</sup> C, dengan jumlah hujan 197 mm/bulan dan hari hujan rata-rata 12 hari/bulan

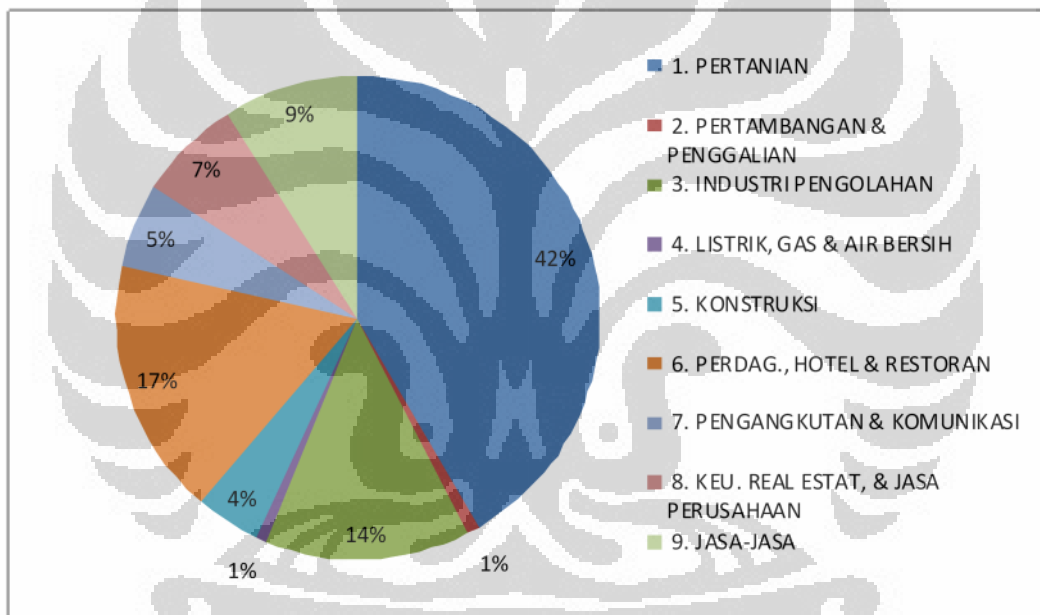
#### 4.1.4 Demografi

Berdasarkan hasil estimasi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Utara tahun 2008 sebesar 588.334 jiwa. Dari total penduduk tersebut, 48,88 persen atau sebanyak 287.550 jiwa perempuan. Dengan demikian rasio jenis kelamin penduduk Lampung utara 104,60 dengan luas wilayah 2.725,63 KM<sup>2</sup> kepadatan penduduk kabupaten Lampung Utara mencapai 216 jiwa per km<sup>2</sup>

## 4.2 Struktur Ekonomi Kabupaten Lampung Utara

Struktur ekonomi suatu daerah dapat diketahui dengan melihat komposisi PDRBnya. Dari komposisi ini dapat dilihat bagaimana peranan atau kontribusi masing masing sektor dalam pembentukan total PDRB daerah. Semakin besar peranan suatu sektor terhadap total PDRB, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut terhadap perkembangan perekonomian daerah yang bersangkutan

Selama tahun 2000-2010 perekonomian Kabupaten Lampung Utara di dominasi oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan. Sektor-sektor tersebut memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan total PDRB Kabupaten Lampung Utara, dengan rata rata kontribusi selama priode tersebut sebesar 42 % dan rata-rata kontribusi sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 17 % sektor indusri pengolahan sebesar 14 %, kondisi ini sesuai dengan karakteristik Kabupaten Lampung Utara yang sebagian besar wilayahnya pertanian/ perkebunan sehingga industri yang berkembang merupakan industri pengolahan pertanian serta perdagangan hasil pertanian. Struktur Ekonomi Kabupaten Lampung Utara pada kurun waktu 2000-2010 seperti terlihat pada gambar berikut :



Gambar 4.1 : Rata-rata Kontribusi sektor-sektor Ekonomi dalam PDRB Kabupaten Lampung Utara tahun 2000-2010

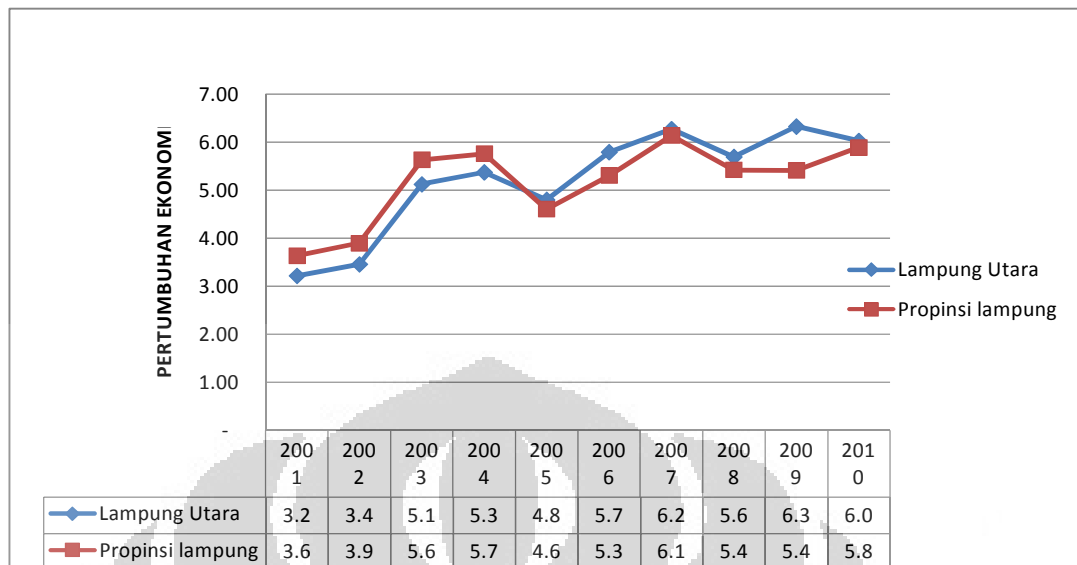
Dalam diagram secara rata-rata dari tahun 2000 sampai tahun 2010 sektor pertanian memberikan kontribusi yang sangat besar akan tetapi perkembangan kontribusinya semakin menurun dimana pada tahun 2000 kontribusinya 48,41 % turun menjadi 37,83 % pada tahun 2010 sebaliknya pada sektor industri pengolahan perkembangan kontribusinya mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu besar yaitu pada tahun 2000 kontribusinya sebesar 12,73 % naik menjadi 14,67 % pada tahun 2010, begitu juga pada sektor perdagangan, hotel dan restoran kontribusinya terus mengalami peningkatan dari 15,70 % di

tahun 2000 menjadi 17,34% pada tahun 2010, kondisi demikian menandakan adanya pergerakan struktur ekonomi dari sektor pertanian menuju ke sektor industri dan perdagangan. Akan tetapi sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang besar pada pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Utara. Adapun sektor yang perannya sangat kecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Utara adalah sektor listrik dan air bersih dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,66% dan sektor pertambangan rata-rata kontribusinya sebesar 0,77 %, sehingga dapat diketahui bahwa Kabupaten Lampung Utara tidak memiliki potensi sumber daya alam berupa pertambangan, dan kegiatan sektor ini hanya terbatas pada jenis galian C yang diusahakan oleh rakyat secara sederhana

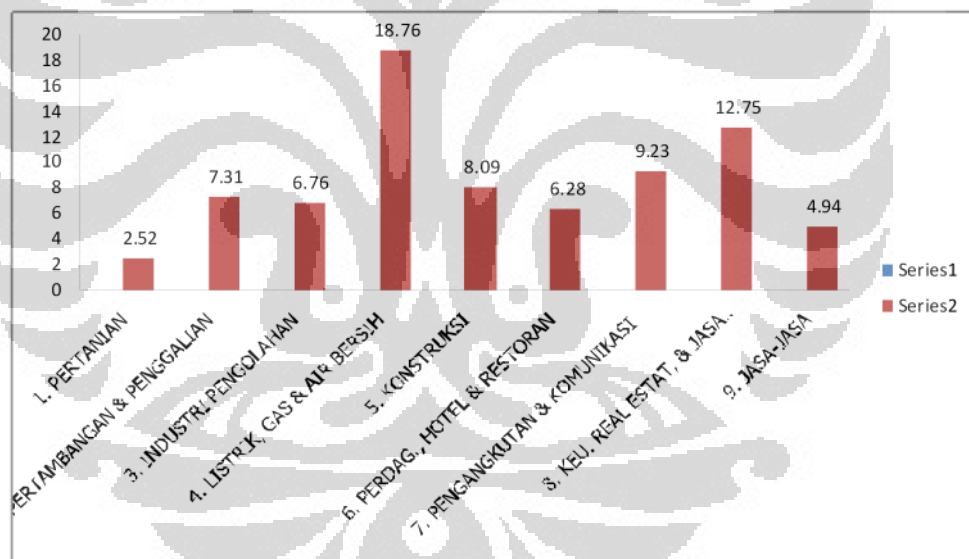
#### **4.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Utara**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat pada suatu periode tertentu. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi yang menghasilkan barang dan jasa, yang pada akhirnya akan menghasilkan aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang ada dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi selalu ditunjukkan oleh pertumbuhan atau perubahan peranan dari masing-masing sektor atau sub sektor ekonomi yang dimiliki daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan pengolahan data PDRB periode tahun 2000-2010 atas dasar harga konstan tahun 2000 ( lampiran 2) diperoleh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara rata-rata mencapai 5,21 % sedikit berada di atas laju pertumbuhan propinsi Lampung yaitu 5,17 %, pada tahun 2001 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara hanya mencapai 3,22 berangsur-angsur mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2010 mencapai 6,02 %, seperti terlihat dalam grafik di bawah laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Lampung Utara dari tahun 2005 lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi propinsi Lampung



Gambar 4.2 : Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Utara dan Propinsi Lampung Tahun 2000-2010



Gambar 4.3: Grafik rata-rata Pertumbuhan Setiap Sektor PDRB Kabupaten Lampung Utara tahun 2000-2010

Dari grafik di atas terlihat bahwa sektor listrik, gas dan air bersih mengalami rata-rata pertumbuhan yang tinggi yaitu (18,76 %) selama kurun waktu 2000-2010 tingginya pertumbuhan sektor ini dikarenakan adanya pertumbuhan yang sangat drastis pada tahun 2001 sebesar 60,06 % yaitu dari 5.335.000.000 menjadi 8.539.000.000 dan kenaikan yang sangat tinggi juga terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 95,72 % sehingga menjadi 16.712.000.000, akan tetapi sektor ini memberikan kontribusi yang paling kecil yaitu 0,66 %,

sedangkan sektor pertanian yang memberikan kontribusi yang sangat besar yaitu rata-rata 42 % mengalami rata-rata pertumbuhan yang paling rendah yaitu hanya 2,52 % dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan 5,21 %. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan sektor yang memberikan kontribusi kedua terhadap PDRB mengalami rata-rata pertumbuhan yang cukup baik yaitu sebesar 6,28 %, dan rata-rata pertumbuhan sektor industri pengolahan 6,76 % yang merupakan sektor terbesar ke tiga dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB

#### 4.4 Pendapatan Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dapat diketahui dari pembagian angka PDRB dengan jumlah penduduk di daerah tersebut setiap tahunnya. Berdasarkan harga konstan tahun 2000 PDRB perkapita kabupaten Lampung Utara selama periode pengamatan yaitu tahun 2000-2010 secara rata-rata sebesar Rp. 4.603. 263; Sedangkan Selama kurun waktu tersebut rata-rata laju pertumbuhan perkapita daerah ini mencapai 3,96 % pertahun, laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2009 Sebesar 5,90 % dan laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2006 dengan laju pertumbuhan 1,94 % seperti terlihat dalam tabel 4.2 di bawah ini

Tabel 4.1 Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Kab. Lampung Utara atas dasar harga konstan tahun 2000 dan harga berlaku 2000-2010 (rupiah )

Tahun	Harga Kontan	
	Nilai	Pertumbuhan
2000	3,858,509.70	
2001	3,937,906.44	2.06
2002	4,028,755.85	2.31
2003	4,188,517.08	3.97
2004	4,365,534.80	4.23
2005	4,525,781.44	3.67
2006	4,613,486.23	1.94
2007	4,874,457.73	5.66
2008	5,129,166.43	5.23
2009	5,431,820.91	5.90
2010	5,681,952.87	4.60
rata rata	4,603,262.68	3.96

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Utara

## 4.5 Profil Sektor Sektor

### 4.5.1 Sektor Pertanian

Seperti diketahui dalam kondisi umum ekonomi daerah Kabupaten Lampung Utara, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Lampung Utara. Sektor pertanian terdiri dari subsektor tanaman makanan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor perikanan, subsektor kehutanan.

#### 1. Sub Sektor Tanaman Pangan

Jumlah kepala keluarga Tani di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2008 berjumlah 30.503 KK kemudian pada tahun 2009 meningkat menjadi 65.282 KK yang sebagian besar berada di kecamatan Bunga Mayang berjumlah 12.412 KK, kecamatan muara sungkai 11.380 KK, kemudian sisanya menyebar ke 23 kecamatan dengan luas lahan sawah 16.276 Ha dan lahan kering 201.467 Ha sedangkan produksi padi sawah di kabupaten Lampung Utara mengalami kenaikan dari 119.445 ton pada tahun 2008 menjadi 126.838 ton pada tahun 2009, sedangkan padi produksi ladang meningkat dari 27.509 ton pada tahun 2008 menjadi 28.859 ton pada tahun 2009.

Tabel 4.2 : Luas dan Produksi Tanaman Bahan Makanan dan Holtikultura Di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009

No	Jenis Tanaman		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
<b>1</b>	<b>Padi</b>		<b>34.748</b>	<b>155.697</b>
	a	Padi Sawah	24.348	126.838
	b	Padi Gogo	10.400	28.859
<b>2</b>	<b>Palawija</b>		<b>95.520</b>	<b>1.562.011</b>
	a	Jagung	35.292	174.917
	b	Ubi Kayu	52.986	1.375.717
	c	Ubi Jalar	758	7.071
	d	Kacang Kedelai	1.780	1.821
	e	Kacang Hijau	651	831
	f	Kacang Tanah	1.053	1.654
	g	Kacang Lainnya	-	-
<b>3</b>	<b>Sayur-Sayuran</b>		<b>3.341</b>	<b>7.435</b>
	a	Buncis	27	9

Sambungan Tabel 4.2

	b	Kacang-Kacangan	772	276
	c	Terong	551	192
	d	Cabe / Lombok	893	293
	e	Tomat	426	164
	f	Bayam	395	215
	g	Kangkung	277	141
<b>4</b>		<b>Buah-Buahan</b>	<b>282.167</b>	<b>16.391</b>
	a	Nanas	14.969	758
	b	Salak	8.840	385
	c	Rambutan	38.972	3.284
	d	Manggis	600	76
	e	Jambu Biji / Air	4.122	231
	f	Durian	15.923	2.987
	g	Mangga	26.356	1.989
	h	Jeruk	18.624	2.690
	i	Pisang	139.818	2.909
	j	Duku	6.431	469
	K	Pepaya	7.512	613

Sumber : Lampung Utara Dalam Angka 2010

Dari ke 4 komoditas tanaman bahan makanan luas panen terluas adalah komoditas buah buahan seluas 282.167 Ha dan yang paling luas adalah lahan untuk perkebunan pisang dengan luas panen 139.818 Ha atau 52 %nya, kemudian palawija dan disusul padi sedangkan untuk produksi terbanyak adalah jenis palawija dengan produksi 1.562.011 ton dan sebagian besar (88%) adalah hasil dari ubi kayu. Untuk kondisi pengairan ( irigasi ) sekitar 60,57% dari total sawah yang ada di Kabupaten Lampung Utara dialiri oleh pengairan, 36,35% diantaranya menggunakan pengairan teknis.

## 2. Subsektor Perkebunan

Sedangkan sub sektor perkebunan di Kabupaten Lampung Utara dari tahun 2004-2009 di dominasi oleh tanaman tebu dengan jumlah lahan dan produksi yang meningkat dari tahun ke tahun, tercatat pada tahun 2004 luas lahan perkebunan tebu 7.040 Ha dengan hasil produksi 12.038 Ton, meningkat tajam menjadi 14.418 Ha untuk lahan dan produksi menjadi 92.275 Ton, sedangkan kelapa dalam, kelapa hibrida, kopi, cengkeh dan lada yang dahulu menjadi ikon Kabupaten Lampung Utara sejak tahun 2004 mulai menghilang dari komoditas

tanaman perkebunan di Kabupaten Lampung Utara tergantikan kelapa sawit, kakao dan karet seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.3 : Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Besar Menurut Jenis Tanaman Di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2004-2009

No	Jenis Tanaman	Tahun					
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	<b>Luas (Ha)</b>						
	a Karet	270	270	270	270	270	270
	b Cengkeh	-	-	-	-	-	-
	c Kopi	-	-	-	-	-	-
	d Kelapa Dalam	-	-	-	-	-	-
	e Kelapa hibrida	-	-	-	-	-	-
	f Kelapa Sawit	3.337	3.337	7.422	7.422	7.422	7.422
	g Lada	-	-	-	-	-	-
	h Tebu	7.040	7.040	11.189	11.189	14.418	14.418
	i Kayu Manis	-	-	-	-	-	-
	J Kakao	397	397	397	290	290	290
2	<b>Produksi (Ton)</b>						
	a Karet	247	247	247	69	69	69
	b Cengkeh	-	-	-	-	-	-
	c Kopi	-	-	-	-	-	-
	d Kelapa Dalam	-	-	-	-	-	-
	e Kelapa hibrida	-	-	-	-	-	-
	f Kelapa Sawit	3.936	3.936	26.771	7.501	8.506	1.809
	g Lada	-	-	-	-	-	-
	h Tebu	12.038	12.038	19.133	90.833	89.056	92.275
	i Kayu Manis	-	-	-	-	-	-
	J Kakao	556	556	556	145	147	145

Sumber : Lampung Utara Dalam Angka 2010

Tabel 4.4 : Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman Perkecamatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010

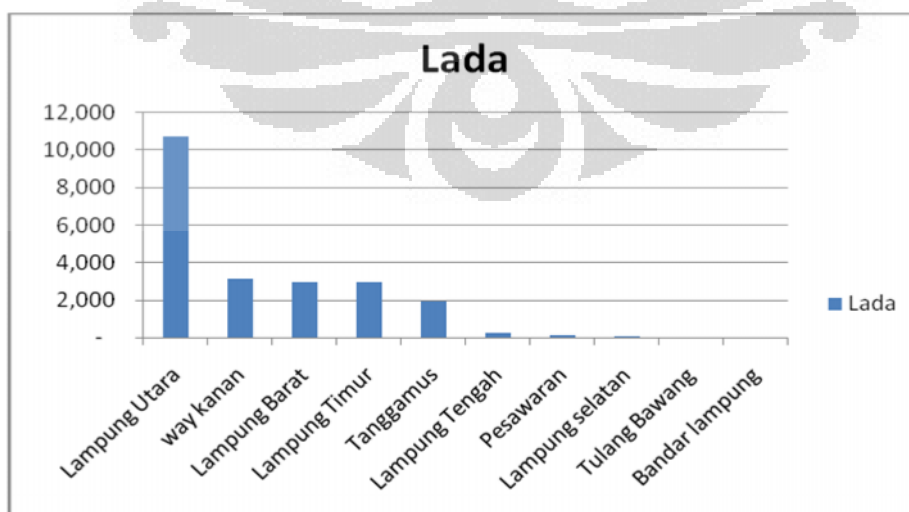
No	Kecamatan	Luas Areal (Ha)					
		Karet	Kopi	Lada	Cengkeh	Kelapa Dalam	Kelapa Hibrida
1	Bukit Kemuning	31	2.178	1.658	63	187	-
2	Abung Tinggi	26	2.510	2.378	8	234	-
3	Tanjung Raja	62	8.009	2.050	210	231	-
4	Abung Barat	75	623	2.646	-	27	-
5	Abung Tengah	545	1.528	1.440	4	51	-
6	Abung Kunang	215	622	2.460		14	-
7	Abung Pekurun	390	507	1.374		15	-



8	Kotabumi	371	439	1.189	-	25	-
9	Kotabumi Utara	709	173	264	-	110	-
10	Kotabumi Selatan	481	1.422	2.195	-	57	-
11	Abung Selatan	2.258	40	1284	-	378	-
12	Abung Semuli	704	18	-	-	256	-
13	Blambangan Pagar	371	21	4	-	93	-
14	Abung Timur	1253	122	13	-	109	44
15	Abung Surakarta	364	10		-	350	-
16	Sungkai Selatan	411	40	498	-	35	-
17	Bunga Mayang	262	-	5	-	144	-
18	Muara Sungkai	794	19	5	-	133	-
19	Sungkai Barat	1.471	1.286	3.081		245	-
20	Sungkai Jaya	472	310	1.138	-	44	-
21	Sungkai Utara	2.358	243	198	-	454	-
22	Hulu Sungkai	3.894	774	1.374	5	24	-
23	Sungkai Tengah	981	518	1.703	6	90	-
<b>Jumlah Total</b>		<b>18.498</b>	<b>21.412</b>	<b>25.957</b>	<b>296</b>	<b>3.306</b>	<b>44</b>

Sumber : Lampung Utara Dalam Angka 2010

Untuk luas lahan untuk perkebunan yang paling luas adalah perkebunan Lada 25.957 Ha, kemudian perkebunan kopi 21.412 Ha, Karet 18.498 Ha. Untuk produksinya produksi terbesar adalah perkebunan kopi dengan produksi 12.298,1 ton kemudian disusul produksi karet 12.304,7 ton dan untuk produksi lada sebanyak 9.277,3 ton Dan jika dibandingkan dengan daerah lain di propinsi Lampung produksi lada Kabupaten Lampung Utara paling besar di susul Kabupaten Way Kanan dan Lampung Barat seperti terlihat pada grafik berikut :



Gambar 4.4 : Grafik Produksi Lada se-Propinsi Lampung Tahun 2009

### 3. Peternakan

Jumlah petani ternak pada tahun 2009 sebanyak 14.729 orang yang tersebar di 23 kecamatan

Tabel 4.5 : Jumlah Produksi Ternak Besar dan kecil di Kabupaten Lampung Utara tahun 2008 -2009

Tahun	Ternak besar			Ternak kecil	
	Sapi	Kerbau	babi	Kambing	Domba
2008	19.534	1.642	4.584	48.119	2.368
2009	20.460	1.691	2.395	49.347	2.428

Sumber : Lampung Utara Dalam Angka 2010

Untuk ternak besar produksi ternak yang paling besar adalah sapi 20.460 ekor untuk ternak kecil yang paling banyak adalah kambing dengan produksi 49.347 ekor per tahun yang sebagian besar tersebar di 23 kecamatan, sedangkan untuk ternak unggas seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6 : Jumlah Populasi ternak Unggas Perkecamatan di Kabupaten Lampung Utara tahun 2009

No	Kecamatan	Ternak Unggas			Jumlah
		Ayam Ras	Ayam Buras	Bebek / itik	
1	Bukit Kemuning	48.000	40.430	448	88.878
2	Abung Tinggi	57.000	22.170	73	80.043
3	Tanjung Raja	17.500	28.423	78	46.001
4	Abung Barat	35.000	19.201	1.115	55.316
5	Abung Tengah	-	22.529	431	22.960
6	Abung Kunang	-	38.580	740	39.320
7	Abung Pekurun	-	20.435	105	20.540
8	Kotabumi	24.000	13.881	2.448	40.329
9	Kotabumi Utara	685.000	33.373	1.070	719.443
10	Kotabumi Selatan	30.000	17.422	760	48.182
11	Abung Selatan	-	27.859	2.300	30.159
12	Abung Semuli	80.000	22.408	1.494	103.902
13	Blambangan Pagar	73.000	62.124	744	135.868
14	Abung Timur	69.000	54.800	820	124.620
15	Abung Surakarta	63.000	18.430	150	81.580
16	Sungkai Selatan	-	30.730	195	30.925
17	Bunga Mayang	30.000	26.130	114	56.244
18	Muara Sungkai	-	43.660	785	44.445-

19	Sungkai Barat	-	12.390	160	12.550
20	Sungkai Jaya	-	19.700	542	20.242
21	Sungkai Utara	38.000	9.724	243	47.967
22	Hulu Sungkai	-	15.070	122	15.192
23	Sungkai Tengah	-	29.757	826	30.583
<b>Jumlah Total</b>		<b>1.250.300</b>	<b>21.412</b>	<b>15.763</b>	<b>1.895.289</b>

Sumber : Lampung Utara Dalam Angka 2010

Jenis ternak yang paling banyak adalah jenis ayam ras dengan produksi 1.250.300 ekor dan 50 % nya berada di Kecamatan kotabumi Utara . dan untuk produksi telur pada tahun 2009 sebanyak 1.156.353 butir

#### 4. Prikanan

Jumlah petani ikan kolam sebanyak 1.853 orang dan nelayan sungai rawa sebanyak 1.099 orang yang tersebar di 23 kecamatan. Luas Area pemeliharaan dan produksi ikan seperti tabel berikut :

Tabel 4.7 : Luas Area Pemeliharaan / penangkapan dan Produksi Ikan menurut Sumbernya di Kabupaten Lampung Utara tahun 2009

No	Sumber	Penangkapan/pemeliharaan ( Ha )	Produksi ( Ton )
1	Keramba/jaring apung	0.06	1,154
2	Waduk	1.800	388,96
3	Rawa ( swamp)	3.900	226.10
4	Sungai ( River )	1.140	1.313,58
5	Kolam / Empang ( Pond )	1.929	777
6	Tambak ( dam )	-	-
7	Cekdam / gal	-	-
8	Mina Padi / Sawah	6.325	65
Jumlah / total		8.832	3.925

Sumber : Lampung Utara Dalam Angka 2010

#### 5. Kehutanan

Kabupaten Lampung Utara memiliki kawasan hutan lindung maupun hutan produksi. Luas kawasan hutan lindung sebesar 29.100 Ha, yang meliputi masing-masing wilayah kecamatan Bukit Kemuning 11.604,1 Ha, Abung Tinggi 2.230,4 dan Abung barat 13.800 ha serta Kotabumi 1.465,5 ha sedangkan hutan produksi seluas 10.055 ha .015 Ha yang keseluruhannya berada di Kecamatan Sungkai Utara. Adapun Jenis produksi hasil hutan sebagai berikut :

Tabel 4.8 : Produksi Hasil Hutan Menurut Jenis dan kecamatan di Kabupaten Lampung Utara tahun 2009

No	Kecamatan	Jenis Produksi			
		Kayu Bulat (M3)	Rotan (Ton)	Arang (Ton)	Damar (Ton)
1	Bukit Kemuning	890	-	1.250	500
2	Abung Tinggi	5.800	-	-	-
3	Tanjung Raja	1.462,15	-	-	-
4	Abung Barat	18.109,04	-	-	-
5	Abung Tengah	9.602,08	-	-	-
6	Abung Kunang	100	-	-	-
7	Abung Pekurun	2.589,75	-	-	-
8	Kotabumi	163,87	-	-	-
9	Kotabumi Utara	142,71	-	-	-
10	Kotabumi Selatan	1.315,02	-	-	-
11	Abung Selatan	6.000	-	-	-
12	Abung Semuli	100	-	-	-
13	Blambangan Pagar	-	-	-	-
14	Abung Timur	100	-	-	-
15	Abung Surakarta	-	-	-	-
16	Sungkai Selatan	-	-	-	-
17	Bunga Mayang	-	-	-	-
18	Muara Sungkai	-	-	-	-
19	Sungkai Barat	4.033,59	-	-	-
20	Sungkai Jaya	-	-	-	-
21	Sungkai Utara	1.667,70	-	-	-
22	Hulu Sungkai	-100	-	-	-
23	Sungkai Tengah	2.528,40	-	-	-
<b>Jumlah Total</b>		<b>54.704</b>		<b>1.250</b>	<b>500</b>

Sumber : Lampung Utara Dalam Angka 2010

Untuk hasil Hutan yang terbesar berupa kayu bulat dengan produksi 54.704 M3 dan produksi terbesar berada di kecamatan Abung Barat 18.109,04 M<sup>3</sup> kemudian Abung tengah dan Abung Selatan

#### 4.5.2 Sektor Pertambangan dan penggalian

Untuk sektor ini Kabupaten Lampung Utara tidak memiliki sub sektor pertambangan tapi hanya subsector penggalian

### 4.5.3 Sektor Industri Pengolahan

Pada tahun 2009 terlihat bahwa jumlah unit usaha pada kelompok industri sebanyak 2000 unit dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 7.251 orang dengan total investasi sebesar 42,33 milyar dan nilai produksi 65,6 milyar. Dan secara rinci terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.9 : Banyaknya Unit usaha dan Tenaga Kerja Perusahaan Industri dan Nilai Produksi dan Ivestasi di Kabupaten Lampung Utara 2009

Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp. 000,-)	Produksi (Rp. 000,-)
I. Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan				
1. Tahu/ Tempe	144	428	850,910	953,569
2. Temulawak	2	6	11,500	3,500
3. Kerupuk	50	312	550,450	571,760
4. Kue Kering/ Roti	9	32	177,250	451,100
5. Macam-macam Makanan Ringan	4	16	55,000	158,000
6. Profil/ Pipilan Jagung	12	35	111,000	114,000
7. Marning Jagung	3	6	3,000	4,200
8. Batu Bata	220	864	1,433,535	2,261,930
9. Meubelair	195	925	6,204,390	8,916,387
10. Anyaman Bambu/ Geribik	21	69	44,780	81,400
11. Kopi Bubuk	105	266	1,247,310	1,902,915
12. Gas Accu	20	22	168,320	237,585
13. Genteng	11	42	118,950	219,360
14. Industri Barang Dari Semen	33	126	583,866	1,197,115
15. Penggergajian Kayu	57	469	3,316,540	8,323,575
16. Kursi Rotan	1	4	2,340	9,270
17. Industri Tapioka	15	574	10,618,100	11,003,390
18. Pengupasan Kopi/ Huller	221	479	2,058,900	8,259,059
19. Heller Padi	178	467	5,659,943	2,764,063
20. Gula Merah/ Kelapa	38	71	54,250	171,325
21. Keripik Pisang	25	106	207,940	158,820
22. Keripik Singkong	6	17	41,820	14,155
23. Bata/ Genteng	20	109	41,690	422,320
24. Internit	1	6	7,500	90,000
25. Selai Pisang	1	3	6,500	1,750
26. Jamu Tradisional	6	12	2,700	2,400
27. Sapu Ijuk	2	4	2,500	7,800
28. Minyak Wangi	1	6	5,000	500
29. Minyak Sereh	1	2	10,000	3,000
30. Percetakan	8	26	203,900	351,300

31. Gagang Cangkul	1	2	1,000	1,500
32. Kusen (Pintu/ jendela)	3	10	90,700	207,700
33. Kerupuk Kemplang Panggang	2	7	21,250	21,150
34. Minyak Goreng	3	7	65,000	4,500
35. Sangkar Burung	1	5	2,000	3,000
36. Sumplit	1	50	1,960,000	2,264,500
37. Vulkanisir Ban	1	3	100,000	15,000
38. kopra	10	30	45,000	44,500
39. Penggilingan Tepung Beras	12	27	22,500	19,600
40. Sablon	1	5	5,000	7,500
41. Batako	2	12	18,000	82,000
42. Gula Putih	1	50	-	-
43. Pem.Perabotan Rumah Tangga	9	48	217,056	324,140
44. Kerajinan Rotan	11	36	21,010	59,555
45. Tembakau dan Rokok Kretek	5	38	63,800	341,800
46. Manisan Buah	1	2	15,000	5,000
47. Penggilingan Cabe	1	3	20,000	3,500
48. Pellet Plastik/ Pengol. Plastik Bekas	3	17	185,000	430,000
49. Kaca Patri	1	2	2,500	18,000
50. Pernak-pernik	1	2	2,500	15,000
51. Limun	1	4	15,000	62,500
52. Industri Pengasapan Karet	1	165	51,000	561,000
II. Industri Logam, Mesin dan Aneka				
1. Bengkel Mobil	25	93	974,380	1,601,615
2. Bengkel Motor	77	186	886,060	1,551,000
3. Las Karbit/ listrik	116	258	1,322,850	3,015,310
4. Bengkel Sepeda	24	42	184,150	202,470
5. Tambal Ban	22	30	81,420	610,105
6. Penjahit Pakaian	90	188	695,540	625,363
7. Kerajinan Emas	36	55	381,040	1,206,360
8. Photocopy	14	28	97,780	528,860
9. Servis Elektronika, TV	16	22	26,710	270,415
10. Servis Jam	3	4	7,600	168,900
11. Salon Kecantikan	16	25	37,650	596,980
12. Pangkas Rambut	2	12	4,390	89,925
13. Peti Kemas	2	8	11,000	27,300
14. Sulaman Indah	15	35	59,000	302,525
15. Tapis	14	90	119,400	226,455
16. Servis Radio	2	2	18,150	45,690
17. Sulaman Usus	2	8	4,680	29,945
18. Hand Traktor	1	5	10,000	10,000
19. Pandai Besi	6	17	48,400	318,910
20. Pengrajin Kuningan	2	7	6,000	7,000
21. Tenun Songket	1	4	5,000	5,000

22. Pengrajin Singer	1	4	3,000	54,375
23. Bordir	3	19	19,450	52,700
24. Bak Mobil Kayu	3	8	150,000	259,000
25. Karoseri Mobil	1	4	100,000	15,000
26. Dekorasi Pengantin	1	1	15,000	7,500
27. Photo Studio	7	10	203,000	85,400
28. Service Dinamo	3	10	23,160	118,820
29. Konveksi	4	16	44,940	113,300
30. Teralis Besi	4	13	36,800	215,680
31. Batu Akik	1	10	2,000	1,000
32. Mesin Pemotong Rumput	1	2	3,000	24,000
33. Pengrajin Alumunium Dari Kaca	2	5	17,500	45,000
34. Industri Barang Lain Dari Gelas	1	1	10,000	22,500

Sumber : Lampung Utara Dalam Angka 2010

Tabel 4.10 : Banyaknya Tenaga Kerja, Asset dan Omzet PKM di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008

Sektor	Total Aset (miliar)	Total Omzet (miliar)	Usaha Kecil Mikro (Orang)	Usaha Kecil (Orang)	Usaha Menengah (Orang)
1 Perdagangan	23.79	407.81	34685	4655	58
2 Jasa	15.86	271.89	23124	3147	45
3 Industri Pertanian	9.26	158.62	13512	2321	59
4 Industri Non Pertanian	17.19	294.54	25051	3239	90
Total	66.1	1132.86	96372	13362	252

Adapun jumlah perusahaan berdasarkan penerbitan TDP ( tanda daftar perusahaan terdapat 111 PT, 53 Koperasi 358 CV, 1.777 PO dan 3 Bul dengan jumlah total 2.302 perusahaan

#### 2.5.4 Sektor Listrik dan Air bersih

##### 1. Subsektor Listrik

Pengelolaan Listrik di Lampung Utara dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Kotabumi yang melayani wilayah Tulang Bawang, Lampung Utara, Lampung Barat, dan Way Kanan.

Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di Kabupaten Lampung Utara , produksi Listrik yang dibangkitkan oleh PT. PLN di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2009 adalah 230.848.519 Kwh dari jumlah tersebut yang terjual adalah 156.890.756 Kwh atau 83,65 %

Tabel 4.11 : Jumlah Produksi Listrik menurut Penggunaan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2003-2009

TAHUN	DIBANGKITKAN (KWH)	DISALURKAN (KWH)	TERJUAL (KWH)
2003	-	107,016,240	92,817,324
2004	122,612,121	90,002,121	81,407,607
2005	114,502,913	114,470,496	102,594,998
2006	123,150,074	126,894,826	110,998,520
2007	201,100,466	200,908,223	123,128,718
2008	347,873,765	347,873,765	300,394,225
2009	230,848,519	187,812,919	156,890,756

Sumber : Lampung Utara Dalam Angka 2010

Tabel 4.12 : Banyaknya Pelanggan, KVA terpasang, dan KWH terpasang di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2003-2009

TAHUN	Jumlah Pelanggan	KVA Terpasang	KWH Terpasang
2003	57,492	53,260	-
2004	48,677	46,996,100	-
2005	67,882	62,945	100,165,921
2006	62,985	62,823	121,838,455
2007	81,889	75,220	121,131,220
2008	89,514	86,947	141,923,096
2009	93,546	90,868	155,822,313

Sumber : Lampung Utara Dalam Angka 2010

Dikaitkan dengan pendapatan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memperoleh Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU). Besaran PPJU ini tergantung pada penggolongan tarifnya, sehingga Pemerintah Kabupaten Lampung Utara perlu memiliki perhitungan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah terutama PPJU dapat diterima sesuai yang seharusnya.

## 2. Air Bersih

Guna memenuhi kebutuhan akan air bersih dan sehat telah didirikan perusahaan air minum "Way Bumi " pada tahun 1982 di kabupaten Lampung Utara. Sampai dengan saat ini PDAM Way Bumi mampu menjangkau sambungan rumah sebanyak 4.382 di 7 (tujuh) kecamatan yang ada di Lampung utara. Dari jumlah tersebut baru 19 % cakupan pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat, air yang digunakan selama ini bersumber dari sungai, mata air dan air tanah dalam



dengan sistem pengairan menggunakan perpompaan dan gravitasi. Melihat masih banyak tuntutan masyarakat saat ini yang memerlukan air sebagai kebutuhan utama maka diperlukan sistem pengelolaan yang secara finansial tidak hanya berpihak kepada pemerintah namun yang lebih penting dapat menguntungkan masyarakat dalam hal kebutuhan air bersih dan sehat.

Saat ini di PDAM “Way Bumi” Lampung Utara telah disusun konsep perencanaan pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat. Dari perencanaan tersebut kebutuhan air bagi masyarakat di daerah perkotaan ditargetkan mencapai 80% sedangkan untuk daerah perdesaan kebutuhan air ditargetkan mencapai 60%. Dengan target yang direncanakan ini akan dapat menciptakan kinerja aparatur PDAM sebagai perwujudan pemberian pelayanan secara maksimal, kepada masyarakat.

### 2.5.5 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Jumlah pasar permanen di kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 sebanyak 19 dan toko permanen sebanyak 1.841 unit sedangkan untuk koperasi berjumlah 278 koperasi dengan jumlah anggota 52.235 orang dengan volume usaha 48.057.564 juta.

Tabel 4.13 : Banyaknya perusahaan / usaha yang telah terdaftar dirinci menurut jenis usaha tahun 2005-2008

Jenis Usaha		Jumlah Perusahaan				Jumlah Tenaga Kerja			
		2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008
1	PT/ CV Pemborong	62	86	112	138	496	616	784	966
2	Perusahaan								
	- Industri Besar	10	10	10	11	100	100	100	110
	- Industri Sedang	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Industri kecil	1,879	1,931	1,931	1,931	6,365	6,422	6,422	6,422
	- Kerajinan RT	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Hotel	5	5	5	5	10	10	10	10
4	Penginapan	1	1	1	1	5	5	5	5
5	Rumah Makan	18	27	30	35	80	116	150	175
6	Pertokoan								
	-Kelontong	99	105	157	163	198	210	314	326
	- Hasil Bumi	25	38	53	63	50	76	106	126
	- Kue	3	3	5	7	6	6	10	14
	- Sepatu	7	8	9	11	14	16	18	22

	- Meubelair	12	18	26	35	24	42	52	70
	- Alat Rumah Tangga	7	8	9	12	21	24	27	36
	- Alat Bangunan	4	12	21	21	8	26	42	42
	- Sepeda	7	8	8	8	14	15	16	16
	- Radio Elektronik	6	8	8	8	12	15	16	16
	- TV	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sub Deler Motor	7	11	11	11	35	55	55	55
8	Penjahit Pakaian	6	6	7	7	12	12	14	14
9	Panglong	18	18	18	27	54	54	54	54
10	Foto Studio	3	3	4	5	6	6	8	10
11	Perbengkelan	9	13	17	24	18	26	34	48
12	Reparasi TV/Radio	2	2	3	3	4	4	6	6
13	Reparasi Jam	4	4	5	5	4	4	5	5
	<b>TOTAL</b>	<b>2,194</b>	<b>2,325</b>	<b>2,450</b>	<b>2,531</b>	<b>7,536</b>	<b>7,860</b>	<b>8,248</b>	<b>8,548</b>

Sumber : Lampung Utara Dalam Angka 2010

Tabel 4.14 : Jumlah Hotel, Losmen Dirinci Menurut Banyaknya Kamar, Tenaga Kerja dan Rata-rata Tamu perhari tahun 2009

Hotel/ Losmen	Alamat	Kamar	Tempat Tidur	Tenaga Kerja	Tamu Per Hari
1. Hotel Cahaya	Kotabumi	38	67	22	8
2. Hotel Duta	Kotabumi	66	120	16	9
3. Hotel Surya Indah	Kotabumi	35	76	8	5
4. Hotel Srikandi	Kotabumi	23	40	7	7
5. Hotel Murni	Bukit Kemuning	18	18	2	4
6. Hotel Kemuning	Bukit Kemuning	18	18	4	4
<b>Jumlah</b>		<b>198</b>	<b>339</b>	<b>59</b>	<b>37</b>

Sumber : Lampung Utara Dalam Angka 2010

### 2.5.6 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Mobilitas masyarakat di Kabupaten Lampung Utara banyak ditunjang dengan sarana angkutan darat. Sarana perhubungan darat pada tahun 2009 terdiri dari 76,23 KM jalan negara, 176,60 KM jalan propinsi dan 2100,42 km jalan Kabupaten. Dari total jalan tersebut, yaitu sepanjang 2.353,25 km, 30,25 % dalam kondisi baik, 29,28 % kondisi sedang dan 40,47 % dalam kondisi rusak.

Tabel 4.15 : Panjang Jalan Menurut Permukaan Jalan di Kabupaten Lampung Utara tahun 2009

Jenis Jalan	Panjang Jalan (Km)					Panjang Jalan (%)				
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
<b>Negara</b>										
1. Aspal	40.53	20.70	15.00		76,23	53,17	27,15	19,68		100,00
2. Kerikil					0,00					
3. Hotmix					0,00					
<b>Provinsi</b>										
1. Aspal	16.40	62.55	97.65		176,60	9,29	35,42	55,29		
2. Kerikil					0,00					
3. Hotmix					0,00					
<b>Kabupaten</b>										
1. Aspal	542.90	167.03	146.21	125,00	98.14	53,33	17,02	14,90	12,74	
2. Kerikil	82.00	55.10	51.79	31.87	220.76	37,15	24,96	23,46	14,44	
3. Hotmix	79.37	123.18	13,09	11,78	227.42	34,90	54,16	5,76	5,18	
4. Batu	89.42	28.28	17.00	10,01	144.71	61,79	19,54	11,75	6,92	
5. Tanah	37.37	212.75	182,45	93.82	526.39	7,10	40,42	34,66	17,82	
<b>Jumlah</b>	<b>887.99</b>	<b>669.59</b>	<b>523,19</b>	<b>272.48</b>	<b>2.353,25</b>	<b>37,73</b>	<b>28,45</b>	<b>22,23</b>	<b>11,58</b>	

Tabel 4.16 : Banyaknya Kendaraan Roda Empat Menurut Jenisnya di Kabupaten Lampung Utara tahun 2005-2009

JENIS KENDARAAN	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
1 Opelet/Bus Mini, Mikrolet	758	766	785	747	852
2 Bus	32	32	39	84	72
3 Mobil Barang (truck, Pick Up, Tangki)	2,024	2,183	2,469	3,968	3,249

Sumber : Lampung Utara Dalam Angka 2010

Untuk angkutan perkotaan dan pedesaan berjumlah 13 trayek dengan jumlah kendaraan yang beroperasi sebanyak 718 kendaraan.

Prasarana transportasi darat yang ada di Kabupaten Lampung Utara selain jalan raya adalah rel kereta api. Kabupaten Lampung Utara memiliki beberapa stasiun kereta api di beberapa kecamatan yang turut mendukung mobilitas sumberdaya dari/dan ke wilayah ini.

Tabel 4.17 : Nama-Nama Stasiun Kereta Api Di Kabupaten Lampung Utara

No	Nama Stasiun KA	Lokasi
1.	Blambangan Pagar	Kec. Abung Selatan
2.	Kali Balangan	Kec. Abung Selatan
3.	Kotabumi	Kec. Kotabumi
4.	Cempaka	Kec. Sungkai Selatan
5.	Ketapang	Kec. Sungkai Selatan
6.	Negara Ratu	Kec. Sungkai Utara
7.	Tulungbuyut	Kec. Sungkai Utara

Sumber: Lampung Utara Dalam Angka 2010

## 2. Pos dan Telekomunikasi

Pos dan Telekomunikasi berperan dalam mendukung kelancaran transportasi barang, surat dan informasi ke berbagai penjuru. Jadi, terdapat berbagai unsur kepentingan masyarakat, yang di dalamnya termasuk dunia usaha dan pemerintah, baik dengan luar negeri maupun di dalam negeri. Kantor Pos dan Telekomunikasi yang terletak di pusat ibukota kabupaten menjadi bagian penting bagi masyarakat guna menunjang aktivitas sosial ekonomi yang senantiasa selalu meningkat. Perkembangan penerimaan dan pengiriman paket, benda pos, wesel pos dan surat, sebagai berikut:

Tabel 4.18 : Jumlah Pendapatan Penjualan Benda Pos, Materai dan Wesel Pos di Kantor Pos Kotabumi tahun 2003-2009

Tahun	Benda Pos (Rp. 000,-)	Materai (Rp. 000,-)	Wesel (Rp. 000,-)	
			Terima	Bayar
2003	584,420	2,725,650	23,960,156	28,395,460
2004	473,852	3,877,450	26,837,162	33,471,578
2005	496,825	3,177,075	53,053,976	22,102,719
2006	381,618	2,154,089	5,475,614	9,259,520
2007	52,793	2,636,800	23,866,943	7,143,156
2008	109,938	3,068,316	13,501,190	12,403,813
2009	90,567	3,133,333	15,557,639	17,760,622

Sumber: Lampung Utara Dalam Angka 2010

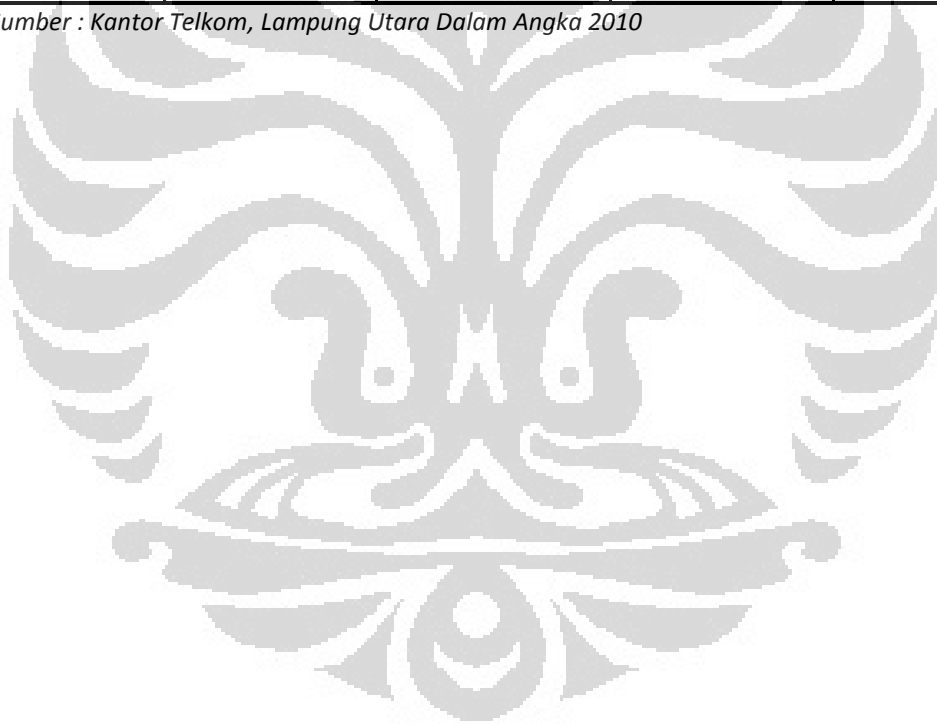
Sarana komunikasi lain yang tersedia di Kabupaten Lampung Utara adalah saluran telepon. Jumlah saluran telepon tetap juga cenderung mengalami peningkatan. Ketersediaan sarana komunikasi yang merupakan utilitas dasar ini

sangat dibutuhkan dalam mengakselerasi pembangunan, terutama untuk mempercepat mobilisasi informasi.

Tabel 4.19: Jumlah Saluran Telepon Tetap Menurut Kapasitas Sentral Wilayah Kotabumi Tahun 2000-2007

Tahun	Kapasitas	Saluran		
		Induk	Cabang	Jumlah
2000	8534	7201		7201
2001	8.534	7.201		7.201
2002	9.150	7.585		7.585
2003	10.350	8.892		8.892
2004	10.446	10.416		10.416
2005	10.446	10.283		10.283
2006	10.446	10.055		10.055
2007	10.446	10.055		10.055

Sumber : Kantor Telkom, Lampung Utara Dalam Angka 2010



## BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 5.1 Analisis Basis Ekonomi

Teori dasar dari model basis ekonomi berpandangan bahwa determinan pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan secara langsung dengan permintaan dari daerah lain, sehingga dengan adanya permintaan terhadap barang dan jasa merangsang pertumbuhan industri atau sektor sektor lain yang memanfaatkan sumber daya lokal, baik berupa tenaga kerja maupun material, yang pada gilirannya akan membangkitkan perekonomian daerah tersebut. Untuk melakukan analisis basis ekonomi salah satu metode yang digunakan adalah Analisis *Location Quotient* (LQ) yang bertujuan untuk mengetahui dan menentukan sektor ekonomi yang merupakan sektor basis dan non basis dan metode ini telah banyak digunakan karena cukup sederhana dan tidak memerlukan banyak data. Sektor basis merupakan sektor dengan kegiatan ekonomi yang hasil produksinya dapat melayani pasar baik di dalam maupun di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan sektor non basis merupakan sektor dengan kegiatan ekonomi yang hanya mampu menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat. Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa sehingga akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan mengurangi pendapatan suatu daerah dan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa akan menurunkan volume kegiatan .

Dalam proses perhitungannya analisis LQ menggunakan perbandingan antara kondisi perekonomian suatu wilayah dengan perekonomian acuan yang melingkupi daerah yang lebih luas (propinsi), dalam penelitian ini membandingkan antara perekonomian Kabupaten Lampung Utara dengan kondisi perekonomian Propinsi Lampung sebagai daerah acuan. Apabila hasil perhitungan menunjukkan angka lebih dari satu ( $LQ > 1$ ) berarti sektor atau sub sektor tersebut merupakan sektor basis. Sebaliknya apabila hasilnya

menunjukkan angka kurang dari satu ( $LQ < 1$ ) berarti sektor atau sub sektor tersebut merupakan sektor non basis. Hasil perhitungan LQ Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan data PDRB harga konstan tahun 2000 sebagai berikut:

### 5.1.1 Sektor Pertanian

Tabel 5.1 Hasil Perhitungan Indeks *Location Quotient* (LQ) sektor Pertanian Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010

Sektor / sub sektor	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	rata-rata
Pertanian	1,07	1,05	1,03	1,00	0,98	0,94	0,92	0,89	0,90	0,92	0,96	0,97
1. Tanaman Makanan	0,90	0,88	0,90	0,87	0,83	0,80	0,82	0,83	0,83	0,87	0,91	0,86
2. Tanaman perkebunan	1,84	1,82	1,60	1,55	1,61	1,57	1,55	1,49	1,46	1,48	1,55	1,59
3. Peternakan	1,07	1,05	1,12	1,13	1,12	1,11	1,06	1,05	1,03	0,94	0,95	1,06
4. Kehutanan	1,11	1,02	1,09	1,30	1,60	1,43	1,36	1,23	1,47	1,51	1,52	1,33
5. Perikanan	0,15	0,16	0,18	0,18	0,17	0,15	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,15

Sumber : Data hasil perhitungan

Berdasarkan hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ) pada sektor pertanian dalam kurun waktu tahun 2000-2010 maka secara rata-rata sektor pertanian bukan merupakan sektor basis karena nilai LQ nya  $< 1$ , hal ini terlihat dari perkembangan nilai LQ di mana pada tahun 2000 sektor ini termasuk sektor basis sampai tahun 2003, dan mulai tahun 2004 sampai tahun 2010 sektor ini bukan merupakan sektor basis lagi. Hal tersebut menandakan mulai tahun 2004 peranan sektor pertanian Kabupaten Lampung Utara mengalami penurunan dan kontribusinya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat propinsi Lampung. Sehingga secara sektoral, sektor pertanian tidak mempunyai kemampuan ekspor ke luar daerah terutama pada sub sektor tanaman makanan dan sub sektor perikanan yang nilai LQnya hanya 0,15 sebagai mana terlihat dalam tabel 5.1. Hal ini salah satunya disebabkan oleh luas lahan persawahan yang tidak begitu luas yaitu hanya 16,232 Ha dan 256,331 Ha lahan kering dengan produksi komoditas padi hanya 155,697 ton / tahun dan jumlah tenaga kerja pada sektor perikanan hanya 2,952 orang dengan produksi ikan 3.925 ton/ tahun.

Sub sektor tanaman perkebunan nilai LQnya secara rata-rata adalah 1,59 yang menandakan sub sektor ini merupakan sektor basis, dan jika dilihat dari perkembangan LQnya selama 10 tahun sub sektor ini nilai LQnya selalu lebih dari satu serta memberikan kontribusi PDRB rata-rata sebesar 17 % dari beberapa komoditi perkebunan yang dominan, antara lain pada jenis perkebunan besar (secara urutan dari besar ke kecil: komoditas tebu, kelapa sawit, kakau dan karet) dan jenis perkebunan rakyat (secara urutan dari besar ke kecil: lada hitam, kopi, dan karet).

Sub sektor peternakan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 nilai LQ nya lebih dari 1, berarti sub sektor ini merupakan sub sektor basis bagi Kabupaten Lampung Utara dan memiliki keunggulan komparatif, jika di lihat dari wilayah peternakan hampir semua kecamatan memiliki produksi peternakan dengan jumlah petani ternak sebanyak 14.729 orang. Dan jenis ternak yang mendominasi untuk ternak besar adalah jenis ternak kambing dengan produksi 49.347 ekor kemudian sapi 20.460 ekor dan ternak unggas dengan produksi sebesar 1.895.289 ekor pada tahun 2009

Nilai rata-rata LQ sub sektor kehutanan 1,33, ini berarti sub sektor kehutanan merupakan sektor basis, yang tentunya dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat dan mendorong sub sektor lainnya, walaupun sub sektor ini merupakan sub sektor basis akan tetapi kontribusinya masih sangat kecil bagi pembentukan PDRB yaitu hanya sebesar 0,5 %, dengan luas hutan 29.100 Ha hutan lindung dan 10.055 hutan produksi dengan produksi 54.704 M<sup>3</sup> kayu, 1.250 ton arang dan 500 ton damar pada tahun 2009, dan hanya ada pada 4 kecamatan yaitu kecamatan tanjung raja, bukit kemuning, abung tinggi dan kecamatan abung pekurun.

### 5.1.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.2 nilai LQ rata-rata Sektor pertambangan dan penggalian selama tahun 2000-2010 adalah 0,29 dan kurang dari 1, berarti sektor ini merupakan sektor non basis bagi perekonomian Kabupaten Lampung Utara dan jika di lihat dari kontribusinya sebesar 0,67 %.



Tabel 5.2 Hasil Perhitungan Indeks Location Quotient (LQ) sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010

Sektor / sub sektor	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	rata-rata
Pertambangan dan Penggalian	0,26	0,27	0,17	0,17	0,24	0,24	0,31	0,33	0,35	0,35	0,44	0,29
1. Galian C	0,58	0,60	0,61	0,62	0,61	0,63	0,74	0,75	0,76	0,89	0,93	0,7

Sumber : Data hasil perhitungan

Berdasarkan data tabel di atas ternyata Kabupaten Lampung Utara hanya memiliki 1 sub sektor pertambangan dan penggalian yaitu sub sektor penggalian dengan nilai LQ 0,7 sehingga secara rata-rata sub sektor penggalian bukan merupakan sektor basis akan tetapi di lihat dari perkembangan LQnya sub sektor ini berpotensi untuk menjadi basis terutama pada penggalian pasir, tanah liat dan batu batuan

### 5.1.3 Sektor Industri Pengolahan

Tabel 5.3 Hasil Perhitungan Indeks *Location Quotient* (LQ) sektor industri Pengolahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010

Sektor / sub sektor	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	rata-rata
Industri Pengolahan	0,94	0,93	0,93	0,92	0,97	0,99	1,05	1,12	1,11	1,08	1,07	1,01
1. Makanan, minuman & tembakau	1,08	1,06	1,02	1,03	1,07	1,11	1,15	1,23	1,18	1,16	1,14	1,11
2. Barang kayu dan hasil hutan lainnya	0,30	0,32	0,33	0,33	0,39	0,38	0,51	1,02	1,76	2,03	2,16	0,87
3. Kertas dan barang cetakan	10,20	11,52	13,37	10,06	12,58	12,18	14,49	15,37	8,70	9,00	9,64	11,56
4. Semen dan barang galian bukan logam	1,02	1,05	1,24	1,08	1,14	1,23	1,24	1,15	2,42	2,71	2,71	1,54
5. Barang Lainnya	0,84	1,32	0,66	1,15	0,70	1,02	1,04	0,69	0,81	0,84	0,79	0,89

Sumber : Data hasil perhitungan

Berdasarkan tabel di atas nilai LQ sektor industri pengolahan secara rata-rata selama 10 tahun adalah sebesar 1,01, karena nilai LQ >1 maka sektor ini merupakan sektor basis, yang berarti sektor industri pengolahan mempunyai

kemampuan ekspor ke luar daerah Kabupaten Lampung Utara, dan jika di lihat dari perkembanganya sektor ini mulai menjadi sektor basis dari tahun 2006 sampai tahun 2010. Dilihat dari sub sektor penyusunnya sektor industri pengolahan yang di miliki Kabupaten Lampung Utara hanya jenis industri bukan migas. Berdasarkan perhitungan LQ pada sub sektornya terdapat 3 sub sektor basis yaitu sub sektor makanan, minuman dan tembakau dengan nilai LQ 1,11, sub sektor kertas dan barang cetakan dengan nilai LQ 11,56 dan sub sektor semen & barang galian bukan logam dengan nilai LQ 1,54

#### 5.1.4 Sektor listrik, Gas dan Air bersih

Tabel 5.4 Hasil Perhitungan Indeks *Location Quotient* (LQ) Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010

Sektor / sub sektor	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	rata-rata
listrik, gas dan Air bersih	0,77	1,16	1,96	2,28	2,18	2,12	2,02	1,88	1,85	1,87	1,76	1,80
1. Listrik	0,58	1,25	2,54	2,87	2,71	2,59	2,35	2,17	2,19	2,17	2,04	2,13
2. Air Bersih	1,23	0,98	0,52	0,57	0,46	0,46	0,38	0,36	0,30	0,33	0,29	0,54

Sumber : Data hasil perhitungan

Berdasarkan hasil analisis LQ pada sektor Listrik, gas dan air bersih seperti terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor basis karena rata-rata nilai LQnya  $> 1$  dan jika di lihat dari sub sektor pembentuknya sub sektor listrik yang merupakan sub sektor basis dengan nilai LQ sebesar 2,13, sub sektor ini menjadi sumber energi bagi kegiatan ekonomi sektor sektor yang lainnya terutama sektor industri pengolahan dan industri jasa jasa, sehingga permintaan sub sektor listrik akan terus meningkat sedangkan sub sektor air bersih merupakan sub sektor non basis.

#### 5.1.5 Sektor Bangunan

Tabel 5.5 Hasil Perhitungan Indeks *Location Quotient* (LQ) Sektor Bangunan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010

Sektor / sub sektor	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	rata-rata
Bangunan	0.71	0.78	0.77	0.79	0.83	0.88	0.94	0.94	0.96	0.97	1.00	0.87

Untuk sektor bangunan Kabupaten Lampung Utara selama 10 (sepuluh) tahun secara rata-rata nilai LQnya sebesar 0,87 hal ini menunjukkan bahwa sektor bangunan belum menjadi sektor basis karena nilai LQnya  $<1$  akan tetapi berdasarkan perkembangan nilai LQnya sektor ini mengalami peningkatan dan kemungkinan di masa yang akan datang sektor ini akan menjadi sektor basis

#### 5.1.6 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Hasil analisis LQ terhadap sektor perdagangan, hotel dan restoran menunjukkan sektor tersebut mempunyai nilai LQ  $> 1$  sehingga sektor ini termasuk dalam sektor basis selama periode tahun 2000-2010 seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.6 Hasil Perhitungan Indeks *Location Quotient* (LQ) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010

Sektor / sub sektor	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	rata-rata
Perdagangan, hotel & restoran	0,99	0,99	1,02	1,05	1,12	1,12	1,14	1,10	1,10	1,08	1,08	1,07
1. Perdagangan besar dan eceran	0,99	0,99	1,02	1,06	1,14	1,13	1,16	1,14	1,11	1,08	1,10	1,08
2. Hotel	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
3. Restoran	1,05	1,09	1,02	1,01	1,02	1,04	1,03	1,03	1,06	1,04	1,00	1,03

Sumber : Data hasil perhitungan

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sub sektor yang menjadi sub sektor basis yaitu sub sektor perdagangan besar dan eceran dengan nilai LQ sebesar 1,08 dan sub sektor restoran dengan nilai LQ 1,03 sedangkan sub sektor hotel bukan merupakan sub sektor basis dan hanya terdapat 6 hotel dan losmen.

#### 5.1.7 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Hasil analisis LQ pada sektor pengangkutan dan komunikasi seperti terlihat pada tabel 5.7 menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor non basis karena nilai rata-rata LQ selama tahun 2000-2010 hanya sebesar 0,9 masih kurang dari 1 akan tetapi jika dilihat dari *trendnya* sektor ini menunjukkan peningkatan nilai LQ sehingga sektor ini masih berpotensi untuk menjadi sektor basis. Sedangkan jika dilihat dari sub sektornya hanya sub sektor angkutan jalan

raya yang menjadi sub sektor basis dengan nilai LQ 1, 39 seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5.7 Hasil Perhitungan Indeks *Location Quotient* (LQ) Sektor Pengangkutan dan Komunkasi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010

Sektor / sub sektor	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	rata-rata
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	0.83	0.85	0.88	0.87	0.87	0.87	0.86	0.99	1.00	0.97	0.90	0.90
1. Angkutan Jalan Rel	0.58	0.55	0.55	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.17
2. Angkutan Jalan Raya	1.19	1.20	1.32	1.34	1.34	1.35	1.32	1.58	1.63	1.55	1.48	1.39
3 Pos dan Telekomunikasi	0.78	0.82	0.83	0.86	0.86	0.86	0.84	0.83	0.82	0.77	0.69	0.81

Sumber : Data hasil perhitungan

Sedangkan untuk sub sektor pos dan telekomunikasi nilai LQnya sebesar 0,81 sehingga sub sektor ini bukan merupakan sub sektor basis dan jika di lihat dari total penerimaan dari benda pos dan materai pada tahun 2009 hanya sebanyak 3. 223 juta.

#### 5.1.8 Sektor Keuangan Real Estat dan Jasa Perusahaan

Hasil Analisis LQ untuk sektor keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan serta sub sektor pembentuknya terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.8 Hasil Perhitungan Indeks *Location Quotient* (LQ) untuk sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010

Sektor / sub sektor	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	rata-rata
KEU. REAL ESTAT, & JASA PERUSAHAAN	1.22	1.29	1.29	1.35	1.10	1.18	1.08	1.03	0.95	0.94	0.83	1.11
a. Bank	2.27	67.44	7.11	2.18	1.24	1.37	1.02	0.93	0.76	0.81	0.67	7.80
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.34	0.35	0.37	0.38	0.42	0.46	0.51	0.52	0.50	0.48	0.44	0.43
c. Real Estat	1.24	1.23	1.22	1.18	1.08	1.12	1.16	1.15	1.20	1.11	1.10	1.16
d. Jasa Perusahaan	1.41	1.61	1.63	1.47	1.61	1.56	1.54	1.45	1.47	1.38	1.35	1.50

Sumber : Data hasil perhitungan

Dari tabel di atas terlihat bahwa sektor Keuangan, real estat dan jasa perusahaan secara rata-rata mempunyai nilai LQ sebesar 1,11 hal ini berarti sektor ini merupakan sektor basis, sedangkan dilihat dari sub sektornya terdapat 3 sub sektor yang menjadi basis yaitu sub sektor perbankan, sub sektor *real estat* dan sub sektor jasa perusahaan

### 5.1.9 Sektor Jasa-Jasa

Hasil Analisis LQ pada sektor jasa-jasa menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor basis karena nilai LQnya  $>1$ , secara rata-rata nilai LQ sektor ini sebesar 1,12 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5.9 Hasil Perhitungan Indeks *Location Quotient* (LQ) untuk sektor jasa-jasa Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010

Sektor / Sub sektor	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	rata-rata
JASA-JASA	1.01	1.03	1.05	1.06	1.08	1.15	1.15	1.17	1.21	1.20	1.20	1.12
<b>a. Pemerintahan Umum</b>												
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	1.01	1.05	1.08	1.09	1.10	1.18	1.20	1.20	1.24	1.24	1.28	1.15
2. Jasa Pemerintah lainnya	1.01	1.05	1.08	1.09	1.10	1.18	1.20	1.20	1.26	1.27	1.30	1.16
<b>b. Swasta</b>												
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	0.57	0.61	0.65	0.69	0.78	0.76	0.74	0.80	0.81	0.72	0.63	0.71
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	1.11	1.13	1.07	0.96	0.92	0.95	0.94	1.02	0.94	0.96	0.86	0.99
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	1.48	1.24	1.18	1.20	1.23	1.28	1.26	1.33	1.42	1.41	1.39	1.31

Sumber : Data hasil perhitungan

Sedangkan dilihat dari sub sektornya terdapat 3 sub sektor yang menjadi basis yaitu sub sektor administrasi pemerintahan dan pertahanan dengan nilai LQ 1,15, sub sektor Jasa Pemerintahan Lainnya dengan nilai LQ 1,16, dan sub sektor jasa perorangan dan rumah tangga dengan masing masing nilai LQ 1,31

Dari 9 sektor pembentuk PDRB terdapat 5 sektor yang mempunyai rata-rata nilai LQ  $> 1$  yang merupakan sektor basis bagi Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan pendekatan LQ yang membandingkan peranan setiap sektor Kabupaten Lampung Utara dengan peranan setiap sektor tingkat propinsi Lampung selama periode tahun 2000-2010 yaitu sektor industri pengolahan, sektor

listrik, gas dan air bersih, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Keuangan Real Estat dan Jasa Perusahaan dan sektor Jasa-jasa

Sedangkan sub sektor yang menjadi basis ada 16 sub sektor dari 30 sub sektor yang ada dalam struktur ekonomi Kabupaten Lampung utara seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel. 5.10 Sektor/ Sub sektor Basis Kabupaten Lampung Utara selama priode Tahun 2000-2010

No	Sektor	Sub sektor Basis
1.	Pertanian ( bukan Basis )	1. Tanaman Perkebunan 2. Peternakan 3. Kehutanan
2	Industri Pengolahan ( basis )	1. Industri Makanan, minuman dan tembakau 2. Kertas dan barang cetakan 3. Semen, barang galian bukan logam
3	Listrik, Gas dan Air Bersih ( basis )	1. Listrik
4	Perdagangan, Hotel dan restoran ( Basis )	1. Perdagangan Besar dan eceran 2. Restoran
5	Pengangkutan dan komunikasi ( bukan basis )	1. Pengangkutan Jalan Raya
6	Keuangan, Rel Estat dan Jasa Perusahaan ( Basis )	1. Perbankan 2. Rel Estat 3. Jasa Perusahaan
7	Jasa Jasa ( Basis )	1. Administrasi pemerintahan dan pertahanan 2. Jasa Pemerintahan Lainnya 3. Jasa perorangan dan rumah tangga

Sumber : Data hasil olahan

## 5.2 Analisis Efek Pengganda Basis (*Basis Multiplier*)

Seperti pada metode ekonomi basis lainnya. Analisis pengganda diperlukan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh adanya input sektor basis. Dan dalam hal ini sektor basis adalah sektor yang berpotensi untuk melakukan ekspor atau sektor yang memiliki  $LQ > 1$ , dan besarnya nilai potensi ekspor/ kapasitas ekspor untuk masing masing sektor basis terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.11 : Kapasitas Ekspor untuk sub sektor basis Kabupaten Lampung Utara dalam kurun waktu tahun 2000-2010 ( jutaan )

Sektor/sub sektor	PDRB Rata-rata	LQ	Kapasitas Ekspor
1. PERTANIAN			
a. Tanaman Bahan Makanan	463,397	0.86	
b. Tanaman Perkebunan	437,354	1.59	162,839
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	137,112	1.06	7,237
d. Kehutanan	14,651	1.33	3,650
e. Perikanan	23,338	0.15	
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN			
a. Penggalian	20,492	0.71	
3. INDUSTRI PENGOLAHAN			
a. Industri Bukan Migas			
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	310,854	1.11	31,424
2. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	13,417	0.87	
3. Kertas dan Barang Cetak	17,653	11.56	16,125
4. Semen & Brg. Galian bukan logam	19,638	1.54	6,921
5. Barang lainnya	1,637	0.89	
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH			
a. Listrik	16,320	2.13	8,662
b. Air Bersih	1,115	0.54	
5. KONSTRUKSI	117,328	0.87	
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN			
a. Perdagangan Besar & Eceran	416,227	1.08	32,051
b. Hotel	168	0.08	
c. Restoran	35,895	1.03	1,207
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI			
a. Pengangkutan			
1. Angkutan Jalan Rel	228	0.17	
2. Angkutan Jalan Raya	119,230	1.39	33,505
3. Jasa Penunjang Angkutan	45	0.00	
b. Komunikasi			
1. Pos dan Telekomunikasi	29,060	0.81	
8. KEU. REAL ESTAT, & JASA PERUSAHAAN			
a. Bank	65,315	7.80	56,941
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	4,387	0.43	
c. Real Estat	107,640	1.16	15,195
d. Jasa Perusahaan	5,054	1.50	1,681
9. JASA-JASA			
a. Pemerintahan Umum			
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	126,594	1.15	16,544

2. Jasa Pemerintah lainnya	65,070	1.16	8,843
b. Swasta			
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	16,058	0.71	
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	1,392	0.99	
3. Jasa Perorangan & Rumahtangga	29,991	1.31	7,122
JUMLAH	2,616,660		409,948
Multiplier Sektor Basis ( jumlah Total PDRB / jumlah Potensi Ekspor )			6.38

Sumber : Data hasil perhitungan

Berdasarkan hasil perhitungan efek pengganda sektor/sub sektor basis yang terlihat pada tabel 5.11 bahwa koefisien pengganda pendapatan sektor/sub sektor basis menunjukkan nilai rata-rata sebesar 6,38 hal ini mengandung pengertian bahwa sub sektor sub sektor basis ini mampu memberikan dampak terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Utara sebesar 6,38 kali dari kenaikan output yang dihasilkan sektor basis, yang berarti jika ada kenaikan 1 rupiah pada sektor basis maka kenaikan PDRB sebesar 6,38 rupiah.

Dari 16 sub sektor basis yang berpotensi produk lokalnya untuk diekspor dengan nilai kapasitas ekspor yang paling besar adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan potensi ekspor sebesar 162.839 juta terutama untuk komoditas tebu, sawit, karet kopi dan lada. Kemudian dari hasil perhitungan tabel di atas juga terlihat bahwa urutan jumlah produk yang dapat di ekspor tidak sama dengan urutan nilai LQ. Hal ini berarti meskipun suatu sektor memiliki keunggulan lokasi dan potensi ekspor yang cukup tinggi, namun nilai produk ekspornya tetap tergantung pada total volume produksi sektor tersebut.

### 5.3 Analisis *Shift Share*

Analisis *Shift share* digunakan untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara dikaitkan dengan perekonomian daerah yang menjadi *refrensi* dalam kurun waktu tahun 2000- 2010, yaitu propinsi Lampung. Analisis *shift share* digunakan dengan pendekatan yang menggabungkan dual hal pokok yaitu unsur spasial dan unsur sektoral yang di terapkan dalam kerangka dimensi waktu.

Berdasarkan Perhitungan dengan menggunakan metode *shift share* terhadap sektor sektor pembentuk PDRB Kabupaten Lampung Utara selama tahun 2000-2010 sebagai berikut :



## 5.3.1 Sektor Pertanian

Tabel 5.12 Hasil Analisis *Shift Share* Sektor Pertanian Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010

SEKTOR/SUB SEKTOR	Regional Share	Proportional Share	Differential Share	Growth
<b>PERTANIAN</b>	649,786	(232,547)	(139,657)	277,582
1. Tanaman Bahan Makanan	262,897	(104,713)	9,684	167,868
2. Tanaman Perkebunan	286,516	(118,152)	(93,545)	74,819
3. Peternakan dan Hasil-hasilnya	85,490	(58,815)	(17,306)	9,369
4. Kehutanan	3,098	7,687	5,774	16,559
5. Perikanan	11,785	1,664	(4,483)	8,967

*Data hasil perhitungan*

Berdasarkan Hasil Analisis *Shift Share* pada sektor pertanian terlihat pada tabel 5.12 bahwa sektor pertanian selama 10 tahun mengalami tingkat pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 277.582 juta yang di susun dari komponen *share* dan komponen *shift*. Komponen *share* merupakan kondisi pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Propinsi Lampung selama tahun 2000-2010 yang berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor pertanian Kabupaten Lampung Utara sebesar 649.786 juta dengan diasumsikan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara tumbuh pada tingkat pertumbuhan yang sama dengan pertumbuhan Propinsi Lampung. Tapi pada kenyataanya pertumbuhan ekonomi Lampung Utara juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, sehingga terjadi simpangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang disebabkan faktor *share* tadi. Hal ni terlihat pada komponen *Shift* baik *proportional shift* maupun *differential shift*. Pada *proportional Shift* menunjukkan angka negatif sebesar -232,547 hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian di wilayah propinsi Lampung pertumbuhanya lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi propinsi Lampung sehingga berdampak pada sektor pertanian di kabupaten Lampung Utara . Sedangkan nilai *Differential Shift* pada sektor pertanian bernilai negative -139,657 menunjukkan bahwa sektor pertanian Kabupaten Lampung Utara tumbuh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan sektor pertanian di tingkat propinsi Lampung sehingga berdampak pada pengkoreksian komponen *share*, sehingga secara sektoral sektor ini tidak mempunyai keunggulan kompetitif / lokasi.

Hasil analisis shift share pada tabel 5.12 juga dilakukan pada sub-sub sektor pertanian untuk mengetahui sub-sub sektor yang tumbuh lebih pesat/ lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dipropinsi Lampung, serta sub sub sektor yang tumbuh lebih pesat/lambat di bandingkan sub sektor di tingkat Propinsi Lampung. Pada Tabel 5.12 kolom growth terlihat bahwa semua sub sektor selama 10 tahun mengalami pertumbuhan yang positif. Dan Jika di lihat pada komponen *Proportional Shift* terdapat hanya dua sub sektor yang tumbuh pesat di tingkat propinsi Lampung yaitu sub sektor kehutanan dengan nilai *proportional shift* 7.687 dan sub sektor perikanan dengan nilai 1,664 yang berarti adanya penambahan 1.664 juta pada sub sektor perikanan yang diakibatkan pertumbuhan sektor perikanan lebih pesat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi propinsi Lampung secara keseluruhan, sedangkan sub sektor lainya tumbuh lambat di tingkat propinsi.

Dan berdasarkan perhitungan komponen *differential Shift* terdapat 2 sub sektor yang bernilai positif yaitu sub sektor tanaman bahan makanan dan sub sektor kehutanan yang berarti sub sektor kehutanan dan sub sektor tanaman bahan makanan tumbuh lebih pesat dibandingkan sub sektor yang sama di tingkat propinsi Lampung, sehingga sub sektor ini mempunyai keunggulan kompetitif atau jika ditinjau secara spasial mempunyai keunggulan lokasi.

### 5.3.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian

Tabel 5.13 Hasil Analisis *Shift Share* Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010

SEKTOR/SUB SEKTOR	Regional Share	Proportional Share	Differential Share	Growth
Pertambangan & Penggalian	9,267	(6,708)	11,507	14,066
1. Penggalian	9,267	(5,948)	10,747	14,066

*Data hasil perhitungan*

Berdasarkan hasil analisis *shift share* pada sektor pertambangan dan penggalian terlihat bahwa sektor ini hanya memiliki satu sub sektor yaitu sub sektor penggalian yang selama 10 tahun (2000-2010) mengalami pertumbuhan sebesar 14.066 juta yang berasal dari *regional share* sebesar 9.267 juta yang diasumsikan pertumbuhan ekonomi Lampung Utara sama dengan pertumbuhan

ekonomi tingkat propinsi Lampung. Dilihat dari *proportional share* bernilai - 6.708, hal ini menunjukkan bahwa sektor ini tumbuh lambat dipropinsi Lampung. kemudian dilihat dari nilai *differential positif* berarti sub sektor penggalian tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sub sektor penggalian di tingkat propinsi Lampung, sehingga sub sektor penggalian mempunyai keunggulan kompetitif.

### 5.3.3 Sektor Industri Pengolahan

Tabel 5.14 Hasil Analisis *Shift Share* Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010

SEKTOR/SUB SEKTOR	Regional Share	Proportional Share	Differential Share	Growth
<b>Industri Pengolahan</b>	170,835	2,213	65,334	238,382
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	145,290	37,194	23,583	206,066
2. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	6,209	(12,937)	16,861	10,132
3. Kertas dan Barang Cetak	8,504	3,543	(1,322)	10,725
4. Semen & Brg. Galian bukan logam	10,005	(15,537)	16,187	10,654
5. Barang lainnya	828	89	(113)	805

*Data hasil perhitungan*

Berdasarkan hasil perhitungan Analisis *Shift share* pada tabel di atas terlihat bahwa sektor industri pengolahan mengalami dampak pertumbuhan sebesar 170,835 juta jika pertumbuhan ekonomi Lampung Utara sama dengan pertumbuhan ekonomi propinsi Lampung, dan karena sektor industri tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi propinsi Lampung berdampak positif pada sektor industri pengolahan di Kabupaten Lampung Utara, dan jika dilihat nilai *differential shift* yang positif sebesar 65,334 juta menunjukkan bahwa sektor ini tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat propinsi Lampung sehingga sektor industri pengolahan Kabupaten Lampung Utara mempunyai keunggulan kompetitif dengan nilai pertumbuhan selama 10 tahun sebesar 238,382 juta

Jika di lihat dari sub sektornya terdapat sub sektor yang yang tumbuh pesat di tingkat propinsi Lampung yang di tandai dengan nilai *proportional shift* yaitu sub sektor makanan, minuman dan tembakau, sub sektor barang kayu & hasil hutan lainnya, sub sektor kertas dan barang cetakan, sub sektor barang lainnya

Dilihat dari komponen *differential shift* terdapat 3 sub sektor yang bertanda positif yang menunjukkan bahwa sub-sub sektor tersebut tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sub-sub sektor yang sama di tingkat propinsi lampung yaitu sub sektor Makanan, Minuman dan Tembakau, sub sektor Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya, sub sektor Semen & Brg. Galian bukan logam

#### 5.3.4 Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih

Tabel 5.15 Hasil Analisis *Shift Share* Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010

SEKTOR/SUB SEKTOR	Regional Share	Proportional Share	Differential Share	Growth
Listrik, Gas & Air Bersih	3,496	1,040	12,872	17,408
1. Listrik	1,873	1,502	15,896	19,270
2. Air Bersih	1,623	(1,536)	(1,949)	(1,862)

*Data hasil perhitungan*

Berdasarkan hasil analisis *shift share* pada tabel di atas terhadap sektor Listrik, gas dan air bersih selama periode 2000-2010 terjadi pertumbuhan sektoral sebesar 17.408 juta yang didekomposisikan dari regional share sebesar 3.496 juta dan karena sektor ini tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi di tingkat propinsi Lampung sehingga berdampak pada peningkatan nilai pertumbuhan sektor sebesar 1.040 juta, dan jika di lihat dari nilai *differential shift* yang positif menandakan sektor listrik, gas dan air bersih tumbuh lebih cepat di bandingkan dengan sektor yang sama di tingkat propinsi dalam periode tahun 2000-2010, dan nilai pergeseran tersebut sebesar 12,872 juta sehingga sektor ini mempunyai keunggulan kompetitif.

Di lihat dari sub sektornya hanya ada 2 sub sektor yang dimiliki yaitu sub sektor Listrik dan sub sektor air bersih sedangkan sub sektor gas tidak dimiliki kabupaten Lampung Utara, untuk sub sektor listrik mengalami pertumbuhan yang cukup besar senilai 19.270 juta yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi regional sebesar 1.873 juta dan mengalami pergeseran sebesar 1.502 juta di karenakan sub sektor listrik tumbuh cepat di propinsi. Dan jika di lihat dari nilai *differential shift* bernilai positif 15.896 juta yang menunjukkan sub sektor listrik mempunyai keunggulan kompetitif karena tumbuh lebih cepat dibandingkan sub sektor yang sama di tingkat propinsi berbeda dengan sub sektor air bersih justru

mengalami pertumbuhan yang negative sebesar 1.862 Juta selama priode tahun 2000-2010 dan jika dilihat di tingkat propinsi lampung sub sektor air bersih tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan sehingga mengurangi komponen share sebesar 1.356 juta, dan ternyata sub sektor ar bersih di Kabupaten Lampung Utara tumbuh lebih lambat di bandingkan dengan tingkat propinsi sehingga mengurangi lagi komponen share sebesar 1.949 juta sehingga sub sektor ini tidak memiliki keunggulan kompetitif.

### 5.3.5 Sektor Bangunan

Tabel 5.16: Hasil Analisis *Shift Share* Sektor Bangunan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010

SEKTOR/SUB SEKTOR	Regional Share	Proportional Share	Differential Share	Growth
Konstruksi	49,619	(9,564)	48,644	88,699

*Data hasil perhitungan*

Berdasarkan hasil analisis *shift share* pada tabel di atas terhadap sektor kontruksi selama priode 2000-2010 terjadi pertumbuhan sektoral sebesar 88.699 juta yang di dekomposisikan dari regional share sebesar 49.619 juta dan karena sektor ini tumbuh lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi di tingkat propinsi Lampung sehingga berdampak pada pengurangan nilai pertumbuhan sektor sebesar 9.564 juta, dan jika di lihat dari nilai *differential shift* yang positif menandakan sektor bangunan tumbuh lebih cepat di bandingkan dengan sektor yang sama di tingkat propinsi dalam priode tahun 2000-2010, dan nilai pergeseran tersebut sebesar 48.644 juta sehingga sektor ini mempunyai keunggulan kompetitif.

### 5.3.6 Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran

Tabel 5.17 Hasil Analisis Shift Share Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010

SEKTOR/SUB SEKTOR	Regional Share	Proportional Share	Differential Share	Growth
Perdag., hotel & restoran	210,679	7,434	50,325	268,438
1. Perdagangan Besar & Eceran	191,890	7,763	51,797	251,450
2. Hotel	96	(23)	(9)	64
3. Restoran	18,693	(36)	(1,733)	16,924

*Data hasil perhitungan*

Hasil perhitungan *shift share* sektor Perdagangan Hotel dan Restoran Kabupaten Lampung Utara tahun 2000-2010 pada tabel di atas, sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 268.438 Juta. Dan jika di lihat dari sub sektor pembentuknya pertumbuhan sektor tersebut sebagian besar berasal dari sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang menyumbang sebesar 93,6 % dan sub sektor hotel hanya menyumbang 0.0002 %.

Jika di lihat dari komponen *proportional shift* terdapat nilai komponen *proportional shift* positif, yaitu hanya sub sektor perdagangan besar dan eceran sedangkan sub sektor hotel dan restoran bernilai negative menunjukkan pertumbuhan sub sektor ini tumbuh lebih lambat di tingkat propinsi Lampung. Dan jika di lihat dari komponen *differential shift* sub sektor perdagangan besar dan eceran bernilai positif 51.797 juta hal ini menunjukkan adanya ke unggulan kompetitif pada sub sektor ini. Sedangkan sub sektor hotel dan restoran bernilai *differential shift* negative sehingga sub sektor ini tumbuh lebih lambat dibandingkan sub sektor yang sam di tingkat propinsi lampung.

### 5.3.7 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Tabel 5.18 Hasil Analisis Shift Share Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010

SEKTOR/SUB SEKTOR	Regional Share	Proportional Share	Differential Share	Growth
Pengangkutan & Komunikasi	62,121	51,301	18,278	131,700
a. Pengangkutan				
1. Angkutan Jalan Rel	191	5,436	(5,714)	(87)
2. Angkutan Jalan Raya	52,846	8,864	34,990	96,700
3. Jasa Penunjang Angkutan	20	4	17	41
b. Komunikasi				
1. Pos dan Telekomunikasi	9,064	32,179	(6,197)	35,046

Sumber : data hasil perhitungan

Hasil perhitungan *shift share* Sektor pengangkutan dan komunikasi Kabupaten Lampung Utara tahun 2000-2010 pada tabel di atas, sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 131.700 Juta. Dan jika di lihat dari sub sektor pembentuknya pertumbuhan sektor tersebut sebagian besar berasal dari sub sektor angkutan jalan raya yang menyumbang sebesar 73,4 % dan sub sektor pos dan telekomunikasi menyumbang 26,6 %. Jika dilihat dari dekomposisinya regional

share sebesar 62.121 juta dan karena sektor ini tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi di tingkat propinsi Lampung sehingga berdampak pada peningkatan nilai pertumbuhan sektor sebesar 51.301 juta, dan jika di lihat dari nilai *differential shift* yang positif menandakan sektor Pengangkutan dan Komunikasi tumbuh lebih cepat di dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat propinsi dalam priode tahun 2000-2010, dan nilai pergeseran tersebut sebesar 18.278 juta sehingga sektor ini mempunyai keunggulan kompetitif.

Di lihat dari komponen *proportional shift* semua sub sektor bernilai positif hal ini berarti semua sub sektor pada tabel. 5.18 tumbuh lebih pesat di dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di propinsi Lampung, sedangkan di lihat dari *differential shift* sub sektor angkutan jalan raya dan jasa penunjang angkutan yang bernilai positif, hal ini menunjukkan sub sektor angkutan jalan raya dan penunjang angkutan mempunyai keunggulan kompetitif

### 5.3.8 Sektor Keuangan Real estat, dan Jasa Perusahaan

Tabel 5.19 Hasil Analisis Shift Share Sektor Keuangan Real estat, dan Jasa Perusahaan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010

SEKTOR/SUB SEKTOR	Regional Share	Proportional Share	Differential Share	Growth
Keu. Real estat, & jasa perusahaan	60,287	273,229	(135,211)	198,305
a. Bank	6,795	439,204	(320,800)	125,199
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	1,597	1,124	1,488	4,209
d. Real Estat	49,424	32,846	(16,285)	65,985
e. Jasa Perusahaan	2,471	723	(282)	2,912

Hasil perhitungan *shift share* Sektor Keuangan Real estat, dan Jasa Perusahaan Kabupaten Lampung Utara tahun 2000-2010 pada tabel di atas, sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 198.305 Juta. Dan jika di lihat dari sub sektor pembentuknya pertumbuhan sektor tersebut sebagian besar berasal dari sub sektor bank yang menyumbang sebesar 125.199 juta ( 63 % ) dan sub sektor real estat menyumbang 65.985 juta (33 % ). Jika dilihat dari dekomposisinya regional share sebesar 60.287 juta dan karena sektor ini tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi di tingkat propinsi Lampung sehingga berdampak pada peningkatan nilai pertumbuhan sektor sebesar 273.229 juta, dan jika di lihat dari

nilai differential shift yang negatif menandakan sektor Keuangan Real estat, dan Jasa Perusahaan tumbuh lebih lambat di dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat propinsi dalam priode tahun 2000-2010, dan nilai pergeseran tersebut sebesar 135.211 juta sehingga sektor ini tidak mempunyai keunggulan kompetitif.

Di lihat dari komponen *proportional* shift semua sub sektor bernilai positif hal ini berarti semua sub sektor pada tabel. 4.1.8 tumbuh lebih pesat di dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Propinsi Lampung, sedangkan di lihat dari *differential shift* hanya sub sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank yang bernilai positif, hal ini menunjukkan Lembaga Keuangan Bukan Bank mempunyai keunggulan kompetitif.

### 5.3.9 Sektor Jasa Jasa

Tabel 5.20: Hasil Analisis Shift Share Sektor Jasa-Jasa Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010

SEKTOR/SUB SEKTOR	Regional Share	Proportional Share	Differential Share	Growth
Jasa-Jasa	126,218	(56,085)	48,363	118,496
a. Pemerintahan Umum				
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	67,258	(44,738)	34,206	56,727
2. Jasa Pemerintah lainnya	34,571	(24,277)	18,865	29,158
b. Swasta				
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	6,153	6,472	2,360	14,985
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	658	948	(580)	1,026
3. Jasa Perorangan & Rumahtangga	17,579	1,496	(2,475)	16,600

Data Hasil Perhitungan

Hasil perhitungan *shift share* sektor Jasa-jasa Kabupaten Lampung Utara tahun 2000-2010 pada tabel di atas, sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 118.496 Juta. Dan jika di lihat dari sub sektor pembentuknya hampir semua sub sektor menyumbang dengan komposisi yang berimbang, kecuali jasa hiburan dan rekreasi yang hanya menyumbang 1.026 juta. Jika dilihat dari dekomposisinya *regional share* sebesar 126.218 juta dan karena sektor ini tumbuh lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi di tingkat propinsi Lampung sehingga berdampak pada pengurangan nilai pertumbuhan sektor sebesar-56.085 juta, dan jika di lihat dari nilai *differential shift* yang positif menandakan sektor jasa-jasa tumbuh lebih



cepat di bandingkan dengan sektor yang sama di tingkat propinsi dalam priode tahun 2000-2010, dan nilai pergeseran tersebut sebesar 48.363 juta sehingga sektor ini mempunyai keunggulan kompetitif. Di lihat dari komponen *proportional shift* hanya pada kelompok sub sektor jasa swasta bernilai positif seperti jasa sosial kemasyarakatan, sub sektor jasa hiburan dan rekreasi, jasa perorangan dan rumah tangga, sedangkan untuk kelompok jasa-jasa pemerintahan bernilai negatif. Dilihat dari Komponen *Differential Shift* terdapat 3 sub sektor yang bernilai positif yaitu sub sektor administrasi pemerintahan dan pertahanan, sub sektor jasa pemerintahan lainnya, dan sub sektor sosial kemasyarakatan sedangkan jasa hiburan dan rekreasi dan sub sektor jasa perorangan dan rumah tangga bernilai negatif.

Secara Agregat pertambahan, dari tahun 2000 sampai tahun 2010 terjadi pertambahan tingkat PDRB (output Ekonomi ) di Kabupaten Lampung Utara sebesar 1,353.076 juta rupiah. Dari jumlah tersebut sebagian besar (99,20 persen) lebih disebabkan karena efek pertumbuhan ekonomi di tingkat Propinsi Lampung, hal ini berarti pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara hampir sama dengan dengan pertumbuhan ekonomi pada tingkat Propinsi Lampung atau pertumbuhannya tidak jauh berbeda dengan Kabupaten-kabupaten yang ada di Propinsi Lampung sebagaimana terlihat pada tabel 5.21 di bawah ini :

Tabel 5.21: Perubahan Sektoral dan Komponen yang mempengaruhi Ekonomi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010

No	Sektor	<i>Provintial Share</i>	<i>Proportional Share</i>	<i>Differential Share</i>	<i>Growth</i>
1	Pertanian	649,786	(232,547)	(139,657)	277,582
2	Pertambangan dan Penggalian	9,267	(6,708)	11,507	14,066
3	Industri Pengolahan	170,835	2,213	65,334	238,382
4	Listrik, gas dan Air Minum	3,496	1,040	12,872	17,408
5	Kontruksi	49,619	(9,564)	48,644	88,699
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	210,679	7,434	50,325	268,438
7	Peng. & Komunikasi	62,121	51,301	18,278	131,700
8	Keuangan, real Estat, jasa keuangan	60,287	273,229	(135,211)	198,305
9	Jasa jasa	126,218	(56,085)	48,363	118,496
	Jumlah	1,342,308	30,313	(19,545)	1,353,076
	Prosentase penyebab pertumbuhan	99.20	2.24	(1.44)	100.00

Sementara pengaruh daya saing Kabupaten Lampung Utara terhadap Perekonomian Kabupaten Lampung Utara negative 1,44 persen yang menunjukkan bahwa tidak adanya daya saing atau kemandirian daerah terutama disebabkan karena adanya pergeseran yang cukup besar pada sektor pertanian baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten Lampung utara sehingga mengurangi komponen regional share dan tidak adanya keunggulan kompetitif pada sektor keuangan. Sementara itu pengaruh dari efek bauran industri / sektoral (*proportional Share*) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Lampung Utara hanya sebesar 2,24 Persen.

Berdasarkan Hasil Analisis pada sektor-sektor dan sub sektor-sub sektor pembentuknya terdapat beberapa sektor dan sub sektor yang tumbuh pesat di tingkat propinsi lampung (*Proportional Shift* positif) dan beberapa sektor dan sub sektor yang memiliki keunggulan kompetitif (*differential positif*) seperti pada tabel berikut :

Tabel 5.22: Hasil Analisis Shift Share Sektor Jasa-Jasa Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000-2010

Proportional Shift ( positif ) / tumbuh pesat di tingkat propinsi		Diffrential Shift (positif) / keunggulan Kompetitif	
Sektor	Sub Sektor	Sektor	Sub Sektor
1. Industri pengolahan	1. Kehutanan	1. Pertambangan dan penggalian	1. Tanaman bahan makanan
2. Listrik gas dan air bersih	2. Perikanan	2. Industri Pengolahan	2. Kehutanan
3. Perdagangan, Hotel dan restoran	3. Makanan Minuman & tembakau	3. Listrik, gas dan Air bersih	3. Penggalian
4. Pengangkutan dan Komunikasi	4. Kertas dan barang cetakan	4. Pengangkutan dan Komunikasi	4. Makanan, minuman & tembakau
5. Keuangan real estat, dan Jasa Perusahaan	5. Barang lainnya	5. Jasa Jasa	5. Brang kayu dan asil hutan lainnya
	6. Perdagangan besar dan eceran		6. Semen dan barang galian bukan logam
	7. Pengangkutan rel		7. Listrik
	8. Pengangkutan jalan raya		8. Kontruksi
	9. Jasa penunjang angkutan		9. Perdagangan besar dan eceran
	10. Pos dan telekomunikasi		10. Pengangkutan jalan raya
	11. Bank		11. Jasa penunjang angkutan
	12. Lembaga keuangan bukan bank		12. Jasa lembaga keuangan bukan bank
	13. Real estat		13. Jasa administrasi
	14. Jasa perusahaan		

	15. Jasa Sosial kemasyarakatan		pemerintahan & pertahanan
	16. Jasa hiburan dan rekreasi		14. Jasa pemerintahan lainnya
	17. Jasa perorangan dan rumah tangga		15. Jasa social kemasyarakatan

*Sumber : Data hasil olahan*

Dari tabel di atas dapat di pilih sektor yang tumbuh pesat di tingkat propinsi Lampung dan sektor yang ada di kabupaten Lampung Utara pertumbuhannya lebih cepat di bandingkan sektor yang sama di tingkat propinsi lampung yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik gas dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi sedangkan sub sektor yaitu sub sektor kehutanan, inudstri makanan dan minuman, perdagangan besar dan eceran, pengangkutan jalan raya, jasa penunjang angkutan, lembaga keuangan bukan bank, jasa sosial kemasyarakatan.

#### 5.4 Penentuan Sektor/sub sektor Unggulan

Untuk menentukan suatu sektor benar benar unggulan merupakan hal yang sulit akan tetapi penentuan sektor/sub sektor unggulan dapat didekati dengan melihat apakah sektor/sub sektor tersebut menjadi sektor basis atau bukan untuk di daerah tersebut yang dapat dilihat dari kontribusi sektor tersebut lebih besar dari kontribusi sektor yang sama terhadap daerah daerah lain atau wilayah acuan dengan melihat nilai  $LQ > 1$  berarti sektor/sub sektor tersebut bukan hanya mampu melayani kebutuhan masyarakat setempat akan tetapi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di luar batas wilayah administrasinya, sehingga dengan semakin banyaknya sektor basis di daerah tersebut semakin banyak pendapatan untuk daerah tersebut dan juga semakin menggerakkan sektor/suksektor lainnya termasuk sub sektor non basis .

Pada dasarnya analisis *Location Quetient* digunakan hanya untuk melihat/memotret kondisi perekonomian pada titik waktu tertentu (satu titik waktu tertentu), sehingga bisa saja tahun berikutnya sektor/ sub sektor tersebut sudah tidak menjadi basis lagi, untuk lebih baiknya analisis LQ di lakukan dengan melihat perkembanganya dalam kurun waktu tertentu seperti pada penelitian ini dengan melihat perkembangan nilai LQ dari 2000-2010. Kelemahan lain dari analisis LQ ini adalah asumsi pola permintaan dan produktivitas penduduk daerah

yang dihitung LQnya sama dengan pola permintaan dan produktivitas penduduk daerah acuan, dan asumsi yang kedua adalah permintaan dari suatu daerah akan dipenuhi dari daerah itu sendiri, baru kekurangannya akan diimpor dari daerah lain, pada kenyataannya kedua asumsi tersebut sering tidak terbukti seperti pada asumsi keseragaman pola permintaan antara daerah yang dihitung dengan daerah yang menjadi acuan terkadang asumsi ini tidak terbukti karena perbedaan dalam faktor faktor yang mempengaruhi permintaan seperti, pendapatan, harga barang dan selera konsumen.

Analisis lain yang dapat digunakan untuk menentukan sektor unggulan adalah dengan menggunakan analisis *shift share*, yang digunakan untuk menggambarkan kinerja dan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian suatu wilayah dibandingkan dengan sektor-sektor yang sama untuk daerah yang lebih besar, analisis ini membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi kabupaten dengan laju pertumbuhan tingkat propinsi sehingga diketahui perubahan struktur ekonomi dan keunggulan lokasional sektor/sektor yang ada di daerah selama waktu pengamatan yang terlihat dari komponen *Proportional Shift* jika positif berarti *industry mix* daerah tersebut sudah baik dan *Differential Shift*nya, jika positif maka sektor tersebut mempunyai keunggulan kompetitif.

Pada dasarnya analisis *shift share* menggambarkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rentang waktu, seperti dalam penelitian ini rentang waktu yang digunakan adalah dari tahun 2000-2010, jadi berapa pertumbuhan ekonomi kabupate Lampung Utara tersebut selama 10 (sepuluh) tahun dan bagaimana dekomposisinya dengan melihat komponen *share*, *proportional shift* dan *differential shift*. Dan beberapa kelemahan analisis *shift share* di antaranya, hanya dapat dilakukan untuk analisis *ex post*, ada priode waktu tetentu di tengah pengamatan tidak terungkap dan tidak bisa dipakai untuk melihat keterkaitan antar sektor dan antar daerah.

Analisis selanjutnya yang digunakan untuk mengetahui sektor yang mempunyai keunggulan untuk dikembangkan di masa yang akan datang adalah dengan menggabungkan hasil analisis *Shift Share* dan analisis *Location Quotient*. Hasil analisis basis ekonomi dan struktur ekonomi akan digabungkan kemudian dirangking untuk mendapatkan sektor yang benar benar memiliki keunggulan baik dari sisi

kontribusi, pertumbuhan, kinerja sektor/ sub sektor selama periode tahun 2000-2010.

Pada dasarnya analisis LQ digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian hanya pada satu titik waktu pengamatan, sedangkan analisis *shift share* digunakan untuk melihat pertumbuhan sektor dalam kurun waktu / rentang waktu tahun 2000-2010, sehingga sulit untuk digabungkan akan tetapi perhitungan LQ pada penelitian ini tidak hanya pada satu titik waktu pengamatan saja melainkan selama rentang waktu ( periode tahun 2000-2010) dengan cara demikian akan diketahui mana sektor/sub sektor yang merupakan sektor basis yang bisa bertahan pada kurun waktu tersebut yang nilainya LQnya di hitung secara rata-rata sehingga hasil LQ rata-rata mencerminkan nilai LQ selama kurun waktu 2000-2010 dengan demikian analisis LQ dan Shift share dapat digabung untuk menentukan sektor/sub sektor yang mempunyai keunggulan.

untuk mengidentifikasi sektor/ sub sektor unggulan bukan hanya dengan menggabungkan hasil analisis LQ dan *shift share* juga dilihat besaran rata-rata kontribusi yang mencerminkan pentingnya peranan sektor tersebut dalam pembentukan PDRB dan mencerminkan juga banyaknya tenaga kerja pada sektor tersebut serta rata-rata pertumbuhan dalam struktur ekonomi Kabupaten Lampung Utara. Untuk mempermudah pemeringkatan sub sektor digunakan tanda (+), semakin banyak jumlah tanda (+) berarti sub sektor tersebut semakin unggul baik dari kontribusi, pertumbuhan, basis non basis dan dari komponen pertumbuhan seperti *proportional shift*, dan *differential shift*.

Tabel 5.23 : Hasil Analisis Rata-Rata Kontribusi, Rata-Rata Pertumbuhan, dan Analisis LQ dan *Shift Share*

	SUB SEKTOR	Rata-rata Kontribusi (2000-2010)		Rata-rata Pertumbuhan (2000-2010)		LQ	Analisis Shift Share		Jumlah (+)	Unggulan ke
							SP	SD		
1	Tanaman Bahan Makanan	17.86	+++	3.58	+	-	-	+	5	III
2	Tanaman Perkebunan	17.02	+++	1.67	+	+	-	-	5	III
3	Peternakan dan Hasil-hasilnya	5.38	++	0.74	+	+	-	-	4	
4	Kehutanan	0.54	+	17.64	+++	+	+	+	7	I
5	Perikanan	0.90	+	4.17	+	-	+	-	3	
6	Penggalian	0.77	+	7.31	+	-	-	+	3	

Sambungan tabel 5.24

7	Makanan, Minuman dan Tembakau	11.75	+++	6.85	+	+	+	+	7	I
8	Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	0.51	+	7.62	+	-	-	+	3	
9	Kertas dan Barang Cetakan	0.67	+	6.30	+	+	+	-	4	
10	Semen & Brg. Galian bukan logam	0.75	+	5.46	+	+	-	+	4	
11	Barang lainnya	0.06	+	5.07	+	-	+	-	3	
12	Listrik	0.61	+	30.36	+++	+	+	+	7	I
13	Air Bersih	0.05	+	(11.19)	-	-	-	-	1	
14	bangunan	4.43	++	8.09	++	-	-	+	5	III
15	Perdagangan Besar & Eceran	15.83	+++	6.42	+	+	+	+	7	I
16	Hotel	0.01	+	3.75	+	-	-	-	2	
17	Restoran	1.38	+	4.78	+	+	-	-	3	
18	Angkutan Jalan Rel	0.01	+	(2.11)	-	-	+	-	2	
19	Angkutan Jalan Raya	4.48	++	8.38	++	+	+	+	7	I
20	Jasa Penunjang Angkutan	0.00	+	9.16	++	-	+	+	5	III
21	Pos dan Telekomunikasi	1.07	+	13.63	++	-	+	-	4	
22	Bank	2.32	+	44.50	+++	+	+	-	6	II
23	Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.16	+	10.63	++	-	+	+	5	III
24	Real Estat	4.10	++	6.50	+	+	+	-	5	III
25	Jasa Perusahaan	0.19	+	6.13	+	+	+	-	4	
26	Adm. Pemerintah & Pertahanan	4.86	++	4.53	+	+	-	+	5	III
27	Jasa Pemerintah lainnya	2.50	+	4.53	+	+	-	+	4	
28	Jasa Sosial Kemasyarakatan	0.60	+	10.14	++	-	+	+	5	III
29	Jasa Hiburan & Rekreasi	0.05	+	7.42	+	-	+	-	3	
30	Jasa Perorangan & Rumah tangga	1.14	+	5.28	+	+	+	-	4	
	rata- rata pertumbuhan			7.91						

Keterangan :

Kontribusi =  $K \geq 6,66\%$  nilai positif ( +++ )  
 $3,33\% < K < 6,66\%$  nilai positif ( ++ )  
 $0\% < K < 3,33\%$  nilai positif ( + )  
 ( diperoleh dari kontribusi 100 % / 30 sub sektor = 3,33 % )

Pertumbuhan =  $G \geq 15,8\%$  nilai positif ( +++ )  
 $7,91\% < G < 15,8\%$  nilai positif ( ++ )  
 $0\% < G < 7,91\%$  nilai positif ( + )  
 ( diperoleh dari rata-rata pertumbuhan 30 sub sektor : 7,91 % )

Nilai LQ = Sektor Basis nilainya positif ( + )  
 Sektor Non Basis nilainya Negatif ( - )

Nilai SP, SD = Nilai ( + ) dan ( - )

Dari berbagai analisis di atas dapat diringkas untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi masing-masing sub sektor dilihat dari sisi pertumbuhan, peranannya dalam pembentukan PDRB, sektor basis non basis, *industry mix*, serta kemampuan daya saingnya sebagaimana hasil analisis *overlay* (gabungan) terhadap sub sektor- sub sektor pembentuk PDRB Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan hasil analisis gabungan terhadap 30 sub sektor yang ada dalam struktur perekonomian Kabupaten Lampung Utara terdapat 5 (lima) sub sektor basis yang mempunyai keunggulan/ prioritas I yaitu sub sektor kehutanan, sub sektor industri pengolahan makanan dan minuman, sub sektor listrik, sub sektor perdagangan besar dan eceran, sub sektor angkutan jalan raya, dan 1 (satu) sub sektor yang menjadi prioritas ke II yaitu sub sektor perbankan, sedangkan untuk sub sektor basis yang menjadi prioritas ke III yaitu sub sektor perkebunan, dan real estat.

Untuk menentukan suatu sektor unggulan tidak hanya dari perhitungan perhitungan di atas akan tetapi sektor tersebut harus *tradeable* dan di lihat dari sumber daya alam dan faktor produksinya berlimpah atau tidak sehingga yang menjadi sub sektor unggulan Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut :

#### 5.4.1 Sub sektor Kehutanan

Sub sektor Kehutanan merupakan sub sektor dari sektor pertanian dan jika dilihat dari pertumbuhannya selama 10 tahun maka rata-rata pertumbuhannya sangat tinggi yaitu rata-rata sebesar 17,64 % pertahun sedangkan kontribusinya sangat kecil yaitu hanya 0,54 % akan tetapi sub sektor ini merupakan sub sektor basis dengan nilai LQ rata-rata 1,33 dan jika di lihat dari hasil analisis *Shift share* sub sektor ini merupakan sub sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif. Sedangkan jika dilihat dari luas lahannya, Kabupaten Lampung Utara memiliki kawasan hutan lindung maupun hutan produksi. Luas kawasan hutan lindung seluas 29.100 Ha, yang meliputi masing-masing wilayah kecamatan Bukit Kemuning 11.604 Ha, Abung Tinggi 2.230 Ha Tanjung Raja 13.800 ha, dan Abung pekurun 1.465,5 Ha. Sedangkan hutan produksi seluas 10.005 Ha yang keseluruhannya berada di Kecamatan Sungkai Utara. Adapun hasil produksinya

sebagian besar berupa kayu dengan hasil produksi pada tahun 2009 sebanyak 54.704 M3 kayu bulat, 1.250 ton arang dan 500 ton Damar.

Dan jika di lihat dari fungsinya kawasan hutan perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah karena sebagian besar lokasi kawasan hutan produksi maupun hutan lindung berada di dataran tinggi yang tentunya berfungsi sebagai penyimpan cadangan air dan mendukung pengairan irigasi pada sub sektor tanaman bahan makanan, permintaan akan hasil hutan terutama kayu semakin meningkat hal ini dikarenakan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan permintaan perumahan dan *furniture* dari kayu, dari sisi nilai jual produksi kayu selalu meningkat harganya hal ini di karenakan semakin sedikitnya produksi kayu karena banyak daerah daerah yang melakukan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan, sehingga pemerintah perlu memperhatikan peluang demikian untuk meningkatkan lahan hutan produksi sehingga di masa yang akan datang sub sektor kehutanan memberikan kontribusi yang semakin meningkat pada pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Utara.

#### 5.4.2 Sub sektor Listrik

Jika dilihat dari pertumbuhannya selama 10 tahun maka rata-rata pertumbuhannya sebesar 30,36 % hal ini terjadi karena adanya peningkatan Output sub sektor listrik yang signifikan pada tahun 2001 sebesar 115 % dan pada tahun 2002 sebesar 150,71 % sedangkan jika dilihat dari kontribusinya sangat kecil yaitu hanya 0,61 % akan tetapi sub sektor ini merupakan sub sektor basis dengan nilai LQ rata-rata 2,13 dan jika di lihat dari hasil analisis *Shift share* sub sektor ini merupakan sub sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif yang di tandai dengan nilai *Differential Shift* yang positif.

Sub sektor listrik merupakan sub sektor yang penting dalam perekonomian karena sub sektor ini merupakan sub sektor energi bagi kegiatan perekonomian baik untuk kegiatan konsumsi atau kegiatan produksi sehingga walaupun peranannya dalam pembentukan PDRB masih sangat kecil akan tetapi permintaan akan energi listrik cenderung meningkat. Sebagaimana pada tahun 2009 untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di kabupaten Lampung Utara produksi listrik yang dibangkitkan oleh PT PLN sebesar 230.848.519 Kwh dari jumlah tersebut



yang terjual adalah 156.890.756 Kwh atau 83,65 %. Dan perkembangan produksi dan permintaan akan energi listrik terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5.24. Jumlah Produksi Listrik Menurut Penggunaan tahun 2003-2009

TAHUN	DIBANGKITKAN (KWH)	DISALURKAN (KWH)	TERJUAL (KWH)
2003	-	107,016,240	92,817,324
2004	122,612,121	90,002,121	81,407,607
2005	114,502,913	114,470,496	102,594,998
2006	123,150,074	126,894,826	110,998,520
2007	201,100,466	200,908,223	123,128,718
2008	347,873,765	347,873,765	300,394,225
2009	230,848,519	187,812,919	156,890,756

Sumber : Lampung Utara Dalam Angka 2010

Tabel 5.25: Banyaknya Pelanggan, KVA yang terpasang, dan KWH yang terpasang

TAHUN	Jumlah Pelanggan	KVA Terpasang	KWH Terpasang
2003	57,492	53,260	-
2004	48,677	46,996	-
2005	67,882	62,945	100,165,921
2006	62,985	62,823	121,838,455
2007	81,889	75,220	121,131,220
2008	89,514	86,947	141,923,096
2009	93,546	90,868	155,822,313

Sumber : Lampung Utara Dalam Angka 2010

Sehingga untuk dapat menopang sub sektor industri terutama industri makanan dan minuman tentunya pemerintah daerah harus mampu menjaga kontinuitas pasokan listrik sebagai sumber energi.

#### 5.4.3 Sub sektor Perdagangan Besar & Eceran

Sub sektor ini termasuk dalam sektor perdagangan, hotel dan restoran. Jika dilihat dari pertumbuhannya selama 10 tahun maka rata-rata pertumbuhannya sebesar 6,42 % sedangkan jika dilihat dari kontribusinya cukup besar yaitu sebesar 15,83 %, sub sektor ini merupakan sub sektor basis dengan nilai LQ rata-rata 1,08 dan jika di lihat dari hasil analisis *Shift share* sub sektor ini merupakan sub sektor yang mempunyai keunggulan *kompetitif* yang di tandai dengan nilai *Differentil Shift* yang positif.

Sub sektor perdagangan termasuk dalam sektor *tertier* yang banyak menyerap tenaga kerja terutama tenaga kerja dengan ketrampilan dan pendidikan rendah dimana pada tahun 2007 jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor ini sebanyak 710 orang dan meningkat pada tahun 2008 menjadi 777 orang dengan banyaknya toko permanen sebanyak 1.841 toko dan 1.563 Toko semi permanen yang sebagian besar berada di kecamatan Kotabumi yang merupakan ibukota Kabupaten Lampung Utara dengan jumlah toko 1.807 permanen dan 300 toko semi permanen. Sedangkan untuk pasar permanen sebanyak 19 unit pasar 6 pasar berada di kecamatan kotabumi dan sisanya tersebar diseluruh kecamatan. Sub sektor perdagangan besar dan eceran ini merupakan sub sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan terus karena lokasi Kabupaten Lampung Utara yang terletak di jalan lintas tengah sumatera sehingga menjadi tempat persinggahan. Dan jika dilihat dari jarak ke Ibukota Propinsi Lampung menempuh jarak 100 KM hal ini menguntungkan bagi Kabupaten Lampung Utara untuk melayani kebutuhan masyarakat Kabupaten lain seperti Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

#### 5.4.4 Sub sektor Angkutan Jalan Raya

Sub sektor ini merupakan sub sektor *tertier* yang meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya baik bermotor maupun tidak bermotor. Jika di lihat dari kontribusinya sub sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4,48 % dengan laju pertumbuhan sebesar 8,38 % dan dari tahun ke tahun pertumbuhannya semakin meningkat dimana pada tahun 2001 pertumbuhannya hanya 3,3 %. Sub sektor angkutan jalan raya merupakan sub sektor basis dengan nilai LQ sebesar 1,39 dan berdasarkan hasil analisis *shift share* sub sektor ini memiliki keunggulan kompetitif yang ditandai dengan komponen *proportional shift* yang positif dan *differential shift* yang positif. Dilihat dari jenis kendaraan angkutan sebagian besar jasa angkutan ini di dominasi oleh kendaraan truck, pickup dimana pada tahun 2009 sebanyak 3.249 kendaran pengangkut jenis truck dan pick up sedangkan mikrolet hanya sebesar 852 kendaraan dan untuk Bus hanya 72 kendaraan sebagaimana terlihat pada tabel 5.27 di bawah ini

Tabel 5.26 : Perkembangan Banyaknya kendaraan pengangkut barang dan orang

JENIS KENDARAAN	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
1 Mikrolet	758	766	785	747	852
2 Bus	32	32	39	84	72
3 Mobil Barang (truck, Pick Up,	2.024	2.183	2.469	3.968	3.249

Sumber : Lampung Utara Dalam Angka 2010

Untuk angkutan perkotaan dan pedesaan berjumlah 13 trayek dengan jumlah kendaraan yang beroperasi sebanyak 718 kendaraan.

sebagai penunjang angkutan mobilitas masyarakat di Kabupaten Lampung Utara banyak ditunjang dengan sarana angkutan darat. Sarana perhubungan darat pada tahun 2009 terdiri dari 76,23 KM jalan negara, 176,60 KM jalan propinsi dan 2.100,42 km jalan Kabupaten. Dari total jalan tersebut, yaitu sepanjang 2.353,25 km, 30,25 % dalam kondisi baik, 29,28 % kondisi sedang dan 40,47 % dalam kondisi rusak 33,58 %

#### 5.4.5 Sub sektor Perkebunan

Sub sektor perkebunan merupakan sub sektor unggulan kedua akan tetapi sub sektor ini merupakan sub sektor basis yang *tradeable* dan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan PDRB yaitu sebesar 17.02 % akan tetapi pertumbuhan sub sektor ini termasuk lambat karena hanya tumbuh rata-rata 1,67 % pertahun. Jika di lihat dari luas lahan untuk perkebunan besar seluas 22.400 Ha dengan jenis tanaman terluas adalah tebu sebesar 14.418 ha dengan jumlah produksi 92.275 ton pada tahun 2009 kemudian kelapa sawit seluas 7.422 ha dengan produksi sebanyak 1.809 ton. Untuk perkebunan rakyat luas lahan yang digunakan seluas 92.861 Ha yang sebagian besar ditanami lada 25.957 ha, kopi 21.412 Ha dan Karet 18.498 Ha dengan hasil produksi untuk lada sebanyak 9.277 ton, karet 12.304 ton dan kopi 12.298 ton pada tahun 2009, sehingga untuk tanaman perkebunan sebagian besar lahan perkebunan di miliki oleh masyarakat dengan luas lahan yang tersebar di 23 kecamatan. Sehingga sub sektor perkebunan merupakan sub sektor yang harus mendapat perhatian serius karena

sebagian besar petani bercocok tanam dengan berkebun terutama perkebunan lada dan karet yang bertujuan ekspor hal ini terlihat dari produksi lada di propinsi lampung di mana Lampung Utara merupakan daerah penghasil lada paling besar.

Tabel 5.27 : luas lahan dan produksi lada propinsi lampung tahun 2009

No	Kabupaten	Luas Areal ( Ha )	Produksi ( Ton )
1.	Lamp Barat	8.903	2.960
2.	Tanggamus	7.956	1.956
3.	Lamp Utara	24.148	10.759
4.	Way Kanan	12.083	3.182
5.	Pesawaran	658	135
6.	Lamp Teng	971	241
7.	Lamp Sel	300	94
8.	Lamp Tim	8.926	2.958
9.	Tulang Bw	118	26
10.	Bandar Lamp	10	-
	<b>Total</b>	<b>64.073</b>	<b>22.311</b>

Sumber : *Regional Invesmet*

#### 5.4.6 Sub sektor Industri Makanan dan Minuman

Sub sektor ini merupakan bagian dari sektor industri pengolahan yang termasuk dalam sektor sekunder, sub sektor industri makanan dan minuman memberikan kontribusi yang besar yaitu 11,75 % sebesar dan jika di lihat dari pertumbuhan sub sektornya selama 10 tahun sub sektor ini tumbuh sebesar 6,42 % pertahun, berdasarkan hasil analisis sektor basis sub sektor ini juga termasuk dalam sub sektor basis dengan nilai LQ 1,11, sedangkan berdasarkan hasil analisis *shift share* sub sektor ini memiliki keunggulan kompetitif yang ditandai dengan *differential Shift* positif akan tetapi untuk di tingkat propinsi sub sektor ini tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Sub sektor industri pengolahan makanan dan minuman termasuk dalam sub sektor unggulan karena sebagian besar input sub sektor ini berasal dari sub sektor perkebunan seperti komoditas kopi yang menjadi input dari industri pengupasan kopi dan penggilingan kopi yang menyerap tenaga kerja yang cukup banyak yaitu 479 orang dengan jumlah unit usaha 221 unit, dan industri besar yang tumbuh yaitu industri tepung tapioka yang memperoleh input dari hasil ubi kayu dengan nilai investasi yang paling besar yaitu sebesar Rp 10,618,100,000

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industri sebanyak 7.251 orang pada tahun 2009 dengan jumlah industri sebanyak 2000 unit, untuk industri manakan dan minuman berjumlah 854 unit dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 2.948 orang . sedangkan nilai investasi mencerminkan biaya produksi pada jenis industri yaitu bernilai Rp.21.924.123.000 dan nilai produksi pada tahun 2009 sebesar Rp.27,036,556.000.

Tabel : 5.28 : Banyaknya unit usaha dan tenaga kerja pada industri makanan minuman dan tembakau pada tahun 2009

Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp. 000,-)	Produksi (Rp. 000,-)
1. Tahu/ Tempe	144	428	850,910	953,569
2. Temulawak	2	6	11,500	3,500
3. Kerupuk	50	312	550,450	571,760
4. Kue Kering/ Roti	9	32	177,250	451,100
5. Macam-macam Makanan Ringan	4	16	55,000	158,000
6. Profil/ Pipilan Jagung	12	35	111,000	114,000
7. Marning Jagung	3	6	3,000	4,200
8. Kopi Bubuk	105	266	1,247,310	1,902,915
9. Industri Tapioka	15	574	10,618,100	11,003,390
10. Pengupasan Kopi/ Huller	221	479	2,058,900	8,259,059
11. Heller Padi	178	467	5,659,943	2,764,063
12. Gula Merah/ Kelapa	38	71	54,250	171,325
13. Keripik Pisang	25	106	207,940	158,820
14. Keripik Singkong	6	17	41,820	14,155
15. Selai Pisang	1	3	6,500	1,750
16. Jamu Tradisional	6	12	2,700	2,400
17. Kerupuk Kemplang Panggang	2	7	21,250	21,150
18. Minyak Goreng	3	7	65,000	4,500
19. kopra	10	30	45,000	44,500
20. Penggilingan Tepung Beras	12	27	22,500	19,600
21. Tembakau dan Rokok Kretek	5	38	63,800	341,800
22. Manisan Buah	1	2	15,000	5,000
23. Penggilingan Cabe	1	3	20,000	3,500
24. Limun	1	4	15,000	62,500
Jumlah	854	2,948.00	21.924.123	27,036,556

Sumber : Lampung Utara Dalam Angka tahun 2010

Pada tabel di atas terlihat bahwa beberapa industri makanan dan minuman yang banyak menyerap tenaga kerja yaitu industri tapioka, industri pengupasan kopi, industri heller padi dan industri tahu tempe. Dan nilai investasi maupun nilai produksi yang terbesar adalah industri tepung tapioka yang mencerminkan industri tersebut merupakan industri besar.

Sehingga dari uraian hasil analisis sektoral di atas sub sektor unggulan yang mempunyai kemampuan untuk diperdagangkan dan didukung oleh sumber daya alam serta faktor produksi adalah sub sektor sub sektor kehutanan, sub sektor perkebunan, sub sektor industri makanan dan minuman, dan sub sektor perdagangan besar dan eceran sedangkan untuk sub sektor listrik, sub sektor angkutan jalan raya dan sub sektor perbankan merupakan sub sektor pendukung.

#### **5.5 Dukungan Pemerintah Terhadap Sektor/sub sektor Unggulan**

Dukungan pemerintah terhadap sektor sektor yang mempunyai keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif sangat penting dalam pengembangan dan pembangunan suatu perekonomian daerah, karena daerah memiliki keterbatasan sumber daya dan sumber pendapatan yang terbatas dalam melaksanakan pembangunan. Dengan demikian perlu kejelian pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonominya untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan daerahnya dengan memprioritaskan sektor sektor unggulan sebagai prioritas program dalam pembangunan ekonomi, karena menurut Hirschman dalam Todaro (1989), menyatakan bahwa untuk daerah yang berkembang, pembangunan ekonomi tidak dilakukan secara serentak (*Imbalanced Growth*) namun dilakukan dengan menetapkan sektor unggulan, dimana sektor unggulan mempunyai keterkaitan dengan sektor lain baik ke depan maupun keterkaitan ke belakang, sehingga dapat menciptakan total output yang besar dalam perekonomian daerah. Akan tetapi faktanya bahwa tidak semua sub sektor unggulan masuk dalam program prioritas pemerintah daerah baik RPJMD tahun 2010-2014 maupun pada RPJMD sebelumnya yaitu tahun 2004-2008 sebagaimana terlihat pada tabel 5.30.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010-2014 dukungan pemerintah untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan

teridentifikasi pada Misi kedua yaitu membangun perekonomian daerah yang Adil dan berkelanjutan, sedangkan program prioritasnya terhadap sub sektor unggulan terlihat pada tabel 5.30

Tabel 5.29 : Kesesuaian RPJMD Terhadap Sub sektor Unggulan

No	Sub sektor Prioritas / Unggulan	RPJMD tahun 2010-2014	Renstra tahun 2004-2008
1	Kehutanan	√	√
2	Listrik	√	
3	Perdagangan besar dan eceran	√	
4	Angkutan Jalan Raya	√	√
5	Industri makanan, minuman dan tembakau	√	√
6	Perkebunan	√	√
7	Jasa perbankan		

Sumber bappeda Lampung Utara ( data diolah)

Berdasarkan data pada strategi dan program prioritas pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Utara tahun 2010-2014 terdapat 6 sub sektor unggulan yang masuk dalam RPJMD sebagaimana terlihat pada tabel 5.30 di atas sedangkan 1 Sub sektor unggulan lainnya tidak terdapat dalam strategi dan kebijakan serta program sub sektor tersebut antara lain : sub sektor jasa perbankan sedangkan pada RPJMD priode sebelumnya hanya 4 sub sektor unggulan masuk dalam program prioritas sedangkan 3 sub sektor unggulan lainnya tidak terdapat dalam RPJMD tahun 2004-2008, hal ini di karenakan pada Renstra kabupaten Lampung Utara tahun 2004-2008 dalam penyusunannya tidak melakukan kajian ekonomi sektoral untuk menentukan sektor/sub sektor yang menjadi keunggulan kabupaten Lampung Utara, hanya memasukakan potensi sumber daya alam sebagai kekuatannya, sedangkan untuk penyusunan RPJMD tahun 2010-2014 sudah mulai melakukan analisis kondisi perekonomian Dalam mengidentifikasi peran dan pengaruh Kabupaten Lampung Utara terhadap sistem ekonomi regional Provinsi Lampung dengan menggunakan metoda analisis LQ, walaupun masih terbatas pada tingkat sektor dan belum

secara tegas menjadikan analisis tersebut digunakan untuk menentukan sektor unggulan. Adapun kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara terhadap sektor/subsector unggulan sebagai berikut :

#### 5.5.1 Kebijakan terhadap Sub sektor Kehutanan

Dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap sub sektor Kehutanan tertuang dalam RPJMD tahun 2010 -2014 pada misi ke 2 yaitu membangun perekonomian daerah yang adil dan berkelanjutan, dengan fokus kebijakan pengembangan sektor Penguat (*Strengthening Sektors*) dengan kebijakan :

1. Pembangunan kehutanan menekankan pada upaya konservasi
2. Pembangunan hutan rakyat dan hutan produksi

Dengan program prioritas :

1. Konservasi kehutanan menekankan pada langkah pembangunan berkelanjutan
2. Pengembangan hutan rakyat dan hutan produksi
3. Pemberdayaan ekonomi petani hutan

#### 5.5.2 Kebijakan terhadap Sub sektor Listrik

Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Sub sektor Listrik tertuang dalam RPJMD Tahun 2010-2014 pada misi ke 3 yaitu Meningkatkan Daya Dukung Sarana Infrastruktur Wilayah, dengan Fokus Kebijakan penegakan peraturan tata ruang, pembangunan utilitas pemukiman, sarana atau fasilitas social dan umum dengan program proritas :

1. Program Pengembangan dan peningkatan energi Listrik

#### 5.5.3 Kebijakan terhadap Sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran

Dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap sub sektor perdagangan Besar dan eceran tertuang dalam RPJMD tahun 2010 -2014 pada misi ke 2 yaitu membangun perekonomian daerah yang adil dan berkelanjutan, dengan fokus kebijakan pengembangan sektor penguat dengan strategi kebijakan :

1. Pembangunan sektor perdagangan untuk penciptaan harga yang kompetitif melalui pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi



Dengan program prioritas :

1. Pengembangan sarana perdagangan terminal agribisnis
2. Pengembangan Pusat informasi perdagangan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
3. Program peningkatan pemasaran hasil penggerak (pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan)

#### 5.5.4 Kebijakan Sub sektor Angkutan Jalan Raya

Kebijakan khusus terhadap alat angkutnya belum ada akan tetapi kebijakan pemerintah terhadap prasarana angkutan jalan raya tertuang dalam RPJMD tahun 2010-2014 pada misi ke 3 Meningkatkan Daya Dukung Sarana Infrastruktur Wilayah, dengan Fokus Kebijakan strategi pelayanan dasar (*basic need*) dan kebijakan pengembangan infrastruktur sebagai pelayanan dasar ditekankan pada peningkatan kualitas infrastruktur yang ada dan pengembangan infrastruktur baru untuk peningkatan aksesibilitas. dengan program proritas :

1. Program Pembangunan fasilitas Perhubungan
2. Program Peningkatan Pelayanan Jasa Transfortasi

#### 5.5.5 Kebijakan Sub sektor Industri Pengolahan

Dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap Industri makanan dan minuman tertuang dalam RPJMD tahun 2010 -2014 pada misi ke 2 yaitu membangun perekonomian daerah yang adil dan berkelanjutan, dengan kebijakan fokus kebijakan pengembangan sektor penggerak dengan strategi kebijakan :

1. Pembangunan agro industri
2. Pembangunan agro industri dan manufaktur oleh koperasi dan UKM

Dengan program prioritas :

1. pembangunan kawasan agro industri
2. Pengembangan pusat inovasi dan pengembangan produk
3. Pembinaan industri pada koperasi dan UMKM

#### 5.5.6 Kebijakan terhadap Sub sektor Perkebunan

Dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap sub sektor perkebunan

tertuang dalam RJPMD tahun 2010 -2014 pada misi ke 2 yaitu membangun perekonomian daerah yang adil dan berkelanjutan, dengan kebijakan fokus kebijakan pengembangan sektor penggerak dengan strategi kebijakan :

1. Revitalisasi areal Komoditas perkebunan rakyat
2. Pembangunan perkebunan besar yang diarahkan pada upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan kepemilikan perkebunan
3. Pembangunan perkebunan rakyat dan besar yang diarahkan pada peningkatan nilai tambah dengan pengembangan teknologi paska panen

Dengan program prioritas :

1. Revitalisasi areal komoditas kopi, lada, sawit dan kakau
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat tanaman perkebunan
3. peningkatan partisipasi masyarakat dalam perkebunan besar sawit dan karet dalam upaya pelibatan masyarakat
4. Pengembangan perkebunan rakyat dan besar di arahkan pada peningkatan nilai tambah

#### 5.6 Alokasi Anggaran Sektoral

Alokasi anggaran merupakan perwujudan dari kebijakan pemerintah terhadap sektor/sub sektor sebagai intervensi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan terutama pembangunan ekonomi. Alokasi anggaran yang dilakukan dengan tepat akan memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan perekonomian, karena pengalokasian anggaran kepada sektor sektor unggulan (*leading sektor*) akan memberikan dampak pada sektor-sektor lainnya (*multiplier effect*). Sektor unggulan sebagai motor penggerak sektor lainnya perlu mendapat perhatian dan fokus pemerintah karena akan memberikan dampak kepada sektor-sektor perekonomian lainnya secara simultan, dan bisa dihindari terjadinya pengalokasian anggaran yang tidak efektif dan efisien. Sehingga sektor/sub sektor unggulan seharusnya memperoleh porsi anggaran yang cukup besar, akan tetapi faktanya dalam APBD kabupaten lampung Utara mulai tahun 2007 sampai tahun 2011 alokasi anggaran terhadap sektor-sektor unggulan porsi sangat kecil seperti terlihat pada tabel 5.31

Tabel 5.30 : Alokasi Anggaran sub sektor Kabupaten Lampung Utara tahun 2007 - 2011(jutaan rupiah )

SEKTOR/SUB SEKTOR	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Pertanian</b>					
1. Tan.Bhn makanan (ketahanan pangan)	-	-	400	1,568	2,128
2. Tanaman Perkebunan + Pternakan	17,168	13,703	11,427	14,040	18,647
3. Kehutanan	7,344	7,821	9,505	13,395	14,007
4. Perikanan	-	-	2,383	2,896	5,765
<b>Pertambangan dan penggalian</b>					
5. Penggalian	2,113	2,191	2,538	2,988	3,953
<b>Industri pengolahan</b>					
6. Makanan, Minuman dan Tembakau	1,912	2,531	2,365	4,867	5,198
7. Semen & Brg. Galian bukan logam	-	-	-	-	-
<b>Listrik, Gas dan Air Bersih</b>					
<b>8. Kontruksi</b>	<b>136,347</b>	<b>167,495</b>	<b>111,236</b>	<b>101,226</b>	<b>122,769</b>
<b>Perdagangan, hotel dan restoran</b>					
9. Perdagangan Besar & Eceran	3,559	5,221	5,095	3,872	3,314
<b>Pengangkutan &amp; Komunikasi</b>					
10. Angkutan Jalan Raya	3,220	4,025	5,182	6,729	7,719
<b>Keu. Real estat &amp; Jasa Perusahaan</b>					
11. Bank	-	-	-	-	-
12. Real Estat	-	-	-	-	-
13. Jasa Perusahaan	-	-	-	-	-
<b>JASA-JASA</b>					
14 Adm. Pemerintah & Pertahanan	<b>132,877</b>	<b>186,957</b>	<b>177,797</b>	<b>222,880</b>	<b>210,110</b>
15 Jasa Pemerintah lainnya	<b>209,180</b>	<b>286,767</b>	<b>330,594</b>	<b>314,477</b>	<b>462,588</b>
16 Jasa Perorangan & Rumahtangga	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>513,720</b>	<b>676,711</b>	<b>658,523</b>	<b>688,937</b>	<b>856,198</b>

Sumber Dirjen Perimbangan Keuangan ( data di olah )

Berdasarkan tabel di atas perkembangan alokasi anggaran terbesar adalah sub sektor administrasi pemerintahan dan pertahanan, sub sektor jasa pemerintahan lainnya serta sektor kontruksi. Untuk anggaran sub sektor administrasi pemerintahan dan pertahanan pada tahun 2007 mencapai Rp. 132.877 juta atau sebesar 25,87 % yang trendnya mengalami kenaikan sampai pada tahun 2010 mencapai Rp.222.880 atau sekitar 32,35 % yang sebagian besar merupakan gaji penyelenggara pemerintahan daerah dan kegiatan rutin penyelenggaraan pemerintahan umum. Sedangkan untuk jasa pemerintah lainnya mendapat alokasi anggaran terbesar kedua, dimana pada tahun 2007 mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp.209.180 juta atau sebesar 40,72 %, yang perkembangannya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun bahkan untuk tahun 2011 mencapai Rp 462.588 Juta atau mencapai 54.03 %. Adapun sebagian besar anggaran jasa pemerintahan lainnya sebagian besar berupa jasa pendidikan, dan kesehatan. Untuk tahun 2010, anggaran pendidikan mencapai Rp 253.871 juta yang sebagian besar merupakan gaji guru/tenaga pendidik sebesar Rp. 245.893 juta atau mencapai 97 %. Pada tahun 2011, anggaran pendidikan mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu mencapai Rp. 387.589 juta dengan gaji guru dan tenaga pendidik sebesar Rp. 299.848 juta, sedangkan sisanya sebesar 84.438 juta digunakan untuk program wajib belajar sembilan tahun.

Untuk bidang kesehatan pada tahun 2010 mendapatkan alokasi anggaran sebesar 46.189 juta yang sebagian besar untuk gaji tenaga kesehatan dan operasional rumah sakit daerah, serta gaji tenaga medis yaitu sebesar 12.610 juta. Sedangkan untuk tahun 2011, anggaran kesehatan mencapai 56.353 juta dengan belanja tidak langsung atau gaji sebesar Rp. 38.697 juta dan belanja langsung Rp.17.656 juta. Alokasi anggaran yang terbesar ketiga adalah sektor konstruksi atau bangunan dimana pada tahun 2007 anggaran untuk sektor ini mencapai Rp. 136,347 atau mencapai 26,54 %. Trend alokasi anggaran sektor konstruksi mengalami penurunan sampai tahun 2011 menjadi 14,34 % dari total anggaran, yang terdiri atas program pembangunan fasilitas sosial 20.421 juta, program pembangunan jalan dan jembatan 30.780 juta program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 25.845 juta, program pengembangan jaringan irigasi 5.989 juta dan program pembangunan infrastruktur pedesaan 4.552 juta serta program penanggulangan kemiskinan terpadu 5.268 juta

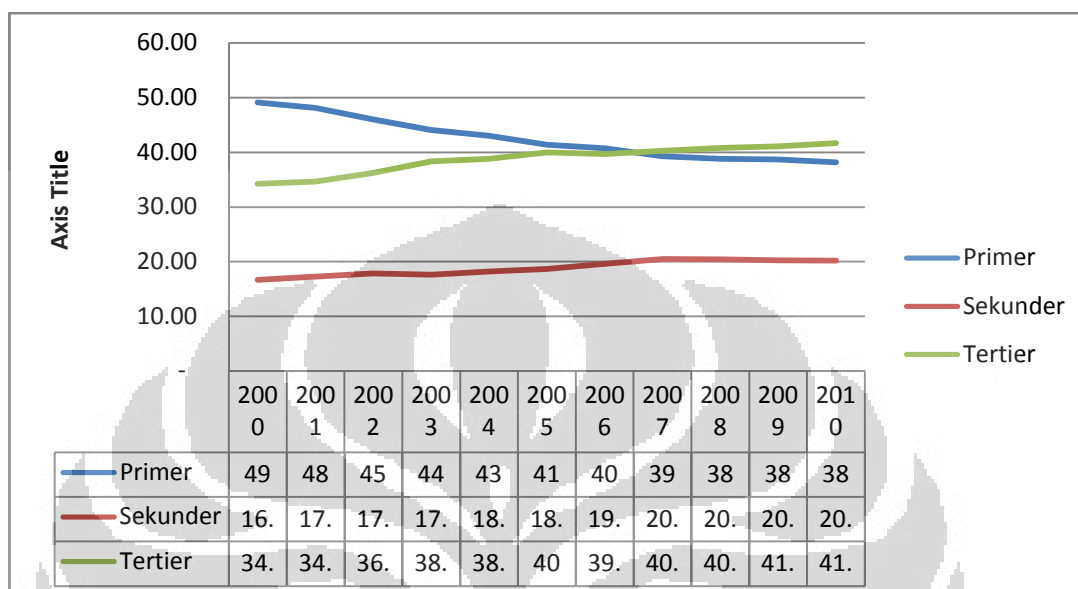
Sedangkan jika dilihat dari 7 sub sektor unggulan maka terlihat bahwa tidak ada subsector unggulan yang mendapat porsi anggaran lebih dari 4 %, dimana untuk subsector perkebunan dan peternakan pada tahun 2007 hanya mendapat porsi anggaran sebesar Rp. 17.168 juta atau sebesar 3,34 % kemudian turun pada tahun 2011 hanya mendapat porsi anggaran 2,18 % atau 18.647 juta, padahal sub sektor ini mempunyai keunggulan baik komparatif maupun kompetitif dan banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor ini, apalagi dijadikan program prioritas dalam RPJMD baik Priode 2010-2014 maupun priode RPJMD

sebelumnya. Anggaran untuk subsector kehutanan hanya sebesar 7.344 juta tau sekitar 1,43 % pada tahun 2007 yang kemudian mengalami kenaikan menjadi 14.007 juta atau menjadi sebesar 1,64 %, sedangkan untuk subsector unggulan lainnya yaitu subsector industri pengolahan makanan dan minuman hanya memperoleh porsi anggaran sebesar 0,37 % pada tahun 2007 kemudian meningkat sedikit mejadi 0,61 % atau sebesar 3.953 juta, sub sektor perdagangan besar dan eceran masing hanya mendapat porsi anggaran 0,39 % padahal sub sektor ini merupakan sub sektor unggulan dan menjadi sub sektor yang terus berkembang, Sub sektor angkutan jalan raya anggaranya hanya sebesar 3.220 juta pada tahun 2007 dan mengalami kenaikan pada tahun 2011 mencapai 7.719 juta, akan tetapi jika dilihat porsi anggaran untuk sub sektor unggulan ini hanya sebesar 0,90 %. Sehingga semua sektor unggulan hanya mendapatkan porsi anggaran di bawah 3%, bahkan untuk subsector listrik, dan jasa bank tidak mendapat porsi anggaran padahal sektor listrik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perkembangan industri pengolahan. sehingga untuk tetap menjaga agar sub sektor tersebut tetap menjadi unggulan kabupaten Lampung Utara maka pemerintah tentunya dapat memberikan dukungan berupa kebijakan untuk kelancaran produksi sub sektor tersebut seperti adanya peraturan daerah yang mampu meningkatkan investasi swasta terhadap sub sektor-sub sektor unggulan dan infrastruktur yang baik.

#### 5.7 Relevansi Kebijakan

Dari analisis yang dilakukan selama priode 2000 hingga 2010 terhadap Perekonomian Kabupaten Lampung Utara, dihasilkan sektor-sektor yang merupakan sektor-sektor basis yang mempunyai keunggulan lokasional yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik gas dan air bersih, Sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan dan sektor jasa jasa. Hal ini terlihat bahwa sektor primer baik pertanian maupun pertambangan secara sektoral bukan merupakan basis hal ini dikarenakan peranannya yang semakin menurun dan pertumbuhannya yang mulai melambat sedangkan sektor industri dan jasa jasa perkembangannya semakin meningkat. Menurut teori teori perubahan structural (*structural change theory*), Perekonomian suatu wilayah dikatakan maju apabila mengarah ke struktur perekonomian yang modern yakni dari pola ekonomi agraris ke perekonomian industri serta perubahan jenis permintaan konsumen dari produk

kebutuhan pokok pangan ke berbagai barang dan jasa manufaktur. Transformasi struktur ekonomi Kabupaten Lampung Utara mulai terlihat seperti pada grafik di bawah ini :



Gambar5.1: Grafik Perkembangan sektor primer, sekunder, dan tersier Kabupaten Lampung Utara tahun 2000-2010

Menurut Rostow, ketika suatu daerah masih mengandalkan sektor pertanian (fase tradisional), maka produktivitas yang tercipta akan rendah, maka daerah tersebut cenderung tertinggal begitu juga ketika sektor jasa yang di dalamnya terdapat sektor-sektor jasa pemerintahan, dikategorikan sebagai sektor yang unggulan yang terlihat dari rata kontribusi jasa pemerintah sebesar 7,36 % dari 9,34 % kontribusi sektor jasa dan porsi anggaran pemerintah untuk sub sektor jasa pemerintah tersebut sangat besar yaitu mencapai 78 % bahwa peranan pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Lampung Utara masih cukup dominan. Padahal sebaiknya sektor industri pengolahan yang merupakan sektor yang mampu menyerap hasil hasil pertanian mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dengan alokasi anggaran yang cukup besar terutama industri makanan dan minuman yang terkait dengan sub sektor perkebunan, peternakan dan memiliki keterkaitan kedepan terhadap sub sektor restoran.

## BAB 6 PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan berapa hal antara lain :

1. Berdasarkan analisis LQ sektor yang menjadi basis yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan, dan sektor jasa jasa serta terdapat 16 sub sektor basis dari 30 sub sektor yaitu : sub sektor perkebunan, peternakan, kehutanan, industri makanan minuman, industri kertas dan percetakan, industri semen dan barang galian bukan logam, sub sektor listrik, sub sektor perdagangan besar dan eceran, sub sektor angkutan jalan raya, perbankan, real estat, jasa perusahaan, sub sektor administrasi pemerintahan, sub sektor pemerintahan lainnya, dan sub sektor jasa pereorangan dan rumah tangga
2. Angka *multiplier* sektor/sub sektor basis sebesar 6,38 yang berarti jika ada injeksi yang berakibat adanya kenaikan sektor/sub sektor basis maka kenaikan PDRB sebesar 6,38 kali dari kenaikan sektor basis tersebut dengan penyumbang multiplier terbesar pada sub sektor perkebunan
3. Berdasarkan analisis *shift share* Secara agregat terjadi penambahan tingkat output Ekonomi selama tahun 2000-2010 sebesar 1,353.076 juta rupiah. sebagian besar (99,20 persen) disebabkan efek pertumbuhan ekonomi di tingkat propinsi Lampung, sementara itu pengaruh dari efek bauran industri / sektoral (*proportional Share*) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara hanya sebesar 2,24 Persen. Dan secara keseluruhan perekonomian Kabupaten Lampung tidak memiliki daya saing atau kemandirian daerah dilihat dari nilai *different shift* yang negative, namun jika dilihat setiap sektor maka ada beberapa sektor yang tumbuh lebih cepat dari tingkat propinsi yaitu sektor pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa jasa

4. Berdasarkan analisis gabungan LQ, shift share dan melihat kontribusi dan pertumbuhannya maka sub sektor yang menjadi unggulan dan *tradeable* yaitu sub sektor kehutanan, sub sektor listrik, perdagangan besar dan eceran, angkutan jalan raya, sub sektor industri makanan dan minuman, perkebunan, dan sub sektor perbankan
5. Dari 7 sub sektor unggulan terdapat 6 sub sektor yang masuk dalam program prioritas pada RPJMD Lampung Utara tahun 2010-2014 sedangkan 1 sub sektor unggulan lainnya tidak masuk RPJMD yaitu sub sektor bank
6. Sedangkan yang mendapat dukungan alokasi anggaran terbesar yaitu jasa pemerintahan umum sebesar 78,57 % yang terdiri dari sub sektor jasa pemerintahan lainnya, sub sektor administrasi pemerintahan dan pertahanan sebesar dan subsektor konstruksi 14,34 %, sedangkan sub sektor unggulan lainnya mendapatkan porsi anggaran kurang dari 3 %
7. Telah terjadi perubahan / tranformasi struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tertier

## 6.2 Saran

1. Untuk memacu perekonomian Kabupaten Lampung Utara, maka Pemerintah daerah sebaiknya fokus pada sub sektor unggulan terutama pada sub sektor perkebunan yang merupakan sub sektor dengan penyumbang multiplier terbesar dan banyak menyerap tenaga kerja
2. Alokasi anggaran untuk sub sektor unggulan perlu di tingkatkan terutama untuk membantu peningkatan produksi perkebunan rakyat seperti lada, kopi dan kelapa sawit sedangkan untuk perkebunan besar diperlukan kelancaran distribusi hasil produksi seperti kondisi jalan yang baik
3. Membuat kebijakan yang mendukung investasi swasta terutama di bidang industri pengolahan, perbankan dan jasa jasa
4. Untuk penyusunan Rencana Pembangunan Ekonomi priode berikutnya sebaiknya di dasarkan pada hasil analisis ekonomi sektoral



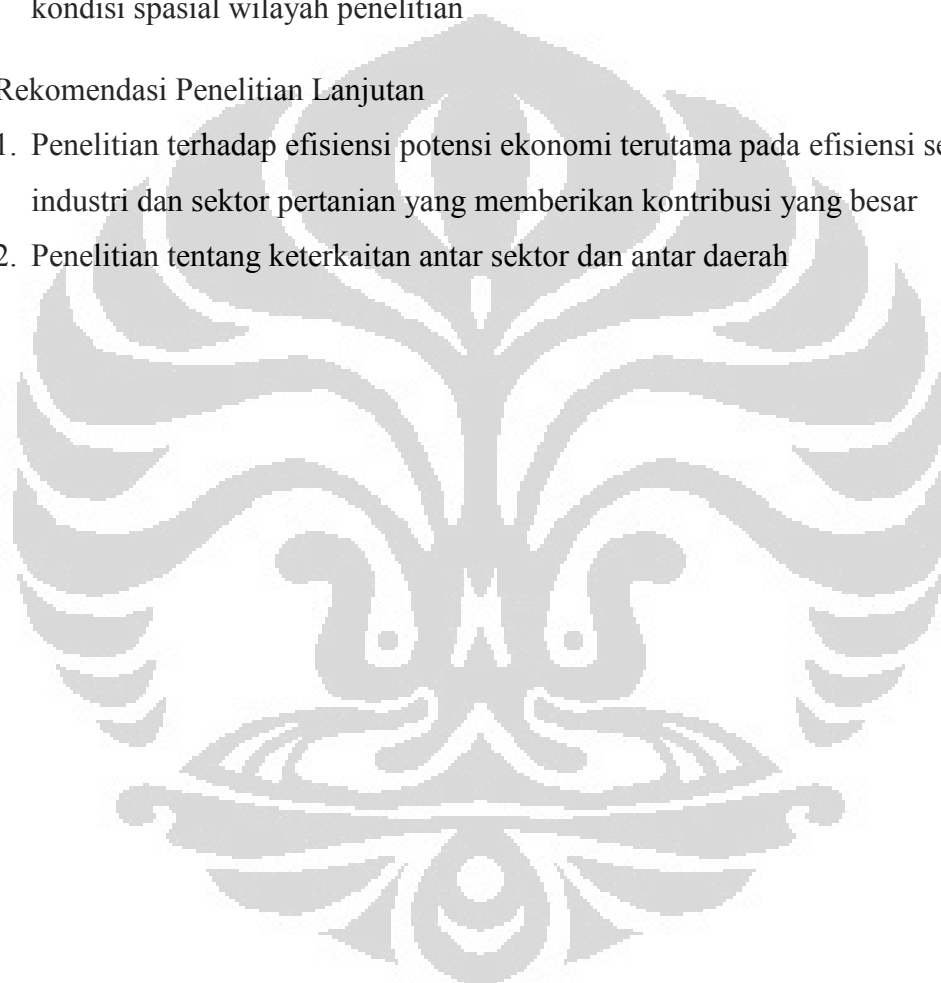
### 6.3 Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi Penelitian Berikutnya

Keterbatasan penelitian :

1. Penelitian ini tidak mampu melihat keterkaitan antar sektor serta keterkaitan antar daerah
2. Tidak mampu melihat tingkat produktivitas dan efisiensi produksi sektoral
3. Penelitian ini hanya sebatas tingkat sub sektor tidak sampai tingkat produk dan kondisi spasial wilayah penelitian

Rekomendasi Penelitian Lanjutan

1. Penelitian terhadap efisiensi potensi ekonomi terutama pada efisiensi sektor industri dan sektor pertanian yang memberikan kontribusi yang besar
2. Penelitian tentang keterkaitan antar sektor dan antar daerah



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita.Rahardjo (2005 ). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Graha Ilmu Yogyakarta.
- Arsyad. Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi keempat. Bagian Penerbitan STIE YKPN. Yogyakarta.
- Arsyad. Lincolin. 2005. Pengantar Perencanaan Pembangunan *Ekonomi Daerah*. Edisi kedua. Bagian Penerbitan STIE YKPN. Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik . *Pendapatan Regional Kabupaten Lampung Utara tahun 2000-2010*. BPS Kabupaten Lampung Utara
- Badan Pusat Statistik . *Pendapatan Regional Propinsi Lampung tahun 2000-2010*. BPS Propinsi Lampung
- Badan Pusat Statistik 2010. *Lampung Utara Dalam Angka 2010*. Kabupaten Lampung Utara
- Bappeda. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Utara. tahun 2010-2014*. Bappeda Kabupaten Lampung Utara 2010
- Bappeda. *Rencana Strategis Kabupaten Lampung Utara. tahun 2004-2008*. Bappeda Kabupaten Lampung Utara 2004
- Bendavid-Val Avrom . 1991 . *Regional and Local Economic Analysis For Practitioners*. Fourth Edition. New York: Prager Publisher
- Blakely.Ej. 1994. *Planning Local Economic Development Theory and Practice*. Sage publication International education and professional publisher
- Budiono.1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Direktorat jenderal Perimbangan Keuangan. APBD Kabupaten Lampung Utara tahun 2010 dan 2011.
- Direktorat jenderal Perimbangan Keuandangdata .Data series. APBD tahun 2007-2011. [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)
- Glasson. Jhon. 1990. *Pengantar Perencanaan Regional*. terjemahan Paul Sitohang. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Hoover. EM. 1977 . *Pengantar Ekonomi Regional* . Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia. Jakarta

- Kuncoro.Mudrajad.2003. *Ekonomi Pembangunan Teori. Masalah dan Kebijakan*. Edisi Pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Myrdal, Gunnar. 1957, *Economic Theory and Underdeveloped Regions*, London : Penguin Books
- North, Douglass C. 1991. *Institutions, Jornal of Economic Perspective*, Vol % 91), PP.97-112
- Rachbini. Didik J. 2001. *Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Manusia*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Richardson. Harry W. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Terjemahan Paul Sitohang. Edisi Revisi. Lembaga Penerbit FE UI. Jakarta.
- Salvator. Dominick . 1996 . *principles of Economics*.second Edition.
- Sjafrizal.1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Prisma LP3ES. No 3 Tahun XXVI :27-38
- Sirojuzilam. 2008. *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan regional, ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Timur Propinsi Sumatera Utara*, Pustaka Bangsa pers
- Soetiono. Dedi NS. 2011. *Ekonomi Pengembangan Wilayah*. Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Tarigan. Robinson. 2007. *Ekonomi Regional. Teori dan Aplikasi*. PT. Bumi Aksara. Cetakan Keempat. Jakarta.
- Todaro. Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga. Edisi Ketujuh. Jakarta.

**Lampiran I : PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROPINSI LAMPUNG  
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2000 - 2010 ( JUTA RUPIAH )**

<b>LAPANGAN USAHA</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>1. PERTANIAN</b>	<b>10,388,765.06</b>	<b>10,727,709.11</b>	<b>10,871,432.99</b>	<b>11,318,865.66</b>	<b>11,951,916.36</b>
a. Tanaman Bahan Makanan	4,982,356.58	5,227,058.06	5,106,607.10	5,512,569.47	6,025,104.41
b. Tanaman Perkebunan	2,660,448.14	2,692,649.00	2,898,264.71	2,889,260.22	2,872,125.80
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	1,369,115.44	1,411,780.46	1,431,922.91	1,444,627.16	1,409,345.25
d. Kehutanan	47,490.06	65,095.00	81,366.94	102,345.41	121,932.25
e. Perikanan	1,329,354.85	1,331,126.58	1,353,271.32	1,370,063.39	1,523,408.65
<b>2. PERTAMBANGAN &amp; PENGGALIAN</b>	<b>603,630.74</b>	<b>611,247.43</b>	<b>1,047,208.07</b>	<b>1,137,100.26</b>	<b>1,023,003.90</b>
a. Minyak dan Gas Bumi	330,541.00	330,541.00	757,262.00	832,851.00	695,012.00
b. Pertambangan Bukan Migas	142.67	165.33	272.42	365.64	337.71
c. Penggalian	272,947.07	280,541.11	289,673.64	303,883.62	327,654.20
<b>3. INDUSTRI PENGOLAHAN</b>	<b>3,112,084.00</b>	<b>3,278,986.00</b>	<b>3,432,788.79</b>	<b>3,572,660.00</b>	<b>3,739,702.00</b>
<b>a. Industri Migas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Pengilangan Minyak Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gas Alam Cair	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>b. Industri Bukan Migas</b>	<b>3,112,084.00</b>	<b>3,278,986.00</b>	<b>3,432,788.79</b>	<b>3,572,660.00</b>	<b>3,739,702.00</b>
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	2,293,777.18	2,457,504.83	2,662,673.45	2,720,503.11	2,882,952.91
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	53,859.07	57,936.91	43,240.35	54,654.95	53,215.92
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	348,936.75	343,291.01	347,622.67	357,678.22	343,218.47
4. Kertas dan Barang Cetak	14,230.54	12,922.60	11,686.56	15,853.20	14,459.65
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	119,512.36	136,446.94	115,073.55	135,822.47	139,691.51
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	167,047.95	165,728.96	145,383.22	173,208.34	178,310.59
7. Logam Dasar Besi & Baja	91,862.34	80,853.64	77,390.64	93,537.49	94,899.06
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	5,958.08	12,995.84	6,850.28	7,453.90	8,312.98
9. Barang lainnya	16,899.72	11,305.27	22,868.07	13,948.33	24,640.92
<b>4. LISTRIK, GAS &amp; AIR BERSIH</b>	<b>77,957.45</b>	<b>82,812.62</b>	<b>95,980.03</b>	<b>92,750.60</b>	<b>99,241.90</b>
a. Listrik	55,468.76	55,572.65	68,745.00	68,791.27	75,878.88
b. Gas Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Air Bersih	22,488.70	27,239.97	27,235.03	23,959.33	23,363.01
<b>5. KONSTRUKSI</b>	<b>1,198,943.32</b>	<b>1,242,108.73</b>	<b>1,337,717.83</b>	<b>1,393,596.55</b>	<b>1,434,323.99</b>
<b>6. PERDAG., HOTEL &amp; RESTORAN</b>	<b>3,620,047.49</b>	<b>3,781,805.86</b>	<b>4,072,966.12</b>	<b>4,239,508.15</b>	<b>4,381,268.82</b>
a. Perdagangan Besar & Eceran	3,294,552.53	3,451,422.09	3,703,651.84	3,856,893.95	3,983,723.66
b. Hotel	20,427.38	21,012.00	22,237.51	22,957.62	23,457.72
c. Restoran	305,067.58	309,371.77	347,076.77	359,656.57	374,087.44
<b>7. PENGANGKUTAN &amp; KOMUNIKASI</b>	<b>1,276,332.53</b>	<b>1,341,394.17</b>	<b>1,426,246.34</b>	<b>1,558,658.60</b>	<b>1,656,706.50</b>
<b>a. Pengangkutan</b>	<b>1,077,744.89</b>	<b>1,098,358.19</b>	<b>1,173,865.40</b>	<b>1,281,141.22</b>	<b>1,346,649.10</b>
1. Angkutan Jalan Rel	5,583.40	6,780.57	6,658.68	82,101.21	82,594.44
2. Angkutan Jalan Raya	756,090.54	783,474.07	794,730.13	830,905.58	871,066.42
3. Angkutan Laut	98,125.16	87,607.63	118,099.86	118,692.56	127,271.86
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	92,561.66	93,458.79	99,845.71	88,886.74	94,912.16
5. Angkutan Udara	2,201.49	3,052.52	4,083.20	5,982.34	9,833.54
6. Jasa Penunjang Angkutan	123,182.64	123,984.61	150,447.83	154,572.79	160,970.69
<b>b. Komunikasi</b>	<b>198,587.64</b>	<b>243,035.98</b>	<b>252,380.93</b>	<b>277,517.38</b>	<b>310,057.40</b>
1. Pos dan Telekomunikasi	198,587.64	243,035.98	252,380.93	277,517.38	310,057.40
2. Jasa Penunjang Komunikasi	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>8. KEU. REAL ESTAT, &amp; JASA PERUSAHAAN</b>	<b>843,422.66</b>	<b>862,160.19</b>	<b>970,179.76</b>	<b>1,365,410.36</b>	<b>1,722,085.65</b>
a. Bank	51,113.79	1,792.89	21,850.77	297,771.84	516,938.46
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	79,663.81	86,920.92	90,706.12	98,109.15	95,762.55
c. Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Real Estat	682,751.63	743,075.55	825,325.66	936,531.40	1,074,469.43
e. Jasa Perusahaan	29,893.44	30,370.83	32,297.21	32,997.97	34,915.21
<b>9. JASA-JASA</b>	<b>2,124,799.60</b>	<b>2,151,383.54</b>	<b>2,178,755.37</b>	<b>2,219,501.73</b>	<b>2,254,039.41</b>
<b>a. Pemerintahan Umum</b>	<b>1,726,813.75</b>	<b>1,743,045.80</b>	<b>1,759,968.57</b>	<b>1,776,891.35</b>	<b>1,793,296.08</b>
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	1,140,560.48	1,151,281.75	1,162,459.24	1,173,636.74	1,184,472.06
2. Jasa Pemerintah lainnya	586,253.27	591,764.05	597,509.33	603,254.61	608,824.02
<b>b. Swasta</b>	<b>397,985.85</b>	<b>408,337.74</b>	<b>418,786.80</b>	<b>442,610.39</b>	<b>460,743.33</b>
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	184,753.38	190,677.56	191,243.60	201,484.91	212,979.79
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	10,104.99	10,724.00	11,574.70	13,170.62	14,039.45
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	203,127.48	206,936.19	215,968.50	227,954.86	233,724.09
<b>PDRB</b>	<b>23,245,982.85</b>	<b>24,079,607.66</b>	<b>25,433,275.29</b>	<b>26,898,051.91</b>	<b>28,262,288.53</b>
<b>PDRB TANPA MIGAS</b>	<b>22,915,441.85</b>	<b>23,749,066.66</b>	<b>24,676,013.29</b>	<b>26,065,200.91</b>	<b>27,567,276.53</b>

(lanjutan lampiran 1)

LAPANGAN USAHA	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>1. PERTANIAN</b>	<b>12,509,837.27</b>	<b>13,184,537.31</b>	<b>13,912,096.62</b>	<b>14,317,531.84</b>	<b>14,693,880.75</b>	<b>14,759,601.89</b>
a. Tanaman Bahan Makanan	6,254,781.70	6,413,617.58	6,693,475.64	6,904,106.86	6,916,932.09	6,946,609.72
b. Tanaman Perkebunan	2,985,849.39	3,114,166.77	3,233,852.15	3,496,030.91	3,701,759.10	3,684,781.78
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	1,420,753.17	1,442,314.18	1,458,290.96	1,483,777.57	1,621,667.03	1,649,023.77
d. Kehutanan	130,534.93	148,318.44	160,961.02	153,263.03	152,680.23	155,822.37
e. Perikanan	1,717,918.08	2,066,120.34	2,365,516.84	2,280,353.47	2,300,842.30	2,323,364.25
<b>2. PERTAMBANGAN &amp; PENGGALIAN</b>	<b>896,202.45</b>	<b>850,699.65</b>	<b>825,045.08</b>	<b>812,854.17</b>	<b>737,977.45</b>	<b>712,841.22</b>
a. Minyak dan Gas Bumi	560,110.00	494,134.44	462,946.55	463,616.81	401,041.03	375,208.82
b. Pertambangan Bukan Migas	317.20	299.31	371.52	349.24	564.14	628.89
c. Penggalian	335,775.25	356,265.90	361,727.01	348,888.12	336,372.28	337,003.51
<b>3. INDUSTRI PENGOLAHAN</b>	<b>3,894,899.63</b>	<b>4,070,170.12</b>	<b>4,327,899.21</b>	<b>4,608,468.62</b>	<b>4,879,400.59</b>	<b>5,177,596.49</b>
<b>a. Industri Migas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Pengilangan Minyak Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gas Alam Cair	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>b. Industri Bukan Migas</b>	<b>3,894,899.63</b>	<b>4,070,170.12</b>	<b>4,327,899.21</b>	<b>4,608,468.62</b>	<b>4,879,400.59</b>	<b>5,177,596.49</b>
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	2,974,782.75	3,187,385.96	3,356,311.25	3,706,386.40	3,925,700.84	4,181,447.44
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	54,273.81	54,331.95	67,722.76	72,984.30	78,302.37	81,075.73
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	366,128.34	305,926.25	172,143.00	105,728.06	98,889.24	101,168.51
4. Kertas dan Barang Cetak	15,278.80	14,700.54	15,077.65	28,147.16	28,334.26	27,439.22
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	181,794.83	189,046.08	305,434.91	423,115.27	456,237.53	479,430.40
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	176,068.42	181,465.94	212,456.51	109,970.63	102,415.23	106,519.59
7. Logam Dasar Besi & Baja	99,966.38	111,122.32	156,020.10	59,182.39	62,060.49	63,433.54
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	8,359.45	7,325.88	12,325.03	76,520.54	101,240.33	107,912.97
9. Barang lainnya	18,246.85	18,865.20	30,407.99	26,433.87	26,220.30	29,169.09
<b>4. LISTRIK, GAS &amp; AIR BERSIH</b>	<b>104,221.31</b>	<b>107,764.29</b>	<b>118,734.02</b>	<b>125,819.05</b>	<b>129,395.55</b>	<b>144,236.85</b>
a. Listrik	81,257.15	89,701.34	99,926.87	103,110.25	107,978.99	120,957.83
b. Gas Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Air Bersih	22,964.16	18,062.95	18,807.14	22,708.80	21,416.56	23,279.02
<b>5. KONSTRUKSI</b>	<b>1,475,974.67</b>	<b>1,528,781.42</b>	<b>1,610,120.72</b>	<b>1,685,422.68</b>	<b>1,767,563.12</b>	<b>1,833,090.91</b>
<b>6. PERDAG., HOTEL &amp; RESTORAN</b>	<b>4,616,976.49</b>	<b>4,851,753.10</b>	<b>5,068,004.44</b>	<b>5,422,902.94</b>	<b>5,799,952.40</b>	<b>6,075,664.87</b>
a. Perdagangan Besar & Eceran	4,210,748.00	4,427,129.00	4,615,610.85	4,961,866.33	5,310,864.99	5,540,533.26
b. Hotel	24,587.72	25,852.08	25,812.76	27,146.59	27,184.48	30,563.19
c. Restoran	381,640.77	398,772.01	426,580.83	433,890.02	461,902.94	504,568.43
<b>7. PENGANGKUTAN &amp; KOMUNIKASI</b>	<b>1,751,068.75</b>	<b>1,855,067.88</b>	<b>2,002,445.83</b>	<b>2,178,898.04</b>	<b>2,428,791.41</b>	<b>2,803,217.73</b>
<b>a. Pengangkutan</b>	<b>1,407,705.59</b>	<b>1,467,957.56</b>	<b>1,528,333.23</b>	<b>1,623,063.30</b>	<b>1,758,359.01</b>	<b>2,012,581.85</b>
1. Angkutan Jalan Rel	78,777.32	83,274.21	79,460.83	103,449.65	97,727.58	113,177.80
2. Angkutan Jalan Raya	915,602.33	953,739.58	1,000,355.56	1,050,742.39	1,180,908.12	1,334,590.49
3. Angkutan Laut	143,269.73	139,828.24	144,983.04	137,301.00	123,031.86	125,790.23
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	91,294.22	96,489.13	102,117.00	119,121.42	144,207.64	176,478.09
5. Angkutan Udara	10,972.04	18,520.73	20,511.35	23,136.53	30,628.54	40,974.26
6. Jasa Penunjang Angkutan	167,789.96	176,105.67	180,905.45	189,312.31	181,855.27	221,570.98
<b>b. Komunikasi</b>	<b>343,363.16</b>	<b>387,110.32</b>	<b>474,112.60</b>	<b>555,834.74</b>	<b>670,432.40</b>	<b>790,635.88</b>
1. Pos dan Telekomunikasi	343,363.16	387,110.32	474,112.60	555,834.74	670,432.40	790,635.88
2. Jasa Penunjang Komunikasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8. KEU. REAL ESTAT, &amp; JASA PERUSAHAAN</b>	<b>1,841,054.81</b>	<b>2,054,882.10</b>	<b>2,364,338.27</b>	<b>2,691,784.73</b>	<b>3,039,338.06</b>	<b>3,900,644.52</b>
a. Bank	620,862.17	816,076.99	1,054,591.00	1,330,538.33	1,509,766.48	2,249,445.66
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	99,587.74	106,645.80	121,212.91	133,413.85	144,329.43	168,580.71
c. Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Real Estat	1,084,731.32	1,095,012.70	1,148,319.97	1,184,540.07	1,336,029.81	1,427,407.55
e. Jasa Perusahaan	35,873.58	37,146.60	40,214.39	43,292.48	49,212.34	55,210.60
<b>9. JASA-JASA</b>	<b>2,307,013.01</b>	<b>2,357,704.54</b>	<b>2,466,205.44</b>	<b>2,599,469.70</b>	<b>2,744,839.47</b>	<b>2,898,382.50</b>
<b>a. Pemerintahan Umum</b>	<b>1,822,347.39</b>	<b>1,848,042.49</b>	<b>1,903,999.27</b>	<b>1,989,301.16</b>	<b>2,048,643.84</b>	<b>2,091,415.68</b>
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	1,203,660.45	1,220,632.06	1,257,591.52	1,322,885.27	1,362,348.15	1,390,791.43
2. Jasa Pemerintah lainnya	618,686.94	627,410.43	646,407.75	666,415.89	686,295.69	700,624.25
<b>b. Swasta</b>	<b>484,665.62</b>	<b>509,662.05</b>	<b>562,206.16</b>	<b>610,168.54</b>	<b>696,195.63</b>	<b>806,966.82</b>
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	231,074.26	242,871.31	265,690.63	296,747.38	356,934.24	433,153.02
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	14,833.49	16,106.44	17,933.98	21,060.63	21,999.88	26,269.30
3. Jasa Perorangan & Rumahtangga	238,757.88	250,684.29	278,581.55	292,360.52	317,261.51	347,544.50
<b>PDRB</b>	<b>29,397,248.40</b>	<b>30,861,360.40</b>	<b>32,694,889.62</b>	<b>34,443,151.77</b>	<b>36,221,138.80</b>	<b>38,305,277.00</b>
<b>PDRB TANPA MIGAS</b>	<b>28,837,138.40</b>	<b>30,367,225.96</b>	<b>32,231,943.08</b>	<b>33,979,534.97</b>	<b>35,820,097.77</b>	<b>37,930,068.18</b>

7,608,405.00

Lampiran 2 : PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2000 - 2010 ( JUTA RUPIAH )

LAPANGAN USAHA	2000	2001	2002	2003	2004
1. PERTANIAN	991,709.00	1,002,082.00	990,299.00	996,500.00	1,024,644.00
a. Tanaman Bahan Makanan	401,235.00	408,417.00	408,216.00	423,061.00	438,511.00
b. Tanaman Perkebunan	437,283.00	436,745.00	410,799.00	395,734.00	406,917.00
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	130,476.00	131,559.00	142,280.00	143,663.00	138,961.00
d. Kehutanan	4,728.00	5,934.00	7,888.00	11,735.00	17,117.00
e. Perikanan	17,987.00	19,427.00	21,116.00	22,307.00	23,138.00
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	14,143.00	14,864.00	15,550.00	16,717.00	17,709.00
a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	14,143.00	14,864.00	15,550.00	16,717.00	17,709.00
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	260,730.00	270,906.00	282,266.00	289,378.00	317,653.00
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	260,730.00	270,906.00	282,266.00	289,378.00	317,653.00
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	221,742.00	230,976.00	240,985.00	246,961.00	270,472.00
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	-	-	-	-	-
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	9,476.00	9,889.00	10,092.00	10,397.00	11,882.00
4. Kertas dan Barang Cetakan	12,979.00	13,257.00	13,857.00	14,073.00	15,984.00
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	-	-	-	-	-
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	15,269.00	15,460.00	15,986.00	16,532.00	17,794.00
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	-	-	-	-	-
9. Barang lainnya	1,264.00	1,324.00	1,346.00	1,415.00	1,521.00
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	5,335.00	8,539.00	16,712.00	18,635.00	18,985.00
a. Listrik	2,858.00	6,166.00	15,459.00	17,423.00	18,043.00
b. Gas Kota	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	2,477.00	2,373.00	1,253.00	1,212.00	942.00
5. KONSTRUKSI	75,729.00	85,969.00	90,950.00	96,751.00	104,142.00
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	321,540.00	333,437.00	366,871.00	391,902.00	432,345.00
a. Perdagangan Besar & Eceran	292,864.00	303,338.00	335,323.00	359,814.00	398,561.00
b. Hotel	147.00	156.00	158.00	160.00	155.00
c. Restoran	28,529.00	29,943.00	31,390.00	31,928.00	33,629.00
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	94,810.00	101,566.00	111,744.00	119,228.00	126,238.00
a. Pengangkutan	80,976.00	83,912.00	93,192.00	98,242.00	102,836.00
1. Angkutan Jalan Rel	292.00	333.00	327.00	187.00	186.00
2. Angkutan Jalan Raya	80,654.00	83,548.00	92,832.00	98,021.00	102,614.00
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	-	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	30.00	31.00	33.00	34.00	36.00
b. Komunikasi	13,834.00	17,654.00	18,552.00	20,986.00	23,402.00
1. Pos dan Telekomunikasi	13,834.00	17,654.00	18,552.00	20,986.00	23,402.00
2. Jasa Penunjang Komunikasi	-	-	-	-	-
8. KEU. REAL ESTAT, & JASA PERUSAHAAN	92,010.00	99,399.00	110,633.00	162,802.00	167,191.00
a. Bank	10,370.00	10,766.00	13,779.00	57,384.00	56,256.00
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	2,438.00	2,706.00	2,973.00	3,267.00	3,555.00
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
d. Real Estat	75,431.00	81,563.00	89,215.00	97,884.00	102,443.00
e. Jasa Perusahaan	3,771.00	4,364.00	4,666.00	4,267.00	4,937.00
9. JASA-JASA	192,635.00	197,815.00	202,670.00	207,830.00	214,397.00
a. Pemerintahan Umum	155,412.00	163,516.00	167,959.00	170,311.00	173,216.00
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	102,650.00	108,002.00	110,937.00	112,490.00	114,409.00
2. Jasa Pemerintah lainnya	52,762.00	55,514.00	57,022.00	57,821.00	58,807.00
b. Swasta	37,223.00	34,299.00	34,711.00	37,519.00	41,181.00
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	9,390.00	10,414.00	11,027.00	12,302.00	14,680.00
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	1,004.00	1,082.00	1,101.00	1,120.00	1,139.00
3. Jasa Perorangan & Rumahtangga	26,829.00	22,803.00	22,583.00	24,097.00	25,362.00
PDRB	2,048,641.00	2,114,577.00	2,187,695.00	2,299,743.00	2,423,304.00
PDRB TANPA MIGAS	2,048,641.00	2,114,577.00	2,187,695.00	2,299,743.00	2,423,304.00

(Lanjutan Lampiran 2)

LAPANGAN USAHA	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. PERTANIAN	1,032,278.00	1,071,321.00	1,097,328.00	1,145,282.00	1,213,640.00	1,269,291.00
a. Tanaman Bahan Makanan	440,994.00	466,263.00	490,736.00	510,838.00	539,996.00	569,103.00
b. Tanaman Perkebunan	412,629.00	427,561.00	428,016.00	453,311.00	489,792.00	512,102.00
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	139,051.00	135,187.00	135,197.00	135,197.00	136,821.00	139,845.00
d. Kehutanan	16,440.00	17,840.00	17,484.00	20,041.00	20,663.00	21,287.00
e. Perikanan	23,164.00	24,470.00	25,895.00	25,895.00	26,368.00	26,954.00
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	18,590.00	23,349.00	24,175.00	25,294.00	26,812.00	28,209.00
a. Minyak dan Gas Bumi						
b. Pertambangan Bukan Migas						
c. Penggalian	18,590.00	23,349.00	24,175.00	25,294.00	26,812.00	28,209.00
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	339,864.00	379,831.00	429,893.00	451,359.00	474,197.00	499,112.00
a. Industri Migas	-	-	-	-	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	339,864.00	379,831.00	429,893.00	451,359.00	474,197.00	499,112.00
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	290,521.00	325,383.00	370,386.00	387,535.00	406,623.00	427,808.00
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	-	-	-	-	-	-
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	12,298.00	13,896.00	15,564.00	16,534.00	17,954.00	19,608.00
4. Kertas dan Barang Cetak	16,388.00	18,846.00	20,523.00	21,736.00	22,832.00	23,704.00
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	-	-	-	-	-	-
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	19,025.00	19,976.00	21,574.00	23,653.00	24,825.00	25,923.00
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-	-
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	-	-	-	-	-	-
9. Barang lainnya	1,632.00	1,730.00	1,846.00	1,901.00	1,963.00	2,069.00
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	19,454.00	19,257.00	19,776.00	20,676.00	21,664.00	22,743.00
a. Listrik	18,524.00	18,644.00	19,175.00	20,063.00	21,032.00	22,128.00
b. Gas Kota	-	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	930.00	613.00	601.00	613.00	632.00	615.00
5. KONSTRUKSI	114,817.00	126,585.00	133,964.00	143,779.00	153,497.00	164,428.00
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	455,832.00	489,275.00	503,757.00	531,686.00	558,567.00	589,978.00
a. Perdagangan Besar & Eceran	420,880.00	452,859.00	464,543.00	490,652.00	515,346.00	544,314.00
b. Hotel	153.00	162.00	170.00	182.00	196.00	211.00
c. Restoran	34,799.00	36,254.00	39,044.00	40,852.00	43,025.00	45,453.00
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	134,696.00	140,442.00	175,662.00	192,676.00	210,620.00	226,510.00
a. Pengangkutan	108,790.00	111,511.00	140,694.00	152,592.00	164,161.00	177,630.00
1. Angkutan Jalan Rel	192.00	196.00	190.00	199.00	201.00	205.00
2. Angkutan Jalan Raya	108,555.00	111,269.00	140,449.00	152,335.00	163,898.00	177,354.00
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-	-
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	-	-	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	43.00	46.00	55.00	58.00	62.00	71.00
b. Komunikasi	25,906.00	28,931.00	34,968.00	40,084.00	46,459.00	48,880.00
1. Pos dan Telekomunikasi	25,906.00	28,931.00	34,968.00	40,084.00	46,459.00	48,880.00
2. Jasa Penunjang Komunikasi	-	-	-	-	-	-
8. KEU. REAL ESTAT, & JASA PERUSAHAAN	190,881.00	195,856.00	215,073.00	226,981.00	255,215.00	290,315.00
a. Bank	74,662.00	73,395.00	87,267.00	89,374.00	109,641.00	135,569.00
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	4,073.00	4,832.00	5,567.00	5,938.00	6,258.00	6,647.00
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-	-
d. Real Estat	107,215.00	112,575.00	117,078.00	126,011.00	133,214.00	141,416.00
e. Jasa Perusahaan	4,931.00	5,054.00	5,161.00	5,658.00	6,102.00	6,683.00
9. JASA-JASA	233,185.00	240,780.00	255,493.00	279,930.00	294,294.00	311,131.00
a. Pemerintahan Umum	189,562.00	195,718.00	202,255.00	219,710.00	229,348.00	241,297.00
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	125,206.00	129,271.00	133,589.00	145,118.00	151,485.00	159,377.00
2. Jasa Pemerintah lainnya	64,356.00	66,447.00	68,666.00	74,592.00	77,863.00	81,920.00
b. Swasta	43,623.00	45,062.00	53,238.00	60,220.00	64,946.00	69,834.00
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	15,531.00	15,843.00	18,728.00	21,468.00	22,883.00	24,375.00
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	1,241.00	1,340.00	1,615.00	1,755.00	1,888.00	2,030.00
3. Jasa Perorangan & Rumahtangga	26,851.00	27,879.00	32,895.00	36,997.00	40,175.00	43,429.00
PDRB	2,539,597.00	2,686,696.00	2,855,121.00	3,017,663.00	3,208,506.00	3,401,717.00
PDRB TANPA MIGAS	2,539,597.00	2,686,696.00	2,855,121.00	3,017,663.00	3,208,506.00	3,401,717.00

Lampiran 3 : Alokasi Anggaran berdasarkan subsektor Kabupaten Lampung Utara Tahun anggaran 2007-2011 ( jutaan rupiah )

SEKTOR/SUB SEKTOR	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
<b>1. Pertanian</b>										
a. Tan.Bhn makanan (ketahanan pangan)	-	-	-	-	400	0.06	1,568	0.23	2,128	0.25
b. Tanaman Perkebunan + Peternakan	17,168	3.34	13,703	2.03	11,427	1.74	14,040	2.04	18,647	2.18
c. Kehutanan	7,344	1.43	7,821	1.16	9,505	1.44	13,395	1.94	14,007	1.64
d. Perikanan	-	-	-	-	2,383	0.36	2,896	0.42	5,765	0.67
<b>2. Pertambangan dan penggalian</b>										
c. Penggalian	2,113	0.41	2,191	0.32	2,538	0.39	2,988	0.43	3,953	0.46
<b>3. Industri pengolahan</b>										
<b>b. Industri Bukan Migas</b>	1,912	0.37	2,531	0.37	2,365	0.36	4,867	0.71	5,198	0.61
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Listrik, Gas dan Air Bersih</b>										
<b>5. Kontruksi</b>	<b>136,347</b>	<b>26.54</b>	<b>167,495</b>	<b>24.75</b>	<b>111,236</b>	<b>16.89</b>	<b>101,226</b>	<b>14.69</b>	<b>122,769</b>	<b>14.34</b>
<b>6. Perdagangan, hotel dan restoran</b>										
a. Perdagangan Besar & Eceran	3,559	0.69	5,221	0.77	5,095	0.77	3,872	0.56	3,314	0.39
<b>7. Pengangkutan &amp; Komunikasi</b>										
2. Angkutan Jalan Raya	3,220	0.63	4,025	0.59	5,182	0.79	6,729	0.98	7,719	0.90
<b>8. Keu. Real estat &amp; Jasa Perusahaan</b>										
a. Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Real Estat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. Jasa Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9. JASA-JASA</b>										
<b>a. Pemerintahan Umum</b>										
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	132,877	25.87	186,957	27.63	177,797	27.00	222,880	32.35	210,110	24.54
2. Jasa Pemerintah lainnya	209,180	40.72	286,767	42.38	330,594	50.20	314,477	45.65	462,588	54.03
<b>b. Swasta</b>										
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>513,720</b>	<b>100</b>	<b>676,711</b>	<b>100</b>	<b>658,523</b>	<b>100</b>	<b>688,937</b>	<b>100</b>	<b>856,198</b>	<b>100</b>